

JURNAL KEAMANAN NASIONAL

Akreditasi: SK Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti
No. 21/E/KPT/2018 tanggal 9 Juli 2018

- Mitigasi Konflik di Lingkar Tambang: Studi Tentang Kontribusi Program Tanggung Jawab Sosial (CSR) PT. Vale Indonesia di Sorowako
- Kebijakan Strategis Mitigasi Ancaman Peredaran Orbit Satelit terhadap Keamanan Nasional: Pendekatan *Analytical Hierarchy Process*
- Network Centric Warfare dan Perang Asimetris di Afghanistan
- Ekonomi Politik Pembunuhan Massal: Prolog Pembunuhan Massal 1965 di Bali
- Book Review: Atas Nama Kebencian; Kajian Kasus-kasus Kejahatan Berbasis Kebencian di Indonesia



Pusat Kajian Keamanan Nasional
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Akreditasi: SK Dirjen Penguatan Riset dan
Pengembangan Kemenristekdikti
No. 21/E/KPT/2018 tanggal 9 Juli 2018

- Mitigasi Konflik di Lingkar Tambang: Studi
Tentang Kontribusi Program Tanggung Jawab
Sosial (CSR) PT. Vale Indonesia di Sorowako**
Sewedi Muhammad, Mansyur Radjab,
Rahmat Muhammad..... 123-140
- Kebijakan Strategis Mitigasi Ancaman
Penedaran Orbit Satelit terhadap Keamanan
Nasional: Pendekatan *Analytical Hierarchy
Process***
Herdis Herdiansyah 141-164
- Network Centric Warfare dan Perang
Asimetris di Afghanistan**
Aziz Rahmani 165-210
- Ekonomi Politik Pembunuhan Massal: Prolog
Pembunuhan Massal 1965 di Bali**
Gede Indra Pramana..... 211-230
- Gerakan Islam Radikal di Sulawesi Selatan:
Pola Rekrutmen dan Pola Gerakan Komite
Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI)
dan Laskar Jundullah**
Bambang Karsono 231-246
- Book Review: Atas Nama Kebencian; Kajian
Kasus-kasus Kejahatan Berbasis Kebencian di
Indonesia**
Sumarno Kartodiono 247-250

Mitigasi Konflik di Lingkar Tambang: Studi Tentang Kontribusi Program Tanggung Jawab Sosial (CSR) PT. Vale Indonesia di Sorowako

Sawedi Muhammad¹, Mansyur Radjab², Rahmat Muhammad³

Sociology Department, Political & Social Science Faculty,
Hasanuddin University

Email: ¹msawedi@yahoo.com; ²mansyurradjab@yahoo.co.id

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) has played strategic roles in mining industries in Indonesia over the last two decades. CSR contributes not only to improve basic physical infrastructures of local communities such as roads, bridges, health-center, schools and libraries but also to accommodate the needs of indigenous people in preserving and promoting their local art and culture. Some companies have been advancing their CSR roles to actively participate in mitigating the potential of trans-community conflict in their operation areas – a daunting task but worth executing – to ensure a sustained both social and government license to operate. The paper is aimed at unraveling CSR contribution of PT Vale Indonesia in transforming multicultural communities in its operation and what roles the company played in mitigating social conflict on the ground. The study finds out that company CSR management, which has adopted transparent, accountable and participatory methodologies have effectively improved the quality of life of local communities. The study also reveals that applying participatory methodologies in CSR management is not only enhance community participation in project-based, but also increase their awareness in mitigating social conflict in multicultural communities.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR) management; multicultural communities; conflict resolution; PT Vale Indonesia.

Abstrak

Corporate Social Responsibility (CSR) telah memainkan peran strategis dalam industri pertambangan di Indonesia selama dua dekade terakhir. CSR berkontribusi tidak hanya untuk meningkatkan infrastruktur fisik dasar masyarakat lokal seperti jalan, jembatan, pusat kesehatan, sekolah dan perpustakaan tetapi juga untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat dalam melestarikan dan mempromosikan seni dan budaya lokal

mereka. Beberapa perusahaan telah memajukan peran CSR untuk secara aktif berpartisipasi dalam mengurangi potensi konflik antar-komunitas di wilayah operasi mereka – tugas yang menakutkan tetapi harus dijalankan – untuk memastikan tanggungjawab sosial dan pemerintah yang berkelanjutan dalam beroperasi. Makalah ini bertujuan untuk mengungkap kontribusi CSR PTq` Vale Indonesia dalam mengubah masyarakat multikultural dan peran apa yang dimainkan perusahaan dalam meredakan konflik sosial di lapangan. Studi ini menemukan bahwa manajemen CSR perusahaan, telah mengadopsi metodologi yang transparan, akuntabel dan partisipatif, serta secara efektif meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Studi ini juga mengungkapkan bahwa penerapan metodologi partisipatif dalam manajemen CSR tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek berbasis, tetapi juga meningkatkan kesadaran mereka dalam mengurangi konflik sosial di komunitas multikultural.

Kata kunci: Corporate social Responsibility (CSR), komunitas multikultural, resolusi konflik, PT Vale Indonesia.

A. Pendahuluan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah menjadi kewajiban hukum di Indonesia sejak disahkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini memperkuat UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana dalam pasal 15 ayat b menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan mengatur tentang kewajiban melaksanakan CSR perusahaan bagi BUMN. Bagi perusahaan yang bergerak di sektor mineral dan batu bara, UU No. 4 Tahun 2009 menjadi payung hukum yang mewajibkan mereka untuk melaksanakan CSR.¹

Karenan tuntutan pasar global akan sumber daya alam semakin meningkat tajam, maka sektor pertambangan mineral dan batu bara menjanjikan keuntungan yang melimpah. Akan tetapi tesis tentang kutukan sumber daya alam (*resource curse*) menegaskan bahwa keberlimpahan sumber daya alam mendatangkan serangkaian resiko

¹ Kristina Großmann, Martina Padmanabhan, dan Katharina von Braun, "Contested Development in Indonesia: Rethinking Ethnicity and Gender in Mining," *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, no. 1 (2017): 11–28.

distorsi ekonomi dan politik yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap timbulnya konflik-konflik sosial di lingkar tambang.² Manfaat dari sektor pertambangan terhadap penduduk, khususnya masyarakat lokal (*indigenous community*) dapat dilihat dari kontribusi perusahaan terhadap tumbuh kembangnya perusahaan setempat (*local suppliers*) dan ketersediaan tenaga kerja bagi angkatan kerja lokal. Akan tetapi penilaian akan dampak sebuah industri terhadap pembangunan akan sangat tergantung terhadap perspektif yang digunakan. Pilihan atas perspektif tertentu akan berdampak langsung terhadap kebijakan yang dipilih oleh pemerintah yang berkuasa. Dampaknya tentu berimplikasi terhadap pendekatan, model dan kebijakan yang akan diputuskan. Setiap perspektif tentu memiliki orientasi spesifik tentang masa lalu dan masa depan. Ia juga memiliki konsepsi khusus tentang filosofi keilmuan dan epistemologi. Peran sumber daya alam dalam pembangunan secara fundamental menjadi pembeda antara satu perspektif dengan perspektif lainnya.³

Perbedaan sangat tajam antara perspektif pembangunan ekonomi yang sangat permisif terhadap eksploitasi sumber daya alam dengan perspektif ekologis yang sangat protektif terhadap kelestarian dan kelangsungan ekologis. Dari pertentangan inilah kemudian melahirkan kompromi yang menjembatani perbedaan keduanya yaitu perpektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Perpspekif ini diposisikan sebagai jalan tengah dimana pembangunan diartikan sebagai upaya menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tidak mengorbankan kepentingan generasi berikutnya.⁴

Dari sinilah titik berangkat tuntutan komunitas global agar perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam melaksanakan kewajiban CSR seiring dengan semakin kuatnya desakan untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCC) yang merupakan prinsip *fairness, transparency* dan *accountability*.⁵ Akan tetapi,

² Jeffrey D. Sachs dan Andrew M. Warner, "Natural Resources and Economic Development, The Curse of Natural Resources," *European Economic Review* 45 (2001): 827-38.

³ Michael Ellsworth Colby, "Ecology, economics, and social systems: The evolution of the relationship between environmental management and development" (University of Pennsylvania, 1990).

⁴ Robert W. Kates, Thomas M. Parris, dan Anthony A. Leiserowitz, "What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice," *Environment: Science and Policy for Sustainable Development* 47, no. 3 (April 2005): 8-21, doi:10.1080/00139157.2005.10524444. Lihat juga: World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future* (OCF), Reprinted (Oxford: Oxford University Press, 2009).

⁵ Ginting Jamin, *Hukum Perseroan Terbatas* (UU No. 40 Tahun 2007) (Bandung: PT

meskipun perusahaan telah melaksanakan kewajiban CSR sebagai insentif untuk peningkatan taraf hidup masyarakat di lingkaran tambang, keberhasilannya masih diperdebatkan. Kebanyakan program CSR memprioritaskan proyek infrastruktur yang umumnya tidak menyentuh kepentingan kelompok masyarakat yang paling rentan.⁶

Salah satu isu krusial dalam penerapan CSR di Indonesia adalah relasi antara perusahaan dengan penduduk asli relatif lebih konfrontatif ketimbang kompromistis. Penduduk asli seringkali terlibat pertentangan tajam dengan perusahaan, bahkan banyak diantaranya berujung dengan tindakan kekerasan yang merugikan keduanya. Perusahaan seperti PT Freeport, PT Newmont, Kaltim Prima Coal (Bumi Resource) serta perusahaan lainnya telah mengalami pasang surut hubungan dengan masyarakat lokal kaitannya dengan isu CSR. Wilayah pertambangan yang dihuni oleh masyarakat yang multikultur seperti PT Vale Indonesia menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Dalam melaksanakan program CSR perusahaan sangat hati-hati agar isu etnisitas, agama dan politik tertangani dengan baik sehingga program CSR menjadi medium perekat dan mitigasi potensi konflik komunal.

Tulisan ini akan menelusuri bagaimana model, pendekatan CSR yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia yang sampai saat ini relatif berhasil menjaga hubungan baik dengan masyarakat di lingkaran tambang sehingga izin sosial beroperasi (*social license to operate*) dapat diperoleh dan dipertahankan dengan baik. PT Vale adalah perusahaan tambak nikel terbesar di Indonesia yang merupakan subsidiari dari Vale Brazil. Perusahaan ini awalnya dimiliki oleh Inco Limited, Canada yang untuk pertama kalinya beroperasi di Indonesia setelah Kontrak Karyanya (KK) di tandatangani pada tahun 1967. Selama beroperasi, perusahaan ini mengalami pasang surut relasi dengan masyarakat lokal seiring dengan perubahan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mengikuti perkembangan zaman. Dari tahun 1967-1998, perusahaan memilih pendekatan dari atas ke bawah (*bottom up*) dalam melancarkan operasi bisnisnya baik dari aspek pemerintahan (*government license*) maupun dari hubungan kemasyarakatan (*social license*).

Terdapat beberapa hal yang membuat penulis tertarik menganalisis bagaimana tata kelola CSR PT Vale dalam meredam konflik sosial di lingkaran tambangnya. Pertama, sejak penandatanganan KK tahap I perusahaan sudah berhadapan-hadapan dengan masyarakat perih

Citra Aditya Bakti, 2007), 94.

⁶ M. Welker, *Enacting the Corporation. An American Mining Firm in Post-Authoritarian Indonesia* (Berkeley: University of California Press, 2014).

klaim suku karunsi'e yang menganggap tanah ulayatnya dicaplok oleh perusahaan. Suku karunsi'e adalah penduduk asli yang terusir dari tanah ulayatnya ketika terjadi pemberontakan DI-TII Kahar Muzakkar di Suawesi-Selatan tahun 1950-an. Klaim suku Karunsi'e sampai artikel ini ditulis belum menemukan penyelesaian yang diterima semua pihak, tetapi izin beroperasi perusahaan dari komunitas tidak mengalami gangguan. Kedua, Wilayah lingkar tambang PT Vale Indonesia di samping sangat luas (empat kecamatan), juga dihuni oleh berbagai macam suku, agama dan aliran kepercayaan. Meskipun beberapa kali wilayah operasionalnya terancam konflik antara suku, atas kerjasama yang baik dengan semua pihak, konflik-konflik itu dapat teratasi dengan baik. Ketiga, pelaksanaan program-program CSR perusahaan baru dilaksanakan setelah reformasi 1998. Itu pun melalui demonstrasi besar-besaran dan diwarnai drama penyanderaan eksekutif perusahaan oleh sekelompok masyarakat yang terhimpun ke dalam organisasi Kerukunan Warga Asli (KWAS). Keempat, meski sering terjadi demonstrasi dari masyarakat terhadap perusahaan, tidak banyak demonstrasi yang berdampak terhadap bisnis perusahaan. Alasan-alasan inilah yang membuat penulis ingin mendalami lebih jauh keunikan pelaksanaan CSR PT Vale yang sampai saat ini mampu mengamankan izin sosial beroperasi dari masyarakat di lingkar tambang.

B. Tinjauan Pustaka

CSR memiliki banyak pengertian yang berbeda-beda. Bowen mendefinisikan CSR sebagai: *"the obligation of businessman to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action that are desirable in terms of objectives and values of our society."*⁷ Bowen secara implisit menegaskan bahwa CSR adalah kewajiban pengusaha untuk membuat kebijakan, keputusan atau tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.⁸ Carroll⁹ berpendapat bahwa CSR memiliki cakupan luas melampaui isu ekonomi, hukum, etika dan harapan-harapan yang masyarakat miliki terhadap perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Pendekatan ini meliputi keseluruhan tanggung jawab sebuah perusahaan. CSR dengan demikian diartikan sebagai cara perusahaan mengelola operasi bisnisnya sehingga berdampak positif terhadap masyarakat.¹⁰

⁷ Howard R. Bowen, *Social Responsibilities of the Businessman* (New York: Harper and Row, 1953).

⁸ Ibid.

⁹ Archie B. Carroll, "A three-dimensional conceptual model of corporate performance," *Academy of management review* 4, no. 4 (1979): 497-505.

¹⁰ Rosley Anholon et al., "Assessing Corporate Social Responsibility Concepts

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), CSR adalah komitmen berkelanjutan dunia bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi komunitas lokal serta masyarakat luas, pada saat yang bersamaan meningkatkan kesejahteraan para karyawan dan keluarganya.¹¹ Untuk keperluan klasifikasi yang layak, penulis menyusun hipotesis yang paling relevan tentang pendekatan atau teori CSR yang fokus kajiannya mengikuti salah satu realitas sosial: ekonomi, politik, integrasi sosial dan etik. Inspirasi dari hipotesis ini didasari oleh empat hal yang menurut Parsons dapat diamati di hampir semua sistem sosial: adaptasi terhadap lingkungan (sumber daya alam dan ekonomi), pencapaian tujuan kaitannya dengan politik, integrasi sosial dan pemeliharaan pola (*pattern maintenance*) atau latensi yang berkaitan dengan nilai-nilai dan kebudayaan.¹² Rumusan Parsons ini biasa juga dikenal dengan konsep AGIL (*adaptation, goal attainment, integration and latency*).

B.1. Evolusi konsep CSR

Menurut Visser, terdapat lima periode terjadinya evolusi CSR yang secara ekonomi saling tumpang tindih: masa keserakahan (*greed*), filantropi, pemasaran, manajemen dan responsibiliti. Masing-masing dari periode tersebut mewujudkan tahapan CSR kedalam tahapan yang berbeda: defensif, karitatif, promosional, strategis dan transformatif.¹³ Pertama (1) adalah periode keserakahan. Pada tahapan ini CSR dilakukan secara defensif. Keseluruhan praktik CSR berlangsung sangat terbatas – hanya dilakukan pada saat – atau dapat memperlihatkan bahwa terdapat keuntungan bagi pemegang saham. Kedua (2) CSR karitatif di tahapan filantropis dimana perusahaan melaksanakan berbagai macam program sosial dan donasi terhadap masalah penanggulangan dampak lingkungan dan bantuan sponsorsip. Ketiga (3) promosi CSR dalam bingkai pemasaran. Pada tahapan ini program CSR dilihat semata sebagai peluang pencitraan (*branding*) dan arena untuk memperoleh nama baik perusahaan di mata publik (*public relations*). Keempat (4) CSR sebagai instrumen

Used by a Brazilian Manufacturer of Airplanes: a case study at Embraer," *Journal of Cleaner Production* 135, no. 1 (November 2016): 740–49.

¹¹ Richard Holme dan Philip Watts, *Corporate social responsibility: making good business sense* (Conches-Geneva, Switzerland: World Business Council for Sustainable Development, 2000).

¹² T. Parsons, "An Outline of the Social System," in *Theories of Society*, ed. oleh T. Parsons et al. (New York: Free Press, 1961).

¹³ Wayne Visser, "The Ages and Stages of CSR: From Defensive to Systematic Corporate Sustainability and Responsibility," *CSR International Inspiration Series*, no. 8 (2010).

strategis dalam bingkai manajemen. Pada tahapan ini keseluruhan program CSR dikaitkan dengan bisnis utama dari perusahaan. Kelima (5) CSR yang transformatif. Pada tahapan ini keseluruhan aktifitas CSR difokuskan untuk mengidentifikasi dan menanggulangi akar masalah dari persoalan yang selama ini dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak berkelanjutan. Biasanya program diarahkan untuk menemukan model bisnis, merevolusi prosesnya, peningkatan kualitas produk dan pelayanan serta lobi intensif untuk memperoleh dukungan kebijakan yang progresif di level nasional dan internasional. Dalam tahapan ini CSR difokuskan di tingkatan mikro melalui dukungan terhadap isu sosial dan lingkungan dan mensinergikan dengan strategi perusahaan. CSR transformatif berfokus pada pemahaman atas keterkaitan sistem di level makro dengan masyarakat dan ekosistemnya serta menyesuaikan strategi untuk memaksimalkan dampak yang lebih besar terhadap manusia dan sistem ekologisnya.¹⁴

Tabel 1: The Ages and Stages of CSR¹⁵

Business Age	Stage of CSR	Modus Operandi	Key Enabler	Stakeholder target
Greed	Defensive	Ad hoc interventions	Investments	Shareholders, government and employee
Philantropy	Charitable	Community programmes	Projects	Community
Marketing Management	Promotional Strategic	Public relations Management system	Media Codes	General public Shareholders, NGOs/CSOs
Responsibility	Transformative	Business models	Products	Regulator & customers

B.2. Model CSR

Caroll memaparkan perbedaan di antara berbagai bentuk pertanggungjawaban organisasi. Perbedaannya dapat dilihat pada gambar berikut.¹⁶

¹⁴ Reza Safarzad, Ehsan Farahnaki, dan Mohamad Farahbakhsh, "Corporate Social Responsibility, Theories and Models," *Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology* 5, no. 1 (2017): 38–44.

¹⁵ Visser, "The Ages and Stages of CSR: From Defensive to Systematic Corporate Sustainability and Responsibility."

¹⁶ Archie B. Carroll, "The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders," *Business horizons* 34, no. 4 (1991): 39–48.



Gambar 1. Piramida CSR Carroll (1991)¹⁷

Piramida Carroll menggambarkan hirarki pertanggungjawaban dari ekonomi ke hukum melalui orientasi yang lebih sosial dari tanggung jawab etik dan filantropis. Carroll menegaskan bahwa institusi bisnis merupakan unit dasar ekonomi di masyarakat yang karena sifat dasarnya memiliki tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab paling mendasar dari korporasi, yang mencerminkan sifat dasarnya sebagai organisasi yang mencari keuntungan. Tanggung jawab ekonomi ini menegaskan bahwa masyarakat berharap dunia usaha menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan dan mendapatkan keuntungan darinya sebagai insentif atau imbalan terhadap efisiensi dan efektivitas usaha. Tanggung jawab hukum mensyaratkan kepatuhan hukum dan bermain berdasarkan aturan main yang berlaku. Dari perspektif ini, masyarakat mengharapkan korporasi mencapai misi ekonominya di dalam kerangka sistem hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁸

B.3. Teori integratif

Teori ini melihat bagaimana bisnis terintegrasi dengan tuntutan sosial dengan argumen dasar bahwa bisnis tergantung pada masyarakat

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Mohamed A. Omran dan Ramdhony D., "Theoretical Perspective on Corporate Social Responsibility Disclosure," *A Critical Review International Journal of Accounting and Financial Reporting* 5, no. 2 (2015).

agar tetap eksis, tumbuh dan berkelanjutan. Tuntutan sosial secara umum dianggap sebagai jalan dimana masyarakat berinteraksi dengan dunia usaha dan memberinya prestise dan legitimasi tertentu. Sebagai konsekuensinya, manajemen korporasi harus memperhatikan tuntutan sosial dan mengintegrasikannya sedemikian rupa sehingga usaha berjalan sesuai dengan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, muatan tanggung jawab dunia usaha dibatasi oleh ruang dan waktu dimana setiap situasi tergantung dari nilai-nilai yang dianut masyarakat saat itu.¹⁹ Dengan kata lain, tidak terdapat langkah-langkah spesifik yang harus diambil manajemen dunia usaha di sepanjang waktu dan di setiap industri. Pada dasarnya, teori ini terfokus pada deteksi dan pelacakan terhadap tuntutan sosial dalam upaya mencapai legitimasi, prestise dan penerimaan sosial yang lebih besar.²⁰

C. Metodologi

Tulisan ini menggunakan metode review berbagai literatur dan telaah kritis baik jurnal maupun buku-buku yang relevan dengan kajian CSR. Penulis tidak menjelaskan masing-masing teori dan model CSR secara detail, meski pada akhirnya akan menjadikan teori yang direview sebagai dasar untuk mendiskusikan dan menganalisis temuan tentang implementasi CSR PT Vale Indonesia.

D. CSR PT. Vale Indonesia

Berdirinya PT. Vale Indonesia (PT Vale) sebagai raksasa tambang nikel dunia diawali dengan keberadaan pendahulunya, PT International Nickel Indonesia, Tbk (PT Inco). Secara garis besar, keberadaan perusahaan ini terdiri beberapa periode (lihat tabel 2).

Dasar hukum beroperasinya PT. Inco, Tbk adalah Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Juli 1968 di lahan seluas 6,6 juta hektar yang mencakup beberapa wilayah di provinsi Sulawesi Selatan, Tengah dan Tenggara. Dari total luasan itu – sampai tahun 1979 – perusahaan secara bertahap mengembalikan sebagian wilayah itu kepada pemerintah. Luas wilayah KK hingga akhir

¹⁹ Lee E. Preston dan James E. Post, *Private Management and Public Policy: Principle of Public Responsibility*, The Prentice-Hall series in economic institutions & social systems (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1975).

²⁰ Garriga Elisabeth dan Mele Domènec, "Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory," *Journal of Business Ethics* 53 (2004): 51-57.

2012 menciut diangka 190.510 hektar, dengan cakupan terbesar di wilayah tambang Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, seluas 118.387,4 hektar. Dari luasan tersebut, 72.437 hektar merupakan kawasan hutan lindung dan 2.139,8 hektar adalah kawasan hutan konservasi. Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No.41/2004 Tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan, perusahaan dapat meneruskan kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung hingga akhir masa KK (Sustainability Report, Vale, 2012).

Tabel 2: Periode dan peristiwa penting PT Vale Indonesia.²¹

Periode	Tahapan/peristiwa
1968-1973	Eksplorasi dan studi kelayakan
1973-1978	Pembangunan fasilitas pertambangan dan pabrik produksi
1978-1986	Masa produksi dengan kerugian
1987-2004	Produksi dengan keuntungan dan perluasan
2005-2006	Periode transisi dari PT Inco ke PT Vale
2006-Sekarang	Periode PT Vale – keuntungan berkelanjutan

Lokasi atau kawasan terdampak operasi atau wilayah pemberdayaan PTVI berada di kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan kesepakatan Kontrak Karya, PTVI telah menetapkan lokasi atau wilayah pemberdayaan yang meliputi empat kecamatan yaitu: Kecamatan Towuti, Kecamatan Malili, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Nuha.

Tabel 3. Luas wilayah terdampak operasi PTVI²²

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas (km²)
1.	Malili	17	921,20
2.	Nuha	6	808,27
3.	Towuti	16	1,820,46
4.	Wasuponda	6	1,244,00

²¹ M. Dahlan Abubakar, Asdar Muis RMS, dan Joko Susilo, *Inco Mengalir di Tengah Gejolak Pertambangan* (Yogyakarta: Jalasutra, 2007). Sawedi Muhammad, *Gelombang Perlawanan di Tepian Matano, Resistensi Masyarakat Sorowako Terhadap PT Inco* (Makassar: Innawa, 2017).

²² PT Vale Indonesia Tbk, *Rencana Pengelolaan Sosial Program Terpadu Pengembangan Masyarakat 2013-2017*, 2013.

Dilihat dari segi keberagaman etnisitas dan keyakinan bergama, wilayah terdampak operasi perusahaan memiliki keunikan tersendiri karena begitu banyak suku bangsa dan pemeluk agama yang berdomisili di wilayah ini. Penduduk asli wilayah di sekitar pertambangan adalah berasal dari rumpun suku Mori dari Sulawesi Tengah. Dalam salah satu dokumen komunitas Pado'e, Karunsi'e dan Tambe'e, adalah empat anak suku yang meninggalkan suku Mori yaitu To Molioa/Dodoe, To Ulu-Uwoi, To Watu dan To Ngusu Mbatu/Tinompo.²³ Seiring dengan massifnya migrasi dan mobilisasi penduduk setelah perusahaan beroperasi di awal tahun 70an, pembauran lintas etnis dan agama terjadi begitu intens yang menyebabkan wilayah terdampak operasi perusahaan menjadi masyarakat yang heterogen.

Tabel 4. Jumlah Pemeluk Agama Menurut Kecamatan²⁴

Kecamatan	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Lainnya	Jumlah
Malili	36,581	197	2,205	512	0	0	39,495
Towuti	23,902	1,037	6,363	110	0	1	31,413
Nuha	18,377	489	3,782	116	4	0	22,768
Wasuponda	12,984	1,255	7,089	25	1	2	21,356
Jumlah	91,844	2,978	19,439	763	5	3	115,032

D.1. Model dan Pendekatan CSR PT Vale Indonesia (PTVI)

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penambangan dan pengolahan biji nikel terbesar di Indonesia, PTVI berkewajiban melaksanakan program-program CSR sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Perusahaan berkomitmen dalam membangun perekonomian daerah melalui berbagai fasilitas pendanaan dan dukungan program terhadap pemerintah daerah untuk mengembangkan masyarakat di empat wilayah kecamatan terdampak operasi langsung, yaitu: Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Towuti dan Kecamatan Malili. Secara khusus, PTVI mendukung program sektor utama, yaitu: pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur perdesaan. Pada tahun 2012 keempat sektor tersebut telah dialokasikan dana: Sektor Pendidikan Rp. 12,7 miliar, atau sekitar 25 persen, Sektor Kesehatan sebesar Rp. 12,7 miliar atau sekitar 25 persen, Sektor Perikanan

²³ Muhammad, *Gelombang Perlawanan di Tepian Matano, Resistensi Masyarakat Sorowako Terhadap PT Inco*.

²⁴ PT Vale Indonesia Tbk, *Rencana Pengelolaan Sosial Program Terpadu Pengembangan Masyarakat 2013-2017*.

dan Pertanian sebesar Rp. 18,2 miliar atau sekitar 35 persen, dan sisanya untuk program infrastruktur.

Besarnya alokasi dana tersebut membutuhkan perencanaan yang matang dan pemantauan dari berbagai pihak agar memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengukur efektivitas dukungan PTVI terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka PTVI telah melakukan pemetaan awal terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan serangkaian kajian (assessment) yang dilakukan oleh tim Universitas Negeri Makassar tentang pemetaan pendidikan serta A+ CSR Indonesia tentang *stakeholder mapping* dan *community need assessment* (CNA).

Program CSR PTVI dikemas dalam bentuk Program Mitra Desa Mandiri (PMDM). Tujuan programnya adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin dan kelompok rentan di wilayah terdampak operasi PTVI. Secara operasional, PMDM menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui prinsip-prinsip partisipatif, kemandirian, akuntabilitas, keterpaduan, dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan. Program ini dibangun melalui proses pemberdayaan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Prinsip-prinsip pelaksanaan program PMDM adalah: *Pertama*, keberpihakan kepada masyarakat yang rentan dan miskin. Orientasi baik dalam proses dan pemanfaatan ditujukan bagi keluarga miskin, kelompok rentan dan anggota masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan akses ekonomi secara memadai. *Kedua*, keberpihakan kepada perempuan. PMDM mengutamakan keberpihakan terhadap perempuan terutama dari kalangan kelompok rentan dan miskin dengan memberikan akses atau kesempatan yang luas terhadap layanan kesehatan ibu dan anak serta kesejahteraan ekonomi rumah tangga. *Ketiga*, bertumpu pada pembangunan sumber daya manusia. PMDM memilih kegiatan bidang kesehatan dan ekonomi lebih diarahkan pada upaya mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan bukan berorientasi pada pembangunan fisik semata. *Keempat*, partisipasi. Program PMDM memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi termasuk kelompok yang selama ini belum mendapatkan pelayanan kesehatan dan ekonomi dalam setiap tahapan kegiatan. *Kelima*, akuntabilitas. Dalam setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dikelola secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat atau kepada pihak lain yang berkepentingan baik secara moral,

teknis, administratif dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang disepakati bersama oleh masyarakat, pemerintah daerah dan PTVI. *Keenam*, Transparansi. Masyarakat memiliki akses terhadap seluruh informasi dan pengambilan keputusan terkait program PMDM. Seluruh kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas. Masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang berdomisili di desa dan kecamatan mengetahui dan memahami dan berperan dalam mekanisme pelaksanaan PMDM.

Dalam melaksanakan kegiatan CSR, PTVI menegaskan aturan main mengenai jenis kegiatan yang dilarang (*negative lists*). Tujuannya adalah agar CSR dapat memberi kontribusi maksimal terhadap terciptanya transformasi kualitas sumber daya manusia dan bermanfaat dalam memitigasi potensi konflik sosial di lingkar tambang yang dihuni oleh masyarakat yang multi-kultur. Berikut beberapa jenis kegiatan yang tidak boleh dibiayai melalui program CSR: (1) Pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan politik praktis/partai politik dan militer/angkatan bersenjata, (2) Pembangunan atau rehabilitasi bangunan rumah tinggal, kantor pemerintah dan tempat ibadah, (3) Pembelian barang atau bahan yang dapat merusak lingkungan seperti senjata, bahan peledak, asbestos, pestisida, dan obat-obatan terlarang, (4) Pembiayaan gaji atau honorarium bagi pegawai negeri sipil (ASN) dan karyawan PTVI, (5) Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak di bawah usia kerja, (6) Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan dan penjualan barang terlarang, (7) Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas yang telah ditetapkan sebagai cagar alam atau kawasan lindung, kecuali ada ijin tertulis dari instansi terkait, (8) Kegiatan pengolahan tambang, (9) Pengambilan dan penggunaan terumbu karang dan biota yang dilindungi, (10) Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur alur sungai dan (11) Pembangunan jaringan irigasi baru yang lebih dari 50 Ha (PT. Vale Indonesia, 2013).

E. Dampak CSR PTVI

Melalui prinsip keberpihakan kepada masyarakat miskin dan rentan, keberpihakan pada perempuan, bertumpu pada pembangunan sumber daya, partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan kemandirian, PTVI berhasil melaksanakan program-program CSR secara berkelanjutan. Pada tahun 2015, sebanyak 43.295 orang menerima manfaat dari program ini, dengan biaya total untuk kesehatan Rp. 4.150.000.000. Biaya lainnya yaitu untuk bidang ekonomi sebesar Rp. 5.810.000.000, bidang pendidikan

Rp. 3.320.000.000, serta bidang pengembangan kapasitas masyarakat sebesar Rp. 3.320.000.000. Selain itu, PTVI juga memberikan pelatihan *life skill* pertanian, kewirausahaan dan administrasi kepada 4.159 orang.

Meski begitu banyak program yang telah diinvestasikan perusahaan melalui PMDM, masih saja terdapat keluhan masyarakat terkait keberadaan perusahaan.

Tabel 5. Keluhan masyarakat dan Resolusinya (Sustainability Report PTVI, 2015).

No.	Bentuk keluhan	Pelapor	Penyelesaian
1.	Penerimaan karyawan	LSM dan Forum Lokal	Mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja kabupaten
2.	Penerimaan karyawan melalui outsourcing HCOG	LSM dan Forum Lokal	Transparansi melalui Pelibatan Forum Pemuda dalam pengawasan
3.	Lahan tergenang di pesisir Danau Towuti	Masyarakat Towuti	Mediasi oleh pemerintah kabupaten
4.	Proses perubahan program Community Development	Forum masyarakat, LSM	Penguatan sosialisasi dan pembentukan komite desa
5.	Penguasaan lahan konsesi perusahaan oleh masyarakat petani lada	Forum masyarakat, LSM	Penyelesaian melalui jalur hukum

F. CSR dan Izin Sosial Beroperasi

Pelaksanaan CSR perusahaan yang massif tetapi terstruktur dan terencana dengan baik terbukti menjadi penangkal terjadinya konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal. Meski sering terjadi demonstrasi masyarakat atas kebijakan-kebijakan perusahaan yang dianggap merugikan mereka, konflik tersebut tidak sampai mengancam kelangsungan perusahaan dalam menjalankan operasinya. Demikian pula potensi konflik horizontal diantara berbagai macam etnis, agama baik karyawan maupun warga lokal, kerukunan ummat beragama dan komunikasi diantara berbagai macam elemen masyarakat berlangsung sangat kondusif. Hal ini merupakan implikasi langsung dari kebijakan CSR perusahaan yang tidak memberikan bantuan khusus terhadap kegiatan-kegiatan yang berbau keagamaan, atau memberikan keistimewaan terhadap suku tertentu. Salah satu program yang terbukti paling efektif meredam konflik adalah dibentuknya forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) atas fasilitasi dari perusahaan. Forum terbentuk di tahun 2005 atas inisiatif dari perusahaan yang anggotanya berasal dari tokoh-tokoh agama yang ada di kabupaten Luwu Timur. Tokoh-tokoh

agama ini melakukan kegiatan rutin berupa dialog bulanan, pelatihan-pelatihan resolusi konflik, studi banding di berbagai wilayah di Indonesia, serta saling kunjungan di saat perayaan hari-hari besar keagamaan. Dengan demikian, keakraban terjalin diantara tokoh-tokoh agama yang memudahkan mereka saling berkomunikasi secara instan dalam kondisi apa pun.

G. Kesimpulan

Pelaksanaan CSR PTVI telah mengikuti kaidah-kaidah yang memenuhi prinsip transparansi dan keterbukaan. Manajemen CSR PTVI sangat relevan dengan konsepsi Visser (2010), yaitu CSR yang transformatif. Pada tahapan ini keseluruhan aktifitas CSR difokuskan untuk mengidentifikasi dan menanggulangi akar masalah dari persoalan yang selama ini dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak berkelanjutan. Sistem CSR PTVI secara terus menerus mengalami transformasi secara menyeluruh dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan terkait. Kerangka pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, telah menghasilkan perencanaan program 5 tahunan yang tertata dengan baik. Sistem monitoring dan evaluasi serta sanksi yang jelas bagi mereka yang melakukan pelanggaran juga sangat tegas diatur dalam buku panduan yang telah disosialisasikan ke segenap pemangku kepentingan.

Berdasarkan kondisi objektif tersebut, CSR PTVI telah memasuki tahapan filantropis sebagaimana yang ditegaskan oleh Carroll (1991). Evolusi pelaksanaan CSR PTVI perlahan merangkak dari tahapan mencapai target ekonomi (profit) kemudian patuh dan taat terhadap kewajiban-kewajiban hukum (*compliance*) dan terus bergerak melampaui aspek-aspek etika dalam berbisnis. Pada akhirnya, CSR PTVI mencapai tahapan filantropis-transformatif yang menurut Carroll (1991) dan juga Visser (2010) merupakan tahapan tertinggi dari implementasi CSR yang berkelanjutan. Model CSR seperti ini juga sejalan dengan konsepsi integratif dari Preston dan Post (1975) dimana perusahaan secara serius mengintegrasikan tuntutan sosial masyarakat dengan program-program pemberdayaan yang dilakukannya. Dengan demikian maka terciptalah pola interaksi dan komunikasi yang saling memahami dalam kerangka fungsional berkelanjutan sebagaimana yang dikemukakan oleh Parsons (1961). PTVI berhasil beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya melalui integrasi sosial-kultural dengan nilai-nilai dan filosofi perusahaan.

Daftar Pustaka

- Abubakar, M. Dahlan, Asdar Muis RMS, dan Joko Susilo. *Inco Mengalir di Tengah Gejolak Pertambangan*. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- Anholon, Rosley, Osvaldo Luiz Gonçalves Quelhas, Walter Leal Filho, Jefferson deSouza Pinto, dan Alexander Fehe. "Assessing Corporate Social Responsibility Concepts Used by a Brazilian Manufacturer of Airplanes: a case study at Embraer." *Journal of Cleaner Production* 135, no. 1 (November 2016): 740-49.
- Bowen, Howard R. *Social Responsibilities of the Businessman*. New York: Harper and Row, 1953.
- Carroll, Archie B. "A three-dimensional conceptual model of corporate performance." *Academy of management review* 4, no. 4 (1979): 497-505.
- — —. "The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders." *Business horizons* 34, no. 4 (1991): 39-48.
- Colby, Michael Ellsworth. "Ecology, economics, and social systems: The evolution of the relationship between environmental management and development." University of Pennsylvania, 1990.
- Elisabeth, Garriga, dan Mele Domènec. "Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory." *Journal of Business Ethics* 53 (2004): 51-57.
- Großmann, Kristina, Martina Padmanabhan, dan Katharina von Braun. "Contested Development in Indonesia: Rethinking Ethnicity and Gender in Mining." *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, no. 1 (2017): 11-28.
- Holme, Richard, dan Philip Watts. *Corporate social responsibility: making good business sense*. Conches-Geneva, Switzerland: World Business Council for Sustainable Development, 2000.
- Jamin, Ginting. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Kates, Robert W., Thomas M. Parris, dan Anthony A. Leiserowitz. "What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice." *Environment: Science and Policy for Sustainable Development* 47, no. 3 (April 2005): 8-21. doi:10.1080/00139157.2005.10524444.
- Muhammad, Sawedi. *Gelombang Perlawanan di Tepian Matano, Resistensi Masyarakat Sorowako Terhadap PT Inco*. Makassar: Inninawa, 2017.

- Omran, Mohamed A., dan Ramdhony D. "Theoretical Perspective on Corporate Social Responsibility Disclosure." *A Critical Review International Journal of Accounting and Financial Reporting* 5, no. 2 (2015).
- Parsons, T. "An Outline of the Social System." In *Theories of Society*, diedit oleh T. Parsons, E.A. Shils, K.D. Naegle, dan J.R. Pitts. New York: Free Press, 1961.
- Preston, Lee E., dan James E. Post. *Private Management and Public Policy: Principle of Public Responsibility*. The Prentice-Hall series in economic institutions & social systems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1975.
- PT Vale Indonesia Tbk. *Rencana Pengelolaan Sosial Program Terpadu Pengembangan Masyarakat 2013-2017*, 2013.
- — —. *Panduan Teknis Operasional Program Mitra Desa Mandiri Kesehatan dan Ekonomi*. Tim Koordinasi Program Terpadu Pengembangan Masyarakat kabupaten Luwu Timur, 2013.
- Sachs, Jeffrey D., dan Andrew M. Warner. "Natural Resources and Economic Development, The Curse of Natural Resources." *European Economic Review* 45 (2001): 827–38.
- Safar zad, Reza, Ehsan Farahnaki, dan Mohamad Farahbakhsh. "Corporate Social Responsibility, Theories and Models." *Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology* 5, no. 1 (2017): 38–44.
- Visser, Wayne. "The Ages and Stages of CSR: From Defensive to Systematic Corporate Sustainability and Responsibility." *CSR International Inspiration Series*, no. 8 (2010).
- Welker, M. *Enacting the Corporation. An American Mining Firm in Post-Authoritarian Indonesia*. Berkeley: University of California Press, 2014.
- World Commission on Environment and Development (WCED). *Our Common Future (OCF)*. Reprinted. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Kebijakan Strategis Mitigasi Ancaman Peredaran Orbit Satelit terhadap Keamanan Nasional: Pendekatan *Analytical Hierarchy Process*

Herdis Herdiansyah

Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia

Email: herdis@ui.ac.id

Abstract

The threat of circulating space orbit is considered by some to be a threat to the national security of one country, because the potential dangers such as space junk produce significant damage to affected areas. But until now Indonesia, despite ratifying the UN convention on space, does not yet have a comprehensive mitigation strategy. This study aims to create policy scenarios in mitigating the threat of satellite orbit circulation so that it can be used as an alternative policy formulation for relevant institutions. The research method is carried out with a mix method approach that is adjusted to each research objective such as using literature study and AHP analysis. AHP analysis shows that respondents want international cooperation to be built, both bilateral and multilateral cooperation must prioritize national security while upholding the values of friendship and mutual respect. Comprehensive space debris mitigation policies need to be formulated and defined as the basis for action. Considering that the impact of space debris is very dangerous and massive, the use of space technology is a necessity to be used to anticipate, deal quickly and minimize the impact of the disaster.

Keywords: AHP; Mitigation; National Security; Space Debris;
Strategic Policy

Abstrak

Ancaman peredaran orbit antariksa ini bagi beberapa kalangan dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional satu negara, karena potensi bahaya yang ditimbulkannya seperti sampah antariksa yang menghasilkan kerusakan signifikan bagi wilayah terdampak. Namun sampai sekarang, meskipun sudah meratifikasi konvensi PBB tentang antariksa, Indonesia belum memiliki strategi mitigasi yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk membuat strategi kebijakan dalam mitigasi ancaman peredaran orbit satelit, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif penyusunan kebijakan bagi lembaga terkait. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan mix method yang disesuaikan dengan setiap tujuan

penelitian, seperti mempergunakan studi pustaka dan analisis AHP. Analisis AHP menunjukkan hasil bahwa responden menginginkan kerjasama Internasional yang dibangun, baik kerjasama bilateral maupun multilateral harus mengedepankan keamanan nasional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan dan saling menghargai. Kebijakan mitigasi sampah antariksa yang komprehensif perlu dirumuskan dan ditetapkan yang menjadi dasar untuk bertindak. Mengingat dampak sampah antariksa sangat berbahaya dan masif, pemanfaatan teknologi antariksa menjadi sebuah keharusan untuk digunakan bagi antisipasi, penanganan cepat dan meminimalkan dampak bencana tersebut.

Kata kunci: AHP; Keamanan nasional; Mitigasi; Sampah Antariksa; Kebijakan Strategis

Pendahuluan

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyepakati bahwa ruang angkasa merupakan wilayah yang bebas dari kepemilikan sebuah negara atau biasa disebut *common space*. Hal ini berdampak pada kebebasan eksplorasi termasuk di dalamnya pengorbitan satelit. Saat ini, banyaknya satelit yang beredar di antariksa menjadi ancaman bagi negara-negara yang terutama berada di garis edar satelit, terutama di wilayah garis khatulistiwa. Ancaman peredaran orbit antariksa ini bagi beberapa kalangan dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional satu negara, karena potensi bahaya yang ditimbulkannya, seperti sampah antariksa menghasilkan kerusakan signifikan bagi wilayah terdampak¹. Rata-rata satelit yang beredar di orbit digerakkan oleh tenaga nuklir, karena masa aktif satelit menggunakan nuklir lebih lama daripada dengan sumber energi lain. Sampah antariksa yang menggunakan sumber daya nuklir sebagai bahan bakar atau sebagai sumber tenaga dan bagian komponen dalam suatu benda antariksa, merupakan ancaman yang sangat serius.

Hingga akhir Maret 2004 diperkirakan jumlah benda antariksa yang dapat terdeteksi sebanyak 9,236 dan jumlahnya meningkat tajam sampai 2018 ini. Dari jumlah tersebut, terdapat 2.988 berupa satelit, baik yang aktif maupun tidak aktif. Selebihnya adalah sampah, yang berupa badan roket atau pecahan satelit atau roket². Namun jumlah ini belum meliputi

¹ Joseph S. Imburgia, "Space debris and its threat to national security: a proposal for a binding international agreement to clean up the junk," *Vand. J. Transnat'l L* 44 (2011): 589.

² Thomas Djamaluddin, "Kondisi lingkungan antariksa di wilayah orbit satelit," *Berita Dirgantara* 7, no. 2 (2010): 41.

jumlah pecahan dengan ukuran yang kecil yang tidak dapat terjangkau oleh pemantauan radar. Diperkirakan jumlah pecahan kecil ini mencapai puluhan juta. Sepanjang Desember 2008 hingga Oktober 2012, populasi sampah antariksa bertambah 2,7 sampah setiap hari dengan jumlah sampah yang jatuh rata-rata hanya 1,1 setiap hari. Hal ini disebabkan besarnya persentase sampah Fengyun 1C, Cosmos 2251, dan Iridium 33 yang masih mengorbit³.

Sampah antariksa yang tersebar di angkasa dapat menyebabkan bencana, yang akan merugikan masyarakat pada umumnya. Salah satu bentuk bencana karena sampah antariksa ialah peristiwa jatuhnya sampah antariksa ke permukaan bumi seperti peristiwa terbenturnya Iridium 33 dan Cosmos 2251. Apabila serpihan dari peristiwa tersebut jatuh ke permukaan bumi khususnya permukiman, maka akan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Kasus tabrakan antara satelit komunikasi milik Amerika Serikat dengan satelit milik Rusia di wilayah Siberia, meskipun tidak mengakibatkan korban jiwa, namun membuat kabut abu di wilayah tersebut. Kasus lain yaitu terjadinya tabrakan satelit milik Ekuador dengan pecahan tangki bahan bakar roket milik Rusia.

Kemungkinan besar, kasus-kasus seperti ini akan kembali terulang dan berdampak lebih buruk dari sebelumnya, ditambah lagi dengan pengembangan bahan bakar satelit yang menggunakan nuklir. Hal ini tentunya menambah besar ancaman yang dapat ditimbulkan. Penggunaan nuklir sebagai bahan bakar satelit muncul, karena kondisi terbatasnya sumber daya alam sebagai sumber primer bahan bakar, sehingga kebutuhan akan diversifikasi energi untuk satelit lebih optimal menggunakan bahan bakar nuklir. Penggunaan nuklir yang dapat mencukupi masa aktif satelit, karena lebih lama dan efisien,⁴ sehingga diperkirakan penggunaan nuklir untuk satelit di masa yang akan datang akan semakin intensif⁵.

Dampak ancaman sampah antariksa maupun benda langit lainnya belum secara signifikan menimbulkan dampak yang nyata, namun potensi ancaman dan tingkat kerusakan yang merupakan bagian ancaman terhadap sistem keamanan nasional mengharuskan perlu ada strategi kebijakan untuk menghadapi potensi ancaman peredaran orbit.

³ Abdul Rachman Hakim, "Populasi Sampah Antariksa Menjelang Puncak Aktifitas Matahari Siklus 24 [Space Debris Population Toward The Peak Of Solar Cycle 24]," *Jurnal Sains Dirgantara* 10, no. 1 (2012): 66.

⁴ Imburgia, "Space debris and its threat to national security: a proposal for a binding international agreement to clean up the junk."

⁵ Sigit Kusmaryanto, "Orbit Satelit," *Sigit Kusmaryanto*, 1 Desember 2013, <http://sigitkus.lecture.ub.ac.id/?p=1691>.

Salah satu bentuk mitigasi terhadap ancaman sampah antariksa adalah bagaimana mitigasi guna menghindari benda satelit/sampah antariksa jatuh dan menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Meskipun dalam konteks dunia antariksa, mitigasi ancaman antariksa menjadi kewajiban semua negara, terutama negara yang memiliki satelit, namun untuk negara-negara yang berada di wilayah antariksa mitigasi ancaman harus dianggap lebih tinggi daripada negara di luar garis katulistiwa.

Apabila mengacu pada perundang-undangan yang ada, maka Undang-Undang Antariksa Nomor 21 Tahun 2013 menjadi landasan hukum pengembangan antariksa di Indonesia. Dalam pasal 51-57 yang mengatur keselamatan dan keamanan antariksa, lebih banyak berbicara tentang peluncuran satelit, dan pasal 58-70 berbicara tentang apa yang harus dilakukan bilamana terjadi kecelakaan antariksa. Dalam Pasal 1 Ayat 12 tentang keantariksaan, definisi keamanan dimaknai sebagai segala upaya dan komitmen secara internasional bagi setiap penyelenggara keantariksaan untuk memelihara dan/atau menjamin pemanfaatan antariksa dan benda-benda langit lainnya untuk maksud-maksud damai dan tidak menimbulkan kerusakan bagi lingkungan bumi dan antariksa melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. Sekalipun demikian, UU No. 21 tahun 2013 belum bicara strategi mitigasi terhadap potensi ancaman peredaran orbit satelit terhadap keamanan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang strategis dalam menghadapi ancaman peredaran orbit terhadap keamanan nasional. Penelitian ini membahas intervensi kebijakan yang dapat diaplikasikan guna mencegah kerusakan yang lebih besar. Penelitian ini juga berupaya secara teoritis menegaskan bahwa ancaman peredaran orbit tidak selalu dapat diselesaikan dengan pendekatan militer seperti , seperti penghancuran sampah antariksa dengan roket/peluru kendali, namun lebih menekankan kepada kerja sama kelembagaan antar negara dan mekanisme tanggung jawab negara pemilik sampah antariksa.

Teknologi komunikasi yang berkembang pesat, membuat negara-negara di dunia berlomba dalam mengembangkan satelit dan mengorbitkannya. Hal itu terjadi terlebih karena tidak ada regulasi yang membatasi jumlah pengorbitan satelit. Namun, perkembangan ini tidak diimbangi dengan pencegahan dampak yang dapat ditimbulkan. Penelitian yang dilakukan oleh Solomon, seorang ilmuwan di High Altitude Observatory yang mengkhususkan diri dalam fisika dan kimia dari atmosfer atas dan ionosfer,⁶ menunjukkan bahwa pemanasan akibat

⁶ Stanley C. Solomon, "Effects of Carbon Dioxide on the Upper Atmosphere," *McGraw-Hill Yearbook of Science and Technology* 107 (2008).

CO₂ di atmosfer menyebabkan pendinginan di atmosfer bagian atas. Akibat pendinginan di atmosfer atas akan menyebabkan kerapatan atmosfer menurun. Dampaknya adalah semakin banyak sampah satelit di orbit satelit. *Inter-Agency Space Debris Coordination Committee* (IADC) di dalam pedoman mitigasi sampah antariksa mendefinisikan sampah antariksa sebagai seluruh objek buatan manusia, termasuk pecahan dan elemen di orbit bumi atau yang memasuki atmosfer lagi yang sudah tidak berfungsi⁷.

Sampah antariksa (*space debris*) menimbulkan berbagai potensi ancaman bagi kehidupan manusia. Adapun potensi ancaman sampah antariksa sebagai berikut⁸:

1. Berpotensi menyebabkan tabrakan dengan pesawat ruang angkasa (*spacecraft*), maupun sampah antariksa lainnya.
2. Berpotensi menyebabkan kerusakan/ gagal fungsi pada pesawat ruang angkasa (*spacecraft*) atau satelit.
3. Berpotensi menaikkan jumlah sampah antariksa yang terdapat di orbit satelit, yang diakibatkan tabrakan dengan sampah antariksa.

Jika hal poin ketiga terjadi, maka akan tercipta siklus tiada henti dengan poin pertama dan kedua. Dimana ketiga poin di atas merupakan potensi ancaman yang terjadi di antariksa, apabila sampah antariksa yang ada tertarik atau masuk atmosfer bumi dan dapat bertahan, maka akan memunculkan potensi ancaman yang lain, khususnya yang memiliki bahan radioaktif atau beracun, yaitu berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan bumi, dan mengakibatkan hilangnya harta benda atau jiwa manusia.

Besarnya dampak dari sampah antariksa menjadi alasan utama untuk melakukan mitigasi terhadap sampah antariksa tersebut. Menurut *Inter-Agency Space Debris Coordination Committee* (IADC) mitigasi yang dilakukan terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu:⁹

- 1) Pasivasi, membersihkan semua energi yang tersimpan di pesawat antariksa atau *launch vehicle orbital stages* yang bertujuan mengurangi kemungkinan tabrakan. Tipikal perhitungan

⁷ *Inter-Agency Space Debris Coordination Committee, "IADC Observation Campaigns," 43rd Session of UNCOPUOS S&T SC, 2006.*

⁸ J-C Liou dan Nicholas L. Johnson, "Risks in space from orbiting debris," *Science* 311, no. 5759 (Januari 2006): 340.

⁹ *Inter-Agency Space Debris Coordination Committee, "IADC Observation Campaigns."*

pasivasi termasuk melepaskan atau pembakaran kelebihan bahan bakar, menghentikan penggunaan baterai dan menghilangkan tekanan kapal;

- 2) De-Orbit (Pengurangan/Penurunan Orbit), dimana dengan sengaja mengubah orbit untuk barang angkasa yang masuk kembali kedalam atmosfer bumi ataupun tahap orbit (*orbital stage*) untuk melenyapkan bencana karena hal tersebut, dengan menerapkan kekuatan perlambatan (*retarding force*) pada sistem pendorong;
- 3) Re-Orbit, dimana dengan sengaja mengubah orbit dari barang angkasa dan tahap orbit (*orbital stage*);
- 4) Pemisahan (*Break Up*), apapun yang umumnya berbentuk pecahan, yang mana dilepaskan didalam orbit bumi, dimana pecahan tersebut termasuk:
 - (a) ledakan yang disebabkan energi kimia atau energi panas dari bahan bakar, pembahkarn dan sejenisnya,
 - (b) pecah yang diakibatkan dengan kenaikan tekanan dalam,
 - (c) retak yang disebabkan oleh energi tabrakan dengan objek lain.

Namun perlu diwaspadai bahwa bagaimana pun, sebagian besar objek dalam ruang tidak terkendali, dan jalur orbitnya tidak dapat diubah. Ini berarti bahwa sebagian besar tabrakan potensial tidak dapat dihindari dengan menggunakan manuver mengelak¹⁰.

Perkembangan orbit satelit justru mengancam negara-negara yang mayoritas bukan pemilik satelit. Secara prinsip, keamanan nasional yang terkait dengan orbit satelit pada prinsipnya berupaya membahas bagaimana sebuah negara dapat menghadapi ancaman sampah satelit. Penelitian Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (LAPAN)¹¹ yang fokus mengkaji kerusakan yang diakibatkan oleh sampah antariksa terhadap satelit yang dimiliki oleh Indonesia dan juga potensi kerusakan akibat benda antariksa yang jatuh di wilayah Indonesia menghasilkan temuan, bahwa beberapa sampah antariksa yang jatuh di Indonesia semuanya milik negara luar seperti Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat dan tidak anda kompensasi apapun dari negera-negara pemilik sampah

¹⁰ Steven A. Hildreth dan Allison Arnold, "Threats to U.S. National Security Interests in Space: Orbital Debris Mitigation and Removal," *Current Politics and Economics of the United States, Canada and Mexico* 16, no. 4 (8 Januari 2014): 447.

¹¹ Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, *Penelitian Sampah Antariksa di LAPAN: Bidang Matahari dan Antariksa* (Jakarta: LAPAN, 2011), 12.

antariksa tersebut meskipun jatuh di wilayah Indonesia. Kompensasi tidak diberikan, salah satunya karena dampak yang ditimbulkan dari sampah antariksa masih dianggap “kerugian skala ringan”.

Penelitian Man, seorang peneliti yang terfokus pada hukum luar angkasa, menunjukkan bahwa perlu ada komitmen global dalam penanganan sampah satelit. Kondisi ini disebabkan sampai sekarang belum ada kesepakatan hukum antariksa yang mengatur bagaimana tata kelola antariksa. Man menyarankan perlu ada kompensasi yang diinisiasi oleh PBB yang dapat menekan negara pemilik sampah antariksa untuk “membayar” kompensasi sampah antariksa yang jatuh di negara lain¹².

Sampah antariksa, yang muncul akibat peningkatan jumlah satelit secara global yang cukup signifikan, membuat pemerintah dan industri terkait harus memperkirakan akan bahaya tabrakan di antara satelit. Sampah antariksa juga menimbulkan ancaman keamanan nasional. Adapun ancaman keamanan nasional yang antara lain:¹³

1. Negara akan kesulitan dalam memantau objek terbang atau objek lainnya, apabila orbit satelit yang ada merusak satelit.
2. Negara/ masyarakat tidak bisa berkomunikasi dengan aman, jika satelit komunikasi rusak.
3. Negara/ masyarakat akan hilangnya sistem navigasi dan data cuaca.

Apabila satu dari tiga poin di atas terjadi, maka negara akan rentan mengalami kejadian penyerangan, baik itu dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan demikian, menjaga jumlah/membersihkan sampah antariksa, merupakan hal yang penting untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.

Pendefinisian konsep keamanan nasional secara umum oleh Denik Iswardani Witarti, peneliti yang terfokus pada isu keamanan nasional dan diplomasi ini menjelaskan keamanan nasional sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi sebuah negara atau bangsa dengan menggunakan seluruh kemampuan yang ada baik dibidang ekonomi, politik, militer dan segala bentuk upaya-upaya diplomasi¹⁴. Sementara itu menurut Sayidiman Suryohadiprojo, di dalam buku “*Si Vis Pacem*

¹² Philip De Man, “The Removal of Inactive Satellites and the Role of the International Telecommunication Union in Space Debris Remediation,” Working Paper No. 104, 2013.

¹³ Imburgia, “Space debris and its threat to national security: a proposal for a binding international agreement to clean up the junk.”

¹⁴ Denik Iswardani Witarti dan Semmy Tyar Armandha, “Tinjauan Teoretis Konsep Pertahanan dan Keamanan di Era Globalisasi Industri Pertahanan,” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 5, no. 3 (2018): 103.

ParaBellum: Membangun Pertahanan Negara Yang Modern dan Efektif, sistem keamanan nasional merupakan suatu “sistem yang mewujudkan situasi dan kondisi kemampuan bangsa dalam melindungi semua sistem nasionalnya, yang didasarkan pada sistem nilai internalnya sendiri, terhadap setiap ancaman dan tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri”¹⁵.

Dalam penelitian ini, keamanan nasional dimaknai sebagai bagian dari *comprehensive security*, dimana keamanan harus dimaknai dalam pengertian yang menyeluruh baik yang mencakup ancaman militer ataupun non-militer. Oleh karena itu, penguatan sebuah keamanan nasional tidak menyoal kekuatan militer namun diperlukan kekuatan yang politis, ekonomi dan dipomatis¹⁶. Ancaman terhadap keamanan nasional diartikan sebagai tindakan atau fenomena yang secara drastis dan seketika mengancam hidup penduduk di sebuah negara. Selain itu, ancaman ini tidak memberi pilihan sebuah negara untuk mengambil sebuah keputusan secara bebas¹⁷. Dalam mencegah terjadinya ancaman, terutama dibidang antariksa, Indonesia memerlukan sebuah tindakan dari mulai merumuskan, memutuskan hingga melaksanakan¹⁸. Untuk itu diperlukan sebuah strategikebijakan yang efektif untuk dapat mendukung tindakan antisipatif tersebut. Tindakan-tindakan dilakukan atas dasar keamanan dan kepentingan nasional Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Yuniarti, peneliti ahli di Kementerian Komunikasi dan Informasi, tentang penanganan sampah antariksa di Indonesia, menggambarkan kekuatan dan kelemahan serta tantangan dan peluang kondisi penanganan sampah antariksa di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi ancaman sampah antariksa di Indonesia tergolong tinggi sehingga upaya pemerintah salah satunya perlu meratifikasi *Space Debris Mitigation Guideline* dari UNCOPUOS¹⁹. Dalam penelitian ini, permasalahan sampah antriksa menjadi sebuah ancaman kemandirian nasional bagi Indonesia, karena

¹⁵ Sayidiman Suryohadiprojo, *Si vis pacem para bellum: membangun pertahanan negara yang modern dan efektif* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 14.

¹⁶ Heru Susetyo, “Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia,” *Lex Jurnalica* 6, no. 1 (2008): 4.

¹⁷ Totok Sudjatmiko, “Keamanan Negara dalam Kegiatan Antariksa Nasional: Perspektif Realis Ofensif,” *Jurnal Global & Strategis* 9, no. 2 (2017): 212.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Diah Yuniarti, “Analisis SWOT Sampah Antariksa Indonesia,” *Buletin Pos dan Telekomunikasi* 11, no. 1 (2013): 16.

potensi wilayah Indonesia yang besar dalam menerima jatuhnya sampah antariksa. Seperti disebutkan sebelumnya, jatuhnya sampah antariksa membahayakan hidup penduduk disebuah negara, tidak terkecuali Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Studi pustaka dan wawancara mendalam dilakukan untuk menentukan kriteria. Studi literatur seperti teori dan penelitian yang telah ada sebelumnya, baik melalui media cetak maupun elektronik, dan terkait dengan relevansi penelitian digunakan dalam merekonstruksi secara teoritis dengan menggali dan mengumpulkan data sekunder yang relevan, penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tujuan penelitian, serta penjelasan teoritis dari studi pustaka. Sejumlah kasus dan kajian mengenai peredaran orbit dikumpulkan, seperti berita di media massa, laporan lembaga baik lembaga resmi negara dan lembaga swadaya masyarakat.

Metode AHP²⁰ dipakai untuk menentukan pilihan-pilihan rasional terbaik dengan tujuan spesifik. Proses inilah yang disebut dengan metode perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) untuk menganalisis prioritas elemen-elemen dalam hirarki. Prioritas ditentukan berdasarkan nilai yang diberikan oleh para responden yang dipilih yang merupakan para pemangku kepentingan dan memiliki andi dalam pengambilan keputusan. Sehingga pengambilan data dilakukan kepada expert yang juga terlibat dalam isu yang diangkat.

Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam isu peredaran orbit satelit terdiri dari pemerintah (lembaga-lembaga terkait), swasta pemakai satelit, LSM, akademisi, dan masyarakat pengguna satelit. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari *expert* untuk menjawab pertanyaan. Sampel penelitian dipilih secara *purposive* (ditentukan) dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kalangan pemerintah syaratnya lebih dari 5 tahun terlibat dalam isu peredaran orbit sebagai pemangku kebijakan (minimal eselon 4)
2. Kalangan Akademisi syaratnya lebih dari 10 tahun dengan rekam jejak tridharma pendidikan yang terkait.

²⁰ Thomas L Saaty, "Analytic hierarchy process," *Encyclopedia of operations research and management science*, 2013, 59.

3. Kalangan swasta syaratnya lebih dari 5 tahun terlibat dalam bisnis satelit atau yang mempergunakan satelit sebagai unit usahanya (termasuk penyewa satelit).
4. Kalangan LSM dan Masyarakat umum yang concern untuk isu antariksa dengan syarat keterlibatan minimal 5 tahun.

Pembahasan

Permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, dianalisis dengan menggunakan metode *AHP* (*Analytical Hierarchy Process*) dengan alat bantu *software expert choice*, karena data diolah dengan melakukan komparasi tiga level, dengan memasukkan bobot nilai. Adapun hirarki yang digunakan dalam penentuan prioritas pada kuisisioner *AHP* pada penelitian ini untuk menggambarkan prioritas dalam membentuk strategi dan kebijakan mitigasi ancaman peredaran orbit satelit terhadap keamanan nasional yaitu:

- a. Hirarki Pemantauan dan Pengawasan Sampah Antariksa
Ini merupakan kriteria yang sangat penting, mengingat bahaya yang dapat timbul akibat jatuhnya sampah antariksa ke bumi ataupun tabrakan sampah antariksa dengan satelit, khususnya bagi negara-negara yang berada di Khatulistiwa. Permasalahan sampah antariksa ini menimbulkan efek domino dimana dapat memicu kerusakan satelit lain karena tabrakan. Sehingga, memproduksi sampah antariksa lebih banyak lagi dan memicu efek seperti longsor “salju” antariksa.
- b. Hirarki Regulasi
Hirarki ini adalah salah satu kriteria penting mengingat dampak bahaya sampah antariksa sangat luas dan terkait dengan banyak negara. Regulasi ini juga penting untuk mengatur kewenangan setiap instansi dan kerjasama antar negara dalam penanganan mitigasi sampah antariksa.
- c. Hirarki Mekanisme Mitigasi Sampah Antariksa
Ini adalah kriteria penting mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh sampah antariksa sangat berbahaya dan massif. Setiap pihak yang terkait dalam mitigasi ini sangat perlu memahami mekanisme mitigasi sampah antariksa tersebut. Dalam konteks mitigasi ini termasuk pergantian atas kerugian yang mungkin timbul.

d. Hirarki Kelembagaan

Terpilihnya hirarki kelembagaan merupakan salah satu kriteria penting didasarkan pada fakta bahwa kewenangan dan koordinasi antar lembaga seringkali kurang optimal terlebih pada implementasi operasional di lapangan.

e. Hirarki Kerja sama Internasional

Hirarki kerja sama internasional sebagai salah satu kriteria penting untuk menghadapi dampak bahaya yang diakibatkan oleh sampah antariksa bisa dialami oleh banyak negara. Oleh karena itu kerja sama internasional sangat penting dan strategis. Kerja sama internasional yang ada saat ini dirasakan masih kurang memadai, sehingga perlu dimantapkan lagi sehingga penanganan mitigasi bencana sampah antariksa dapat lebih optimal.

Selain hirarki, penelitian ini dimaksudkan untuk menetapkan prioritas dari tiga pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan peran pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan kebijakan yang strategis mitigasi ancaman peredaran orbit satelit terhadap keamanan nasional sebagai berikut:

1. Pendekatan Keamanan Nasional

Pendekatan Keamanan merupakan sub kriteria yang sangat penting, mengingat dampak yang ditimbulkan dari bahaya ancaman sampah antariksa khususnya bagi negara-negara yang berada di garis peredaran orbit (khatulistiwa) termasuk Indonesia. Oleh karena itu setiap negara yang berada di garis peredaran orbit perlu memastikan bahwa kemungkinan dampak dari ancaman sampah antariksa seperti tabrakan sampah antariksa dengan satelit tidak mengganggu keamanan nasional negara tersebut.

2. Pendekatan Kebijakan Mitigasi Sampah Antariksa

Pendekatan ini dipandang sangat penting karena operasional dapat dilakukan secara optimal jika kebijakan terkait penanganan mitigasi sampah antariksa yang komprehensif dan implementatif.

3. Pendekatan Teknologi Antariksa

Pendekatan teknologi sebagai salah satu sub kriteria sangat tepat, mengingat untuk dapat melakukan penanganan mitigasi sampah antariksa maka pemanfaatan teknologi antariksa

dianggap sangat penting untuk meminimalkan dampak tersebut dan untuk langkah antisipasi.

Tujuan, hirarki dan alternatif atau pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya disusun dalam bagan hirarki strategi kebijakan mitigasi ancaman peredaran orbit satelit terhadap keamanan nasional seperti dalam Gambar 1.

Gambar 1. Hirarki Strategi Kebijakan Mitigasi Ancaman Peredaran Orbit Satelit terhadap Keamanan Nasional



Setelah kuisioner diisi lalu data disusun dalam bentuk matriks berpasangan. Matriks berpasangan antar kriteria untuk strategi kebijakan mitigasi ancaman peredaran orbit satelit terhadap keamanan disusun berdasarkan jawaban kuisioner dari responden.

Dari hasil pengolahan data jawaban responden (matriks berpasangan) dari *goal* (Strategi kebijakan mitigasi ancaman peredaran orbit satelit terhadap keamanan nasional) yang dapat dilihat pada Tabel 1. menunjukkan bahwa kriteria Pemantauan dan Pengawasan Sampah Antariksa memperoleh bobot prioritas (*eigen vector*) tertinggi yaitu 0,472, kemudian kriteria Regulasi sebesar 0,310 dan kriteria Mekanisme Mitigasi Sampah Antariksa sebesar 0,122. Sedangkan dua kriteria dengan prioritas terendah dari kriteria yang dipilih yakni kriteria Kelembagaan dengan bobot prioritas sebesar 0,068 dan kriteria Kerjasama Internasional dengan bobot sebesar 0,028.

Tabel 1. Matriks Berpasangan dan Bobot Prioritas Antar Kriteria Strategi Kebijakan.

	Pemantauan & Pengawasan Sampah Antariksa	Regulasi	Mekanisme Mitigasi Sampah Antariksa	Kelembagaan	Kerjasama Internasional
Pemantauan & Pengawasan Sampah Antariksa		41.333	5.881	5.667	6.529
Regulasi			7.799	6.504	6.504
Mekanisme Mitigasi Sampah Antariksa				5.881	5.259
Kelembagaan					7.799
Kerjasama Internasional	Incon: 0.33				

Priorities with respect to:

Goal: STRATEGI KEBIJAKAN MITIGASI ANCAMAN PEREDARAN ORBIT SATELIT TERHADAP KEAMANAN NASIONAL



Inconsistency = 0.33

with 0 missing judgements

Hasil ini menunjukkan bahwa untuk terwujudnya sebuah strategi kebijakan mitigasi ancaman peredaran orbit satelit terhadap keamanan nasional, responden menginginkan kriteria pemantauan dan pengawasan sampah antariksa adalah kriteria yang dominan dan prioritas untuk dilakukan untuk menghindari ancaman bencana sampah antariksa pada peredaran orbit satelit yang mungkin dapat terjadi. Kriteria yang mendapat prioritas kedua dan ketiga yaitu regulasi dan mekanisme mitigasi sampah antariksa. Responden berharap bahwa pada masa mendatang penting untuk melakukan perbaikan regulasi khususnya kewenangan pemerintah maupun negara dalam penanganan mitigasi sampah antariksa serta mekanisme mitigasi sampah antariksa sehingga semakin dipahami langkah-langkah antisipatif dan upaya mitigasi yang

dapat dilakukan jika bencana tersebut terjadi untuk meminimalkan korban jiwa maupun terganggunya keamanan nasional. Responden juga menganggap bahwa kriteria kelembagaan dan kerja sama internasional juga penting, sehingga koordinasi antar lembaga terkait semakin solid dan terintegrasi serta kerjasama Internasional perlu dimantapkan, mengingat dampak bencana dari jatuhnya sampah antariksa dapat saja berdampak pada beberapa negara.

Sedangkan prioritas sub kriteria berdasarkan *goal* (Strategi kebijakan mitigasi ancaman peredaran orbit satelit terhadap keamanan nasional) yang terlihat pada Tabel 2. menunjukkan urutan bobot prioritas yakni: sub kriteria Keamanan Nasional dengan *eigen vector* sebesar 0,728, kemudian sub kriteria kebijakan mitigasi sampah antariksa (0,202) dan sub kriteria teknologi antariksa (0,070).

Tabel 2. Prioritas Antar Sub kriteria Strategi Kebijakan Mitigasi Ancaman Peredaran Orbit Satelit Terhadap Keamanan Nasional

Synthesis with respect to:
Goal: STRATEGI KEBIJAKAN MITIGASI ANCAMAN PEREDARAN ORBIT SATELIT TERHADAP KEAMANAN NASIONAL

Overall Inconsistency = .31

KEAMANAN NASIONAL	.728	
KEBIJAKAN MITIGASI SAMPAH ANTARIKSA	.202	
TEKNOLOGI ANTARIKSA	.070	

Prioritas subkriteria (pendekatan) tertinggi menurut responden yaitu keamanan nasional, kemudian kebijakan mitigasi sampah antariksa dan teknologi antariksa. Responden memandang bahwa keamanan nasional pasti terganggu jika sampah antariksa menubruk satelit dan jatuh bumi dan dapat berakibat terganggunya jaringan komunikasi dan navigasi. Jika jaringan komunikasi dan navigasi bisa dibayangkan dampaknya akan sangat massif seperti terganggunya komunikasi data, sinyal data bahkan dunia penerbangan dan perbankan akan kacau. Pendekatan kebijakan mitigasi sampah antariksa dan teknologi antariksa juga penting menjadi perhatian pemerintah sehingga kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi dapat diantisipasi sejak dini, sehingga korban jiwa, materi bahkan terganggunya keamanan nasional dapat diminimalkan. Matriks berpasangan antar Sub kriteria (pendekatan dengan kriteria sebagai acuan) disusun dan dihitung bobot prioritasnya untuk menentukan prioritas lokal (*local priority*).

1) Kriteria Pemantauan dan Pengawasan Sampah Antariksa

Dilihat dari kriteria Pemantauan dan Pengawasan Sampah Antariksa, maka dari ketiga pendekatan menunjukkan bahwa pendekatan Keamanan Nasional memperoleh bobot prioritas tertinggi sebesar 72,2 % sebagai sub kriteria prioritas untuk strategi kebijakan mitigasi ancaman peredaran orbit satelit terhadap keamanan nasional dengan pendekatan sistem dinamik, dengan *Inconsistency ratio*-nya 0,30 artinya penyimpangan yang terjadi dari jawaban responden untuk pertanyaan nomor 11 sd 13 dalam kuisioner sebesar 30% (lihat Tabel 3).

Hasil tersebut menggambarkan bahwa sub kriteria yang menjadi prioritas adalah Keamanan Nasional (69,7%), kemudian sub kriteria koordinasi (22,1%) dan pembangunan terpadu sektor maritim sebesar 8,2%. Responden menghendaki adanya Keamanan Nasional dari kriteria Pemantauan dan Kerjasama Internasional Sampah Antariksa.

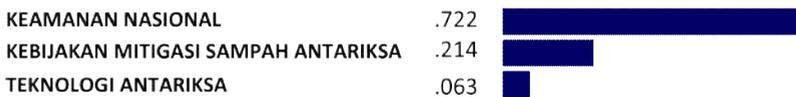
Tabel 3. Matrik Berpasangan dan Histogram Bobot Prioritas antarSub kriteria dengan Pemantauan dan Pengawasan Sampah Antariksa sebagai Acuan

	Keamanan Nasional	Kebijakan Mitigasi Sampah Antariksa	Teknologi Antariksa
Keamanan Nasional		5.882	6.529
Kebijakan Mitigasi Sampah Antariksa			5.881
Teknologi Antariksa		Incon: 0.30	

Priorities with respect to:

Goal: STRATEGI KEBIJAKAN MITIGASI ANCAMAN PEREDARAN ORBIT SATELIT TERHADAP KEAMANAN NASIONAL

>PEMANTAUAN & PENGAWASAN SAMPAH ANTARIKSA



Inconsistency = 0.30

with 0 missing judgements

2) Kriteria Regulasi

Hasil pengolahan matriks berpasangan ditinjau dari kriteria Regulasi yang ditunjukkan dalam Tabel 4. menunjukkan hasil bahwa sub kriteria keamanan nasional mendapatkan bobot prioritas tertinggi sebesar

74,1%, diikuti oleh sub kriteria kebijakan mitigasi sampah antariksa sebesar 17,9 % dan teknologi antariksa sebesar 8%. *Inconsistency ratio*-nya 0,20 artinya telah terjadi penyimpangan sebesar 20 % oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 14 sd 16 dalam kuisioner.

Hasil ini menunjukkan bahwa terpilihnya sub kriteria keamanan nasional sebagai prioritas sub kriteria dari kriteria Regulasi menggambarkan bahwa responden menganggap bahwa regulasi dalam kaitannya dengan keamanan nasional sangat penting dan vital untuk diprioritaskan mengingat dampak yang ditimbulkan dari bencana sampah antariksa tersebut.

Tabel 4. Matrik Berpasangan dan Histogram Bobot Prioritas antar-Sub kriteria dengan Kriteria Regulasi sebagai Acuan

	Keamanan Nasional	Kebijakan Mitigasi Sampah Antariksa	Teknologi Antariksa
Keamanan Nasional		6.504	5.881
Kebijakan Mitigasi Sampah Antariksa			3.511
Teknologi Antariksa		Incon: 0.20	

Priorities with respect to:

Goal: STRATEGI KEBIJAKAN MITIGASI ANCAMAN PEREDARAN ORBIT SATELIT TERHADAP KEAMANAN NASIONAL

KEAMANAN NASIONAL	.741	
KEBIJAKAN MITIGASI SAMPAH ANTARIKSA	.179	
TEKNOLOGI ANTARIKSA	.080	

Inconsistency = 0.20

with 0 missing judgements

3) Kriteria Mekanisme Mitigasi Sampah Antariksa

Untuk kriteria mekanisme mitigasi sampah antariksa, dapat dilihat dari Tabel 5. bahwa hasil pengolahan matriks berpasangan menunjukkan hasil bahwa sub kriteria keamanan nasional mendapatkan bobot prioritas tertinggi sebesar 70,8 %, diikuti oleh sub kriteria kebijakan mitigasi sampah antariksa sebesar 21,7%, sedangkan sub kriteria teknologi antariksa hanya memperoleh bobot prioritas 7,5 %. *Inconsistency ratio*-nya 0,55 artinya telah terjadi penyimpangan sebesar 34% oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 17 sd 19 dalam kuisioner.

Tabel 5. Matrik Berpasangan dan Histogram Bobot Prioritas Antar Sub kriteria dengan Kriteria Mekanisme Mitigasi Sampah Antariksa sebagai Acuan

	Keamanan Nasional	Kebijakan Mitigasi Sampah Antariksa	Teknologi Antariksa
Keamanan Nasional		5.881	5.259
Kebijakan Mitigasi Sampah Antariksa			5.259
Teknologi Antariksa		Incon: 0.34	

Priorities with respect to:

Goal: STRATEGI KEBIJAKAN MITIGASI ANCAMAN PEREDARAN ORBIT SATELIT TERHADAP KEAMANAN NASIONAL >REGULASI

KEAMANAN NASIONAL	.708	
KEBIJAKAN MITIGASI SAMPAH ANTARIKSA	.217	
TEKNOLOGI ANTARIKSA	.075	

Inconsistency = 0.34

with 0 missing judgements

4) Kriteria Kelembagaan

Hasil analisis matrik berpasangan dari jawaban responden menunjukkan bahwa sub kriteria keamanan nasional memperoleh bobot prioritas tertinggi sebesar 74,3 %, diikuti subkriteria kebijakan mitigasi sampah antariksa dengan prioritas sebesar 18,7 %; sedangkan subkriteria teknologi antariksa sebesar 7%. Nilai *Inconsistency ratio* dari matrik jawaban responden terhadap kuisisioner menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi hanya sebesar 15 % untuk pertanyaan nomor 20 sd 22 (Lihat Tabel 6).

Tabel 6. Matrik Berpasangan dan Histogram Bobot Prioritas Antar Sub Kriteria dengan Kelembagaan sebagai Acuan

	Keamanan Nasional	Kebijakan Mitigasi Sampah Antariksa	Teknologi Antariksa
Keamanan Nasional		5.881	7.151
Kebijakan Mitigasi Sampah Antariksa			3.959
Teknologi Antariksa		Incon: 0.15	

Priorities with respect to:

Goal: STRATEGI KEBIJAKAN MITIGASI ANCAMAN PEREDARAN ORBIT SATELIT TERHADAP KEAMANAN NASIONAL >KELEMBAGAAN



Inconsistency = 0.15

with 0 missing judgements

5) Kriteria Kerja sama Internasional

Hasil analisis matrik berpasangan seperti yang terlihat pada Tabel 7. di bawah ini menunjukkan bahwa subkriteria dengan prioritas tertinggi adalah sub kriteria keamanan nasional sebesar 73,9%, kemudian sub-kriteria kebijakan mitigasi sampah antariksa sebesar 20,2%; sedangkan subkriteria teknologi antariksa dengan bobot prioritas hanya 5,9%. *Inconsistency ratio* dari matrik ini cukup besar dengan penyimpangan 22% oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 23 s.d. 25 dalam kuisioner.

Tabel 7. Matrik Berpasangan dan Histogram Bobot Prioritas antar-Sub Kriteria dengan Kriteria Kerja Sama Internasional sebagai Acuan

	Keamanan Nasional	Kebijakan Mitigasi Sampah Antariksa	Teknologi Antariksa
Keamanan Nasional		5.881	7.151
Kebijakan Mitigasi Sampah Antariksa			3.956
Teknologi Antariksa		Incon: 0.15	

Priorities with respect to:

Goal: STRATEGI KEBIJAKAN MITIGASI ANCAMAN PEREDARAN ORBIT SATELIT TERHADAP KEAMANAN NASIONAL >KERJASAMA INTERNASIONAL



Inconsistency = 0.22

with 0 missing judgements

Dari hasil matrix berpasangan di atas, responden menginginkan kerjasama Internasional yang dibangun, baik kerjasama bilateral maupun multilateral harus mengedepankan keamanan nasional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan dan saling menghargai. Kebijakan mitigasi sampah antariksa yang komprehensif perlu dirumuskan dan ditetapkan yang menjadi dasar untuk bertindak. Mengingat dampak sampah antariksa sangat berbahaya dan massif, pemanfaatan teknologi antariksa menjadi sebuah keharusan untuk digunakan bagiantisipasi, penanganan cepat dan meminimalkan dampak bencana tersebut.

Kesimpulan dari hasil matrik berpasangan antara *goal*, kriteria dan sub kriteria menghasilkan dua (2) poin utama. Pertama, pemantauan dan pengawasan sampah antariksa menjadi prioritas yang dibutuhkan dalam membentuk sebuah strategi kebijakan mitigasi ancaman peredaran orbit satelit terhadap keamanan nasional. Kedua, kesamaan pandangan dan pemahaman responden terkait dengan bahaya sampah antariksa yang dapat mengancam keamanan nasional menjadi *concern* utama. Hal ini terwujud dengan matrik berpasangan antar tiga (3) sub-kriteria yaitu keamanan nasional, kebijakan mitigasi sampah antariksa dan teknologi antariksa dengan enam (6) kriteria mencakup pemantauan & pengawasan sampah antariksa, regulasi, mekanisme mitigasi sampah antariksa, kelembagaan, dan kerjasama internasional yang menempatkan sub-kriteria keamanan nasional menjadi prioritas utama di keenam kriteria. Meskipun begitu, kebijakan mitigasi sampah antariksa dan teknologi antariksa tetap menjadi hal yang penting untuk mendukung penguatan keamanan nasional.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa responden yang merupakan para pengambil kebijakan telah menyadari bahwa diperlukan pemantauan dan pengawasan sampah antariksa karena hal itu dapat mengancam keamanan nasional. Selain itu, kesamaan pemahaman bahwa ancaman keamanan nasional terkait dengan sampah antariksa tidak memerlukan sebuah tindakan militer yang agresif untuk penanggulangannya. Keamanan nasional di sini tidak lagi sebuah keamanan tradisional yang berurusan dengan militer dan perang. Meski demikian, ancaman sampah antariksa ini juga sama besarnya dengan ancaman perang, karena jatuhnya sampah antariksa ke wilayah Indonesia dapat secara drastis dan seketika membahayakan hidup penduduk Indonesia. Kesamaan pemahaman inilah yang kemudian menjadi salah satu landasan dalam merencanakan langkah yang lebih strategis yaitu sebuah kebijakan untuk mitigasi ancaman peredaran orbit satelit terhadap

keamanan nasional. Namun dalam merumuskan kebijakan tersebut dibutuhkan sebuah skenario kebijakan dengan strategi yang tepat.

Meskipun kerja sama internasional menjadi salah satu strategi yang diprioritaskan, namun dalam pelaksanaannya kerjasama internasional seringkali tidak berjalan mudah, karena memerlukan waktu lama untuk melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan, terlebih persoalan keamanan negara masing-masing. Oleh karena itu, salah satu cara efisien adalah dengan adopsi langkah-langkah nasional yang dapat diterapkan kedalam sistem regulasi nasional yang efektif,²¹ sehingga dalam proses kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, Indonesia memiliki posisi tawar dalam mengedepankan strategi keamanan yang telah diintegrasikan dalam sistem keamanan nasional.

Indonesia sendiri memaknai keamanan nasional sebagai ketahanan nasional dimana merupakan sebuah kondisi yang terus bergerak dalam sebuah bangsa yang memiliki kegigihan dan ketekunan untuk menguatkan dan mempersiapkan bangsa dalam menghadapi menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional²². Ancaman militer mungkin bukan merupakan satu-satunya jenis ancaman yang dihadapi oleh negara maupun warga negaranya, namun suatu entitas sosial dan/atau politik juga dapat menjadi ancaman seperti kedaulatan pangan, ancaman lingkungan dan lain sebagainya dapat menjadi ancaman serius yang dapat mengancam keamanan nasional²³.

Selain itu, sampai saat ini kerjasama internasional terkait dengan antariksa jarang menghasilkan solusi yang mengikat dan efektif untuk diterapkan. Seperti persoalan mitigasi sampah antariksa yang mengalami keengganan di forum internasional. Topik ini telah dibicarakan dalam COPUOS sejak awal tahun 1980, namun kebijakan gagal disepakati, bahkan COPUOS tidak mengadopsi pedoman mitigasi puing hingga

²¹ Steven A Mirmina, "Reducing the proliferation of orbital debris: Alternatives to a legally binding instrument," *American Journal of International Law* 99, no. 3 (2005): 653.

²² Susetyo, "Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia," 8.

²³ Kusnanto Anggoro, "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum," in *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII* (Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003).

2007 dan sampai saat ini secara hukum tidak mengikat²⁴. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sebuah strategi kebijakan mitigasi ancaman peredaran orbit satelit terhadap keamanan nasional yang efektif dan strategis adalah dengan merumuskan langkah-langkah mitigasi dalam hukum nasional Indonesia. Ini kemudian dibawa sebagai sebuah kekuatan dalam merundingkan kesepakatan dalam kerja sama internasional.

Kekuatan dalam kesepakatan kerja sama internasional tergantung pada kekuatan diplomasi sebuah negara. Diplomasi keamanan nasional di Indonesia sering disebut sebagai diplomasi pertahanan. Pelaksanaan diplomasi pertahanan dengan cara *soft power diplomacy* (apa yang dimaksud soft power diplomacy? Esensi diplomasi adalah komunikasi dan negosiasi. Bagaimana Indonesia membangun diplomasi yang mampu memengaruhi negara lain dalam konteks mitigasi ancaman sampah antariksa?) dianggap efektif dan efisien (apa ukurannya?), sehingga mudah untuk dilakukan tanpa harus menelan korban dan menghabiskan biaya besar²⁵. Strategi diplomasi ini juga dapat digunakan dalam proses kerja sama internasional mengenai sampah antariksa. Selain itu, ancaman sampah antariksa merupakan ancaman transnasional yang tidak hanya membahayakan satu negara saja namun lintas batas negara, sehingga kerjasama Internasional bisa merupakan kebijakan mitigasi yang strategis.

Simpulan

Peredaran orbit satelit yang semakin meningkat menghasilkan sampah antariksa mengancam keamanan nasional sebuah negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah strategi kebijakan mitigasi ancaman peredaran orbit satelit terhadap keamanan nasional. Analisis AHP menunjukkan prioritas dengan urutan kriteria pemantauan dan pengawasan sampah antariksa dengan eigen vector tertinggi yaitu 0,472, kemudian kriteria regulasi (0,310), kriteria mekanisme mitigasi sampah antariksa (0,122), kriteria kelembagaan (0,068) dan kriteria kerjasama Internasional (0,028) Sedangkan untuk sub kriteria keamanan nasional menjadi kriteria prioritas dengan bobot nilai eigen vector sebesar 0,728 kemudian sub kriteria kebijakan mitigasi sampah antariksa (0,202) dan sub kriteria teknologi antariksa (0,070). Hal ini membuktikan

²⁴ Megan Ansdell, "Active Space Debris Removal: Needs, Implications, And Recommendations For Today's Geopolitical Environment," *Journal of Public & International Affairs* 21 (2010): 14.

²⁵ Triyoga Budi Prasetyo dan Sugeng Berantas, "Diplomasi Pertahanan Sebagai Bagian Dari Diplomasi Total RI," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 4, no. 2 (2018): 167.

bahwa pemantauan dan pengawasan sampah antariksa menjadi prioritas yang dibutuhkan dalam membentuk sebuah strategi kebijakan mitigasi ancaman peredaran orbit satelit terhadap keamanan nasional. Selain itu, kesamaan pandangan dan pemahaman responden terkait dengan bahaya sampah antariksa yang dapat mengancam keamanan nasional menjadi concern utama. Meskipun begitu, kebijakan mitigasi ancaman sampah antariksa dan peningkatan teknologi antariksa tetap menjadi bagian yang penting untuk mendukung penguatan keamanan nasional.

Sampai saat ini kerja sama internasional menjadi langkah yang menjanjikan dalam penguatan keamanan nasional terkait dengan sampah antariksa. Mengingat bahwa kepemilikan satelit lebih banyak dimiliki oleh negara lain, sehingga kerja sama internasional sebagai langkah mitigasi, baik kerja sama bilateral maupun multilateral dengan mengedepankan keamanan nasional. Namun demikian tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan dan saling menghargai dirasa paling efektif.

Kerja sama internasional memiliki kelemahan terkait proses yang lama untuk mencapai kesepakatan dan hukum yang mengikat, sehingga diperlukan sebuah langkah strategis dalam mencapai kerja sama internasional yang efektif. Untuk mencapai hal itu, sebuah kebijakan mitigasi sampah antariksa yang komprehensif perlu dirumuskan dan ditetapkan yang menjadi dasar untuk bertindak. Mengingat dampak sampah antariksa sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan bersifat masif, pemanfaatan teknologi antariksa menjadi sebuah keharusan untuk digunakan bagiantisipasi, penanganan cepat dan meminimalkan dampak bencana tersebut.

Upaya strategis yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan membuat langkah ke dalam sistem keamanan nasional, yakni memperbaiki regulasi tentang pengaturan titik edar orbit satellite untuk menghindarkan wilayah Indonesia dari ancaman sampah antariksa; memantapkan koordinasi antar K/L dan Non K/L dalam rangka meningkatkan kemampuan penanganan mitigasi ancaman peredaran orbit satelit dengan membentuk gugus tugas khusus yang terdiri dari antar K/L dan non K/L; dan peningkatan penguasaan teknologi antariksa. Politik anggaran juga penting dilakukan untuk mendukung kelancaran upaya yang akan dilakukan. Perlu ada pemahaman dalam pengambilan kebijakan bahwa isu ini merupakan isu penting yang memerlukan porsi anggaran yang cukup besar. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjadi posisi tawar yang tinggi dalam mencapai kesepakatan dalam kerja sama internasional terkait mitigasi ancaman peredaran orbit satelit terhadap keamanan nasional. Keberpihakan atas pentingnya membangun strategic policy merupakan

bagian dari keputusan politik yang akan berdampak pada masa depan Indonesia dan dunia pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Anggoro, Kusananto. "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum." In *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*. Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003.
- Ansdell, Megan. "Active Space Debris Removal: Needs, Implications, And Recommendations For Today's Geopolitical Environment." *Journal of Public & International Affairs* 21 (2010): 7-22.
- Djamaluddin, Thomas. "Kondisi lingkungan antariksa di wilayah orbit satelit." *Berita Dirgantara* 7, no. 2 (2010): 41-51.
- Hakim, Abdul Rachman. "Populasi Sampah Antariksa Menjelang Puncak Aktifitas Matahari Siklus 24 [Space Debris Population Toward The Peak Of Solar Cycle 24]." *Jurnal Sains Dirgantara* 10, no. 1 (2012): 59-69.
- Hildreth, Steven A., dan Allison Arnold. "Threats to U.S. National Security Interests in Space: Orbital Debris Mitigation and Removal." *Current Politics and Economics of the United States, Canada and Mexico* 16, no. 4 (8 Januari 2014).
- Imburgia, Joseph S. "Space debris and its threat to national security: a proposal for a binding international agreement to clean up the junk." *Vand. J. Transnat'l L* 44 (2011): 589-636.
- Inter-Agency Space Debris Coordination Committee. "IADC Observation Campaigns." 43rd Session of UNCOPUOS S&T SC, 2006.
- Kusmaryanto, Sigit. "Orbit Satelit." *Sigit Kusmaryanto*, 1 Desember 2013. <http://sigitkus.lecture.ub.ac.id/?p=1691>.
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. *Penelitian Sampah Antariksa di LAPAN: Bidang Matahari dan Antariksa*. Jakarta: LAPAN, 2011.
- Liou, J-C, dan Nicholas L. Johnson. "Risks in space from orbiting debris." *Science* 311, no. 5759 (Januari 2006): 340-41.
- Man, Philip De. "The Removal of Inactive Satellites and the Role of the International Telecommunication Union in Space Debris

- Remediation." Working Paper No. 104, 2013.
- Mirmina, Steven A. "Reducing the proliferation of orbital debris: Alternatives to a legally binding instrument." *American Journal of International Law* 99, no. 3 (2005): 649-53.
- Prasetyo, Triyoga Budi, dan Sugeng Berantas. "Diplomasi Pertahanan Sebagai Bagian Dari Diplomasi Total RI." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 4, no. 2 (2018): 167-84.
- Saaty, Thomas L. "Analytic hierarchy process." *Encyclopedia of operations research and management science*, 2013.
- Solomon, Stanley C. "Effects of Carbon Dioxide on the Upper Atmosphere." *McGraw-Hill Yearbook of Science and Technology* 107 (2008).
- Sudjatmiko, Totok. "Keamanan Negara dalam Kegiatan Antariksa Nasional: Perspektif Realis Ofensif." *Jurnal Global & Strategis* 9, no. 2 (2017): 207-26.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. *Si vis pacem para bellum: membangun pertahanan negara yang modern dan efektif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Susetyo, Heru. "Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia." *Lex Jurnalica* 6, no. 1 (2008): 1-10.
- Witarti, Denik Iswardani, dan Semmy Tyar Armandha. "Tinjauan Teoretis Konsepsi Pertahanan dan Keamanan di Era Globalisasi Industri Pertahanan." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 5, no. 3 (2018): 87-106.
- Yuniarti, Diah. "Analisis SWOT Sampah Antariksa Indonesia." *Buletin Pos dan Telekomunikasi* 11, no. 1 (2013): 13-28.

Network Centric Warfare dan Perang Asimetris di Afghanistan

Aziz Rahmani

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: azis.rahmani@dsn.ubharaya.ac.id

Abstract

The development of information technology in the world in the last few decades has made the United States (US) develop military doctrine based on information technology called "warfare network centric". When the US invades Afghanistan as part of the global war against terrorism the doctrine of "network centric warfare" is tested to overcome the conditions of asymmetrical warfare in Afghanistan with the ability to superior information and the use of force in use that can compensate for Taliban fighting and Al-Qaeda is organized by not being hierarchically structured. In conditions of balanced strategic interaction in the conditions of asymmetrical warfare, the US should be able to neutralize Al-Qaeda and the Taliban easily and quickly but the disparities that occur in asymmetric warfare in Afghanistan not only in military strength but also in status, ideological and structural disparities the aim of military operations in Afghanistan has not been fully achieved by the US and has made the war last long.

Keywords: Afghan War; asymmetrical warfare; network centric warfare.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi di dunia beberapa dekade terakhir membuat Amerika Serikat (AS) mengembangkan doktrin militer dengan berbasis teknologi informasi yang disebut sebagai "network centric warfare". Ketika AS melakukan invasi ke Afghanistan sebagai bagian dari perang global melawan terorisme doktrin "network centric warfare" diuji untuk dapat mengatasi kondisi perang asimetris di Afghanistan dengan kemampuan superioritas informasi dan penggunaan kekuatan tempur (use of force) secara berjejaring yang dapat mengimbangi cara berperang Taliban dan Al-Qaeda yang terorganisir dengan tidak secara terstruktur hirarkis. Dalam kondisi interaksi strategis yang berimbang dalam kondisi perang asimetris ini, seharusnya AS dapat menetralsir Al-Qaeda dan Taliban dengan mudah dan cepat tetapi disparitas yang terjadi dalam perang asimetris di Afghanistan tidak hanya pada kekuatan militer namun

juga pada disparitas status, ideologi dan struktural yang membuat tujuan operasi militer di Afghanistan belum sepenuhnya dapat dicapai oleh AS serta membuat perang berlangsung lama.

Kata kunci: Perang Afghanistan, perang asimetris, network centric warfare.

Pendahuluan

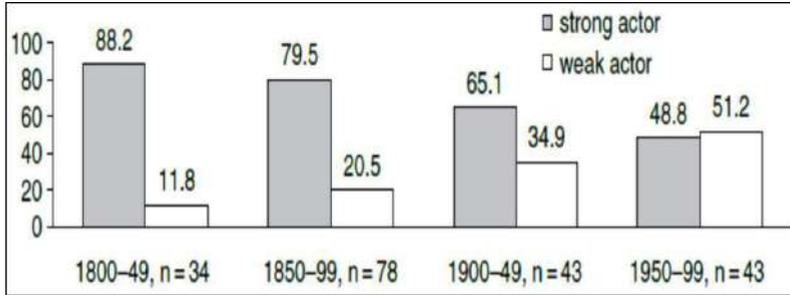
Pada Perang di Afghanistan, militer Amerika Serikat (AS) menghadapi kondisi perang asimetris. Ada perbedaan (disparitas) kekuatan antara kedua pihak yang berperang, dalam konteks ini adalah antara militer AS dengan Taliban. Secara lebih spesifik kondisi perang asimetris tersebut terjadi pada lingkungan Afghanistan, yang terdiri dari banyak kota (yang membuat militer AS harus melakukan perang kota), wilayah Afghanistan yang terdiri dari banyak padang pasir, milisi-milisi lokal, serta jejaring teroris Al-Qaeda yang tersebar hampir di seluruh wilayah Afghanistan.

Peperangan menjadi lebih kompleks, karena sering kali jejaring teroris Al-Qaeda membaaur dengan penduduk lokal, sehingga AS sulit mengidentifikasi antara kombatan dengan non-kombatan. AS juga pernah mengalami situasi serupa ketika di Somalia dan berakhir dengan ditarik mundurnya pasukan Amerika dari Somalia.

Pada konteks perang asimetris, Ivan Arreguin-Toft melakukan penelitian khusus, yang menunjukkan bahwa semenjak 1950-1999, kecenderungannya adalah aktor yang lebih lemah justru lebih banyak memenangkan peperangan dibandingkan dengan aktor yang lebih kuat. Dalam menghadapi perang asimetris di Afghanistan dan berbagai ancaman kontemporer lainnya, militer AS membuat inovasi doktrin peperangan dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) yang berimplikasi pada perubahan cara berperang. Melalui dukungan dan pemanfaatan TI secara maksimal, militer AS mampu merumuskan doktrin peperangan yang disebut sebagai "*network centric warfare*" (NCW). Doktrin ini bertujuan agar militer AS dapat beradaptasi dengan lingkungan strategis dan ancaman di Abad 21 yang membutuhkan kemampuan untuk dapat melakukan perang secara konvensional (perang antar negara), melakukan operasi militer selain dari perang (*military operations other than war*), dan

kemampuan untuk menghadapi peperangan yang tidak konvensional (*irregular warfare*) atau perang asimetris.¹

Tabel Persentasi Kemenangan Dalam Perang Asimetris Berdasarkan Aktor²



Doktrin NCW memungkinkan militer AS untuk melakukan peperangan dengan dukungan penyebaran informasi tentang berbagai aspek kondisi perang yang sedang terjadi, sehingga dapat mempunyai keunggulan informasi (*information superiority*). Dengan keunggulan informasi, maka kesadaran semua elemen (unit) yang terlibat peperangan tentang berbagai situasi medan perang, dapat semakin meningkat (*situational awareness*). Komando atau perintah pun dapat diberikan dan dilaksanakan secepat mungkin (*speed of command*).

Dengan doktrin NCW juga memungkinkan militer AS melakukan peperangan dengan cara yang terjejaring, sehingga operasi militer dapat terdesentralisasi dan otonom (*self-synchronization*), menyesuaikan dengan situasi-situasi unik yang dihadapi masing-masing unit militer pada operasinya dan tetap dilaksanakan berdasarkan atas komando yang diberikan, serta tetap terjejaring/saling terhubung dengan unit-unit militer lainnya. Oleh karena itulah, terminologi yang digunakan pada doktrin peperangan ini adalah "*network-centric warfare*". Dengan terjejaring, pada situasi perang asimetris militer AS mempunyai keunggulan informasi, sehingga diasumsikan dalam melakukan operasi tempur dengan cepat dan tepat dalam bertindak. Operasi-operasi militer juga mungkin dilakukan, dengan cara penyebaran unit-unit militer namun tetap saling terhubung (*de-massification*). Ketika menghadapi kondisi perang asimetris di Afghanistan, AS yang didukung doktrin

¹ David S. Alberts, John J. Gartska, dan Frederick P. Stein, *Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority* (US: CCRP, 2000), 58.

² Ivan Arreguin-Toft, *How the Weak Wins Wars: A Theory of Asymmetric Conflict* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 20.

NCW mempunyai superioritas kapabilitas militer dibandingkan Taliban. Tetapi faktanya, militer AS perlu berperang di Afghanistan hampir lebih dari 17 tahun (2001-sekarang).

Dalam perang asimetris menurut teori interaksi strategis (*strategic interaction*) yang dijelaskan Ivan Arreguin-Toft, jika pendekatan strategi yang digunakan sama (*indirect-indirect* atau *direct-direct*), maka aktor yang lebih kuat akan dapat memenangkan peperangan.³ Tetapi jika pendekatan strategi yang digunakan berbeda (*indirect-direct* atau *direct-indirect*), maka aktor yang lebih lemah akan memenangkan peperangan.⁴

Ketika masa awal Perang Afghanistan interaksi strategis yang terjadi antara AS dengan Taliban adalah *direct-direct*, AS melakukan serangan konvensional (*conventional attack*), sedangkan Taliban tidak dalam posisi yang memungkinkan untuk melakukan perang gerilya, sehingga hanya dapat melakukan pertahanan konvensional (*conventional defense*). Dalam kondisi interaksi strategis pada masa awal Perang Afghanistan, perang dapat dengan mudah dimenangkan AS dengan memukul mundur pasukan Taliban dan menjatuhkan rezim pemerintahannya di Afghanistan.⁵

Kondisi strategis tersebut mulai berubah ketika Taliban, Al-Qaeda dan kelompok-kelompok perlawanan lainnya di Afghanistan mulai melawan rezim baru Afghanistan yang demokratis dan tetap memerangi AS dengan bergerilya (*indirect*). Dengan doktrin NCW, AS tidak hanya mampu melakukan serangan konvensional secara langsung (*conventional attack/direct*) tetapi juga serangan tidak konvensional (*unconventional attack/indirect*) melalui pergerakan dari unit pasukan khusus yang mempunyai daya dukung kesadaran situasi (*situational awareness*) dan bergerak secara berjejaring dan terdesentralisir. Secara teoritis, interaksi strategis dalam Perang Afghanistan yang '*direct-direct*' maupun dalam kondisi '*indirect-indirect*' seharusnya dapat dimenangkan oleh AS sebagai aktor yang lebih kuat secara cepat. Tetapi AS membutuhkan waktu perang yang lama untuk menetralkan Al-Qaeda, Taliban, ataupun kelompok-kelompok perlawanan lainnya di Afghanistan.

Sebagai salah satu perang yang terjadi di awal abad ke-21 pasca peristiwa 9/11 di AS, perang di Afghanistan menjadi perhatian tersendiri. Para akademisi di antaranya tertarik membahas Perang Afghanistan dalam konteks perang asimetris. Dalam buku berjudul "*Conflict in Afghanistan: Studies in Asymmetric Warfare*", Martin Ewans misalnya, mendeskripsikan konflik/perang asimetris di Afghanistan secara historis, yaitu pada masa

³ Ibid., 34.

⁴ Ibid., 35.

⁵ Ibid., 19.

Perang Anglo-Afghan Pertama, Kedua, dan Ketiga, invasi Uni Soviet, dan terakhir adalah invasi Amerika Serikat.⁶ Menurut Ewans, Afghanistan menjadi pembahasan penting karena terletak di posisi geografis strategis antara teluk Persia dan sub-kontinen India.⁷ Geopolitik itu berpengaruh, misalnya ketika terjadi perang antara Inggris dan Russia di Afghanistan pada Abad ke-19 yang berdampak pada kondisi perdamaian di Eropa.⁸

Selama hampir lebih dari 1,5 abad, Afghanistan telah menjadi tempat konflik/peperangan bagi negara-negara besar (*major powers*) ataupun aktor non-negara.⁹ Hampir semua peperangan di Afghanistan merupakan perang asimetris. Sebelum terjadinya perang antara AS dan Afghanistan misalnya, Uni Soviet (Soviet) pernah berperang dengan Afghanistan di masa Perang Dingin selama 10 tahun.¹⁰ Dengan superioritas teknologi dan kapabilitas berperang Soviet yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Afghanistan, peperangan ini juga termasuk perang asimetris. Selama perang terjadi, Afghanistan mampu bertahan dengan motivasi mempertahankan diri dan membebaskan dari okupasi.

Soviet pun tidak memahami situasi di Afghanistan dengan baik, sehingga sekalipun punya kekuatan perang yang kuat dan berpengalaman di perang besar ketika Perang Dunia II, tetapi Soviet tidak dapat mengatasi perlawanan gerilya masyarakat Afghanistan. Soviet juga tidak mampu untuk membuat konsep anti-perlawanan (*counter insurgency*) yang memadai.¹¹ Pengorganisasian struktur militer Soviet yang kaku dan sangat terpusat, membuat Soviet tidak dapat beradaptasi dengan perang gerilya.¹²

Sebagai mantan diplomat Inggris di Afghanistan, Ewans berargumentasi bahwa alternatif untuk menghadapi kondisi asimetris di Afghanistan, selain menggunakan cara peperangan (*use of force*), juga dapat dimaksimalkan solusi/ tindakan diplomatik yang selama ini tidak dimanfaatkan atau menjadi prioritas utama oleh berbagai negara yang terlibat di Afghanistan.¹³ Thomas Barfield menilai, dalam bukunya

⁶ Martin Ewans, *Conflict in Afghanistan: Studies in Asymmetric Warfare* (New York: Routledge, 2005), 3.

⁷ *Ibid.*, 2.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, 107.

¹² *Ibid.*, 108.

¹³ Thomas Barfield, "Ulasan tentang Conflict in Afghanistan: Studies in Asymmetric Warfare, Martin Ewans," *International Journal of Middle East Studies* 39, no. 3 (Agustus 2007): 494-95.

tersebut, Ewans telah mendeskripsikan latar belakang & strategi Inggris dan Uni Soviet, ketika berperang dengan Afghanistan.¹⁴ Ewans juga mendeskripsikan teknik dan operasi militer yang dilakukan negara-negara yang berperang di Afghanistan. Hanya saja, Ewans tidak detail membahas tentang implikasi dari doktrin perang suatu negara untuk menghadapi kondisi perang asimetris di Afghanistan.

Dalam buku "*Network Centric Warfare and Coalition Operations: The New Military Operating System*" Paul T. Mitchell menjelaskan mengenai implikasi organisasi berjejaring yang memanfaatkan informasi teknologi terhadap operasi militer dengan studi kasus mengenai operasi yang dilakukan oleh pasukan koalisi Amerika Serikat.¹⁵ Mitchell mengatakan, informasi teknologi yang berkembang seiring dengan globalisasi, menuntut AS terus beradaptasi terhadap perkembangan global, agar dapat tetap menjaga supremasi hegemoni bersama dengan negara-negara aliansinya.¹⁶

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi juga membuat meningkatnya berbagai resiko di dunia internasional. Resiko terorisme, perang sipil, atau kegagalan sistem finansial, dapat terjadi kapan dan di mana saja. Salah satu karakteristik dari resiko (yang membedakan dengan ancaman) adalah suatu situasi yang tidak diduga/diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu AS membutuhkan doktrin militer yang dapat beradaptasi dengan lingkungan global kontemporer serta mampu menghadapi berbagai resiko keamanannya untuk dapat dominan di dunia internasional.¹⁷

Doktrin militer *network centric warfare* (NCW) dikembangkan AS berdasarkan perkembangan TI dan lingkungan strategis global kontemporer. Doktrin ini menekankan pada aspek penyebaran informasi (*information sharing*) dan organisasi militer yang berjejaring. Penyebaran informasi menjadi signifikan, ketika AS melakukan operasi militer bersama dengan negara-negara koalisi dan aliansinya.¹⁸ Dalam buku tersebut, Mitchell membahas tentang perkembangan doktrin NCW, dan implementasinya ketika AS melakukan operasi militer bersama dengan negara-negara aliansinya, tetapi tidak dibahas tentang doktrin NCW ketika AS menghadapi perang asimetris seperti di Afghanistan.

¹⁴ Ibid., 495.

¹⁵ Paul Mitchell, *Network Centric Warfare and coalition operations: the new military operating system*, Routledge global security studies; 9 (London: Routledge, 2009), 5.

¹⁶ Ibid., 17-22.

¹⁷ Ibid., 22-26.

¹⁸ Ibid., 31.

Artikel ini berusaha untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai permasalahan AS dengan doktrin perang *network centric warfare* (NCW) yang tidak dapat memenangkan perang asimetris di Afghanistan secara cepat. Kapabilitas dan superioritas militer serta penggunaan teknologi informasi oleh AS yang seharusnya dapat mengimbangi strategi dan operasi yang dilakukan oleh Al-Qaeda maupun Taliban di Afghanistan yang menggunakan pola berjejaring dan hirarkis atau dalam konteks interaksi strategis dalam peperangan asimetris (*indirect-indirect*) seharusnya dapat dimenangkan peperangan secara cepat oleh AS, tidak dapat diatasi dengan efektif dan perang berlangsung secara lama. Pembahasan di dalam artikel ini akan terdiri dari mengenai '*network centric warfare*', teori perang asimetris, kondisi perang asimetris dan implementasi '*network centric warfare*' di Afghanistan, serta disparitas ideologi dan struktural.

Penelitian ini menggunakan metodologi satu studi kasus (*single case study*) dengan jenis penelitian kualitatif. Studi kasus adalah penelitian terhadap suatu fenomena/kejadian yang telah terjadi (historis) pada konteks yang spesifik.¹⁹

Menurut Arie M. Kacowicz terdapat lima keunggulan metodologi studi kasus, yaitu validitas konseptual secara kualitatif, dapat mengidentifikasi variabel atau hipotesis baru dan juga menguji serta memperbarui variabel atau hipotesis yang sudah ada, pada satu studi kasus dapat dilakukan pengkajian mekanisme kausal, dapat mengkonstruksi suatu fenomena historis dengan detail dan mendalam, dan terakhir dapat menganalisis relasi kausal yang kompleks melalui generalisasi atau tipologi dari suatu teori.²⁰ Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data sekunder yang didapatkan dari berbagai buku, artikel pada jurnal ilmiah, artikel pada koran/majalah, dan juga situs-situs internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dibahas.

Network Centric Warfare

Ide atau konsep *Network Centric Warfare* (NCW) baru dikenal semenjak 1998 dengan dipublikasikannya artikel Arthur K. Cebrowski

¹⁹ Andrew Bennet, "Case Study Method: Design, Use, and Comparative Advantages," in *Models, Numbers, and Cases: Methods for Studying International Relations*, ed. oleh Detlef F. Sprinz dan Yael Wolinsky-Nahmias (USA: The University of Michigan Press, 2004), 21.

²⁰ Arie M. Kacowicz, "Case Study Method in International Security Studies," in *Models, Numbers, and Cases: Methods for Studying International Relations*, ed. oleh Detlef F. Sprinz dan Yael Wolinsky-Nahmias (USA: The University of Michigan Press, 2004), 108.

dan John J. Gartska yang berjudul "*Network Centric Warfare: Its Origin and Future*" di jurnal resmi Angkatan Laut AS (US Navy) Proceedings.²¹ Tetapi perkembangan ide cara berperang berbasis teknologi informasi sudah ada semenjak 1996 melalui tulisan Admiral William A. Owens berjudul "*The Emerging US System of Systems*" di *Strategic Forum* jurnal terbitan *National Defense University*.

Dalam tulisannya Cebrowski dan Gratska berargumen, dengan kondisi perubahan fundamental masyarakat dan ekonomi di AS yang semakin berbasiskan TI, maka perlu ada perubahan doktrin militer AS yang mampu beradaptasi dengan perkembangan TI dan memanfaatkannya secara maksimal.²²

Tahapan *Revolution on Military Affairs* (RMA) pada era TI yang paling fundamental adalah dengan mengubah doktrin militer yang berbasiskan "*platform centric warfare*" menjadi "*network centric warfare*".²³ Implikasi perubahan itu tidak hanya pada konteks doktrin militer, tetapi lebih jauh juga pada perubahan cara berperang yang dilakukan.²⁴

Ada dua utama perubahan dari *platform centric warfare* menjadi *network centric warfare* menurut Cebrowski dan Gratska, yaitu:

1. Perubahan cara pandang, yang sebelumnya melihat aktor-aktor militer sebagai aktor independen menjadi aktor yang secara berkesinambungan dapat beradaptasi dengan ekosistem.
2. Pembuatan ataupun pemilihan berbagai pilihan-pilihan strategis yang dapat selalu beradaptasi dan bertahan dalam kondisi dinamika ekosistem tersebut.²⁵

Karakteristik utama operasi militer berbasis NCW adalah interaksi informasi yang sangat intens antar aktor/unit militer secara terjejaring.²⁶ Model itu memungkinkan para aktor/unit militer bertindak dan berinteraksi secara fleksibel dan dinamis, dengan terus beradaptasi terhadap ekosistem peperangan yang sedang dilakukan.²⁷ Dalam NCW elemen ini disebut sebagai *information superiority* yang dapat menghasilkan *situational awareness*.

²¹ Mitchell, *Network Centric Warfare and coalition operations : the new military operating system*, 53.

²² Arthur K. Cebrowski dan John J. Gartska, "Network Centric Warfare: Its Origin and Future," *United State Naval Institute Proceedings* 124, no. 1 (Januari 1998): 28.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid., 30.

²⁷ Ibid.

Dengan penyebaran dan interaksi informasi antar aktor/unit militer yang dilakukan secara intens serta terjejaring, NCW juga memungkinkan untuk terbentuknya *speed of command*.²⁸ Cara untuk mengorganisir militer yang kompleks juga dapat dilakukan dengan cara dari bawah-keatas (*bottom-up*) sesuai dengan teori kompleksitas, sehingga dengan dukungan *speed of command* operasi militer dapat dilakukan melalui cara *self-synchronization* untuk menyesuaikan antara perintah dari komandan terhadap kondisi atau situasi nyata yang dialami oleh unit militer di medan peperangan.²⁹

Terdapat empat prinsip dasar doktrin NCW, yaitu:

1. Kekuatan militer yang terjejaring secara kuat akan meningkatkan kemampuan penyebaran informasi (*information sharing*).
2. Penyebaran informasi akan meningkatkan kualitas informasi dan juga penyebaran kesadaran situasi (*situational awareness*).
3. Penyebaran *shared awareness* memungkinkan dilakukannya kolaborasi dan *self-synchronization* secara berkelanjutan, serta peningkatan komando/perintah secara cepat (*speed of command*).
4. Ketiga prinsip tersebut akan meningkatkan efektivitas suatu misi/operasi.³⁰

Keempat prinsip dasar dari doktrin NWC dioperasionalkan pada medan peperangan yang terdiri dari empat domain utama yang saling berhubungan: domain informasi, kognitif, sosial, dan fisik.³¹ Domain informasi berkaitan dengan penyebaran informasi yang dilakukan secara terjejaring kepada seluruh aktor/unit militer yang sedang terlibat pada suatu peperangan, termasuk juga informasi hasil analisis intelijen.³² Domain kognitif berkaitan dengan kemampuan kepemimpinan, pengalaman, pengetahuan, ataupun moral dari aktor/unit militer.³³ Domain sosial berkaitan dengan konteks relasi sosial atau interaksi para aktor/unit militer yang sedang berperang dengan kondisi sosial di wilayah/tempat perang tersebut sedang dilakukan, hal ini juga termasuk pada nilai/norma sosial, budaya, hubungan sipil-militer atau

²⁸ Ibid., 32.

²⁹ Ibid.

³⁰ Office of Force Transformation, *The Implementation of Network-Centric Warfare* (Washington: Department of Defense United States of America, 2005), 7.

³¹ Ibid., 19.

³² Ibid., 20.

³³ Ibid.

kerangka keyakinan masyarakat di wilayah tersebut.³⁴ Adapun domain fisik, berkaitan dengan konteks ruang dan waktu ketika peperangan dilakukan. Domain ini merupakan domain yang tradisional ada dalam suatu perang dan terdiri dari laut, darat, dan udara.³⁵

Owens menjelaskan, ada tiga kondisi yang mengarahkan militer AS pada perubahan fundamental. *Pertama*, pecahnya Soviet yang menandai berakhirnya Perang Dingin. *Kedua*, realokasi berbagai sumber daya dari kepentingan pertahanan menjadi untuk berbagai kepentingan program domestik sebagai salah satu implikasi dari berakhirnya Perang Dingin. *Ketiga*, *Revolution in Military Affairs* (RMA) berbasiskan perkembangan teknologi informasi dan berpotensi semakin mengefektifkan militer AS.³⁶ Perubahan fundamental militer AS tersebut, akan mengarah kepada: intelijen, komando dan kontrol (*command and control*) dan kekuatan presisi (*precision force*).³⁷

Kategori intelijen berkaitan dengan sensor dan teknologi pelaporan intelijen yang berhubungan dengan pengumpulan intelijen (*intelligence collection*), pengawasan (*surveillance*), dan pengintaian (*reconnaissance*).³⁸ Untuk kategori komando dan kontrol, yang disebut lebih spesifik oleh Owens sebagai *Advanced C4I* (*command, control, communication, computer applications, and intelligence processing*) berkaitan dengan kemampuan untuk mengkonversi kesadaran sensorik (*sensor awareness*) yang bersumber dari intelijen menjadi kemampuan untuk mendominasi pengetahuan atau pemahaman tentang medan pertempuran, serta kemampuan untuk mengkonversi pemahaman tentang misi atau tugas menjadi kemampuan untuk mengontrol dan mendominasi medan pertempuran.³⁹ Sedangkan kategori kekuatan presisi, adalah kemampuan dari sinergi kedua kategori sebelumnya (intelijen serta komando dan kontrol) yang telah diimplementasikan.⁴⁰

Dengan ketiga kategori tersebut, Owens mengasumsikan bahwa militer tidak hanya dilihat berdasarkan kapabilitas sistem yang menyeluruh/holistik tetapi justru juga kepada kapasitas interaksi individu sebagai *system-of systems*.⁴¹ Dengan dukungan penggunaan teknologi

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

³⁶ Williams A. Owens, "The Emerging US System of Systems," *Strategic Forum*, no. 63 (Februari 1996): 1.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid., 1-2.

³⁹ Ibid., 2.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

informasi, dimungkinkan untuk dapat dilakukan pertukaran informasi secara *real time* dan berkesinambungan dalam interaksi individu/unit militer, sehingga dapat menghasilkan kondisi yang disebut oleh Owens sebagai “*dominant battle space knowledge*” (DBK).⁴² Konsep *system-of-systems* yang diajukan Owens menjadi diskursus awal NCW dengan mengajukan ide cara berperang yang berbasiskan penggunaan TI dan penekanan pada interaksi individu/unit militer.

Kekuatan militer yang dibangun berdasarkan jejaring, memungkinkan dilakukannya kecepatan komando (*speed of command*). Menurut Cebrowski dan Gartska ada tiga bagian: *pertama*, superioritas informasi (*information superiority*) yang mungkin didapatkan dengan dukungan TI; *kedua*, unit-unit militer dapat bergerak dengan cepat dan presisi; dan *ketiga*, dengan kedua hal sebelumnya dapat menghasilkan cara berperang yang simultan, cepat dan mendadak sehingga dapat mengacaukan strategi lawan.⁴³ Konsep NCW juga memungkinkan unit-unit militer melakukan sinkronisasi diri (*self-synchronization*) sehingga suatu unit militer selain mengikuti perintah/komando dari atasan juga mampu untuk beradaptasi dengan ekosistem medan peperangan.⁴⁴ Sinkronisasi diri unit militer hanya mungkin dilakukan jika pengorganisasian militer dibuat dari bawah ke atas (*bottom-up*) sesuai dengan teori jejaring kompleksitas.⁴⁵

David S. Alberts, Frederick P. Stein dan Gratska dalam buku *Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority*, menyimpulkan bahwa NCW pada akhirnya adalah sebuah konsep doktrin militer yang berusaha untuk meningkatkan keterhubungan/interaksi antar unit militer secara berjejaring dengan dukungan TI, yang pada akhirnya dapat menghasilkan kekuatan tempur yang lebih kuat dan efektif.

Keterhubungan antar unit militer yang berjejaring, dibangun dengan infrastruktur informasi (*infostructure*), sehingga dapat dilakukan penyebaran berbagai informasi. Suatu jejaring terdiri dari nodulus/entitas (*nodes*) dan hubungan/relasi/garis (*links*) diantara nodulus tersebut.⁴⁶ Setiap nodulus/entitas unit militer melakukan aktivitas seperti observasi/sensor, mengambil keputusan, atau bertindak akan dihubungkan dengan nodulus/entitas unit militer lainnya sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan atau sebaliknya memberikan hasil keputusan

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid., 31.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid., 94.

yang dibuat.⁴⁷ Entitas-entitas militer yang berjejaring berdasarkan penyebaran informasi ini, dapat meningkatkan efektifitas kemampuan tempur, serta efisiensi waktu dan sumber daya.⁴⁸

Teori Perang Asimetris

Permasalahan utama yang berusaha untuk dijelaskan dalam teori perang asimetris adalah tentang paradoks yang terjadi, ketika suatu pihak dengan kapabilitas militer yang lemah dapat mengalahkan yang lebih kuat. Salah satu contoh perang asimetris yang juga cukup jelas adalah ketika terjadi Perang Vietnam. Ada empat implikasi strategis Perang Vietnam: *pertama*, kapabilitas kekuatan (terutama kapabilitas militer) yang lebih besar tidak menjamin begitu saja suatu negara dapat memenangkan peperangan; *kedua*, dalam kondisi tertentu yang partikular peperangan dapat berkembang tidak hanya di medan/arena peperangan (*battlefield*) tetapi juga pada arena sosial dan politik; *ketiga*, pentingnya perang gerilya yang dapat membuat kondisi perang berlanjut (*protracted warfare*); dan keempat, Perang Vietnam juga menunjukkan bahwa tujuan utama perang adalah untuk mempengaruhi kehendak (*will*) dari musuh.⁴⁹ Dapat disimpulkan, sebagai negara yang lebih lemah dibandingkan dengan AS, Vietnam dapat memenangkan peperangan karena menolak untuk melakukan konfrontasi dengan cara negara kuat, yaitu peperangan konvensional tetapi justru dilakukan dengan cara yang non-konvensional seperti perang gerilya, terorisme, ataupun juga tindakan non-kekerasan (*non-violence action*).⁵⁰

Perspektif lain tentang perang asimetris, dijelaskan Patricia L. Sullivan, yang menyebut sebagai suatu kondisi konflik bersenjata yang mana salah satu aktor mempunyai kapasitas destruktif (*destructive capacity*) lebih mengancam dibandingkan dengan kemampuan bertahan secara fisik (*physical survival*) aktor lainnya. Tetapi aktor yang lebih lemah tersebut mempunyai "*cost tolerance*".⁵¹ Hasil peperangan berdasarkan kedua faktor tersebut, dimiliki oleh salah satu aktor dideterminasikan oleh objektif politik (*political objective*) dan objektif militer (*military objective*). Yang dimaksud dengan objektif politik adalah sumber-sumber

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Andrew Mack, "Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict," *World Politics* 27, no. 2 (1975): 177-78, doi:10.2307/2009880.

⁵⁰ Ibid., 195.

⁵¹ Patricia L. Sullivan, "War Aims and War Outcomes: Why Powerful States Lose Limited Wars," *The Journal of Conflict Resolution* 51, no. 3 (2007): 502.

alokasi yang bernilai (seperti teritorial, otoritas politik, atau sumber daya alam) yang ingin didapatkan. Sedangkan objektif militer adalah tujuan operasional yang dilakukan oleh angkatan bersenjata suatu negara sehingga mendapatkan hasil politik yang diinginkan.⁵²

Menurut Andrew Mack, ada tiga elemen yang menyebabkan negara lemah dapat menang terhadap negara kuat, yaitu: *pertama*, kekuatan relatif (*relative power*) menjelaskan kepentingan relatif (*relative interest*); *kedua*, kepentingan relatif tersebut dapat menjelaskan tentang kerawanan politik (*political vulnerabilities*); dan *ketiga*, kerawanan relatif dapat menjelaskan mengapa aktor yang lebih kuat dapat kalah. Berdasarkan atas logika tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara yang lebih kuat mempunyai kepentingan yang jauh lebih rendah untuk memenangkan peperangan, karena tidak mempertaruhkan keberlangsungan hidup mereka. Tetapi, bagi negara yang lebih lemah, mempunyai kepentingan yang lebih besar untuk menang dalam perang, karena hanya dengan memenangkan peperangan tersebut keberlangsungan hidup mereka dapat terjamin (*survival*).⁵³ Tesis ini oleh Andrew Mack disebut sebagai kepentingan asimetris (*asymmetric interest*).

Tesis lainnya untuk menjelaskan hasil (*outcomes*) dari perang asimetris adalah "*strategic interaction*" yang dibuat Ivan Arreguin-Toft. Yang dimaksud sebagai strategi pada terminologi "*strategic interaction*" adalah rencana yang dibuat oleh suatu aktor dalam menggunakan kekuatan bersenjata untuk mencapai tujuan militer atau politik.⁵⁴ Terdapat empat tipologi strategi dalam perang asimetris, yaitu strategi menyerang oleh negara kuat: serangan langsung (*direct attack*) dan "*barbarism*" serta strategi bertahan oleh negara lemah: pertahanan langsung (*direct defense*) dan "*guerilla warfare strategy*".⁵⁵

Serangan langsung (*direct attack*) berarti penggunaan kekuatan militer untuk mendapatkan sumber-sumber bernilai yang dimiliki oleh lawan atau menghancurkan angkatan bersenjata. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk menghancurkan kapasitas angkatan bersenjata lawan, sehingga tidak dapat melawan lagi.⁵⁶ Sedangkan strategi "*barbarism*" adalah usaha secara sistematis dengan melakukan pelanggaran hukum-hukum perang dengan tujuan agar mendapatkan objektif militer dan politik. Strategi biasanya tidak hanya ditujukan kepada "*combatants*"

⁵² Ibid., 502-3.

⁵³ Arreguin-Toft, *How the Weak Wins Wars: A Theory of Asymmetric Conflict*, 96.

⁵⁴ Ibid., 99.

⁵⁵ Ibid., 100.

⁵⁶ Ibid., 100-101.

tetapi juga „*non-combatants*” sehingga dapat menghancurkan kehendak (*will*) dan kapasitas lawan untuk melawan.⁵⁷

Strategi bertahan yang mungkin dilakukan aktor yang lemah adalah pertahanan langsung (*direct defense*), yaitu menggunakan kekuatan militer untuk mencegah lawan mendapatkan atau menghancurkan sumber-sumber yang bernilai seperti teritorial, populasi ataupun industri-industri strategis.⁵⁸ Adapun strategi perang gerilya bertujuan membuat beban biaya perang pihak lawan menjadi besar, dengan menggunakan pasukan terlatih dan menghindari konfrontasi langsung dengan lawan. Beban biaya mencakup seperti pasukan, logistik, infrastruktur, mental, ataupun juga waktu. Hampir sama juga dengan „*barbarism*”, tujuan utama dari perang gerilya adalah untuk menghancurkan kehendak (*will*) pihak lawan untuk melakukan peperangan.⁵⁹ Strategi perang gerilya memiliki dua elemen penting, yaitu tempat perlindungan fisik atau politik (*physical or political sanctuary*), dan dukungan populasi (*supportive population*).⁶⁰

Berdasarkan atas keempat tipologi strategi peperangan asimetris tersebut, tesis utama dari „*strategic interaction*” adalah disaat kedua aktor (kuat dan lemah) menggunakan strategi yang sama (*direct-direct* atau *indirect-indirect*) maka peperangan tersebut akan mudah dimenangkan oleh aktor yang kuat. Sedangkan disaat kedua aktor (kuat dan lemah) menggunakan strategi yang berlawanan (*direct-indirect* atau *indirect-direct*), maka dalam kondisi ini aktor yang lemah akan memenangkan peperangan.⁶¹

Beberapa contoh dari peperangan atau konflik asimetris adalah Perang Vietnam (AS-Vietnam), Perang Afghanistan (Uni Soviet-Afghanistan), konflik „*blackhawk down*” di Mogadishu, Somalia (AS-milisi Somalia). Ketiga peperangan/konflik itu melibatkan dua aktor yang tidak seimbang kekuatannya, tetapi pada akhirnya dimenangkan oleh aktor yang lebih lama.

Dalam penelitian ini, teori perang asimetris yang digunakan adalah teori yang dijelaskan Ekaterina Teranova. Teori ini menjelaskan kondisi perang asimetris antara aktor negara dengan aktor non-negara seperti terorisme. Menurut Teranova, perang asimetris secara umum dapat dijelaskan sebagai „*two-way asymmetry*”, yaitu terdiri dari asimetri positif dan negatif. Asimetri positif berarti penggunaan sumber-sumber

⁵⁷ Ibid., 100.

⁵⁸ Ibid., 103.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid., 104.

⁶¹ Ibid., 18.

kekuatan konvensional (seperti militer atau ekonomi) oleh aktor yang lebih kuat kepada yang lebih lemah.⁶² Sedangkan asimetri negatif adalah sumber-sumber yang dapat digunakan oleh pihak yang lebih lemah untuk mengeksploitasi kerentanan (*vulnerabilities*) dari pihak yang lebih kuat.⁶³

Dalam konteks peperangan dengan teroris, kondisi perang asimetris yang terjadi adalah asimetri negatif karena teroris memanfaatkan sumber-sumber disparitas ideologi dan struktural yang berbeda dengan aktor negara yang lebih kuat.⁶⁴ Walaupun secara kekuatan militer ataupun ekonomi teroris jauh lebih lemah dibandingkan dengan aktor negara.

Ideologi bagi kelompok/aktor non-negara yang bersenjata seperti terorisme, merupakan penggerak dan justifikasi untuk tindakan kekerasan atau peperangan yang dilakukan oleh mereka. Radikalisasi, indoktrinasi, mobilisasi dan rekrutmen anggota kelompok teroris juga berbasiskan ideologi.⁶⁵ Pada konteks ideologi ini, tidak berarti bahwa aktor negara tidak mempunyai basis ideologis, tetapi yang membedakan dengan terorisme adalah ideologinya yang radikal (*utopis*) dan anti terhadap sistem.⁶⁶ Dalam perang asimetris, ideologi menjadi salah satu ciri khas terorisme yang kemudian membuat disparitas dengan aktor negara, termasuk juga pada konteks interpretasi atau definisi “kemenangan” ataupun “kekalahan” dalam peperangan oleh kedua aktor tersebut.⁶⁷

Disparitas struktural yang dimaksud pada konteks ini adalah disparitas pengorganisasian yang berbeda antara aktor negara dengan aktor non-negara. Negara sebagai suatu entitas organisasi tentu jauh lebih mapan dan teratur dibandingkan dengan organisasi aktor non-negara.

Menurut Teranova, pada perang asimetris dalam konteks structural ada dua hal yang perlu diperhatikan: *pertama*, pengaruh ideologi radikal yang dimiliki oleh suatu kelompok non-negara terhadap bentuk organisasinya; *kedua* adalah dasar asumsi bahwa semakin berbeda bentuk organisasi yang dijalankan oleh aktor non-negara akan semakin sulit aktor negara untuk menghadapinya.⁶⁸

⁶² Ekaterina Teranova, *Terrorism in Asymmetrical Conflict: Ideological and Structural Aspects* (New York: Oxford University Press, 2008), 20.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid., 21.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid., 51–52.

⁶⁸ Ibid.

Perang Asimetris Dan *Network Centric Warfare* di Afghanistan

Perang di Afghanistan antara AS dengan Taliban/Al-Qaeda, merupakan kondisi perang asimetris karena terdapat disparitas status aktor (aktor negara dengan aktor non-negara), kekuatan militer, kekuatan ekonomi, ideologi dan struktural. Untuk menjelaskan kondisi perang asimetris tersebut, akan dipaparkan situasi perang asimetris di Afghanistan dengan mendeskripsikan dua aktor utama selain dari AS, yaitu Al-Qaeda dan Taliban, peperangan utama (*major battles*) yang telah terjadi beserta dengan kemunculan kelompok pemberontak/perlawanan (*insurgents*) di Afghanistan implementasi dari doktrin "*network centric warfare*" dalam perang di Afghanistan dan kemudian akan dijelaskan mengenai disparitas ideologi dan struktural antara AS dengan Taliban/Al-Qaeda.

(1) Perang Asimetris di Afghanistan

Serangan 11 September 2001 oleh kelompok teroris Al-Qaeda ke gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat, menjadi latar belakang utama perang di Afghanistan. Serangan Al-Qaeda itu mengubah persepsi drastis AS atas ancaman, karena sebelumnya kemungkinan terjadinya serangan militer atau tindakan kekerasan (*use of force*) di wilayah/teritorial AS kemungkinannya dipersepsikan sangat kecil, dengan mempertimbangkan kemampuan daya tangkal (*deterrence*) yang tinggi, kecuali ketika pangkalan Pearl Harbour diserang Jepang pada Perang Dunia II. Setelah serangan Jepang tersebut, akhir tahun 1990-an hampir semua peperangan yang dilakukan AS terjadi diluar dari wilayah AS. Serangan 9/11 membuktikan bahwa wilayah internal AS tidak imun.⁶⁹

Perang AS di Afghanistan merupakan respon terhadap serangan 9/11 Al-Qaeda. Presiden Bush pada 7 Oktober 2001 menyatakan untuk memulai operasi militer di Afghanistan yang dinamakan sebagai *Operation Endurance Freedom* (OEF) dengan tujuan utama, menghancurkan pusat pelatihan dan militer Al-Qaeda yang dilindungi rezim Taliban di Afghanistan.⁷⁰ Tujuan strategis lainnya adalah menangkap pimpinan

⁶⁹ Colin McInnes, "A Different Kind of War? September 11 and the United States Afghan War," *Review of International Studies* 29, no. 2 (April 2003): 171.

⁷⁰ "Bush Announces Strikes Against Taliban," *The Washington Post.com*, 7 Oktober 2001, http://www.washingtonpost.com/wpsrv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_100801.htm.

utama Al-Qaeda, Osama Bin Laden dan menangkalkan kemampuan Al-Qaeda melakukan serangan kembali ke AS.⁷¹

AS berkepentingan menghancurkan Taliban, karena rezim yang dipimpin Mullah Muhammad Umar tersebut, melindungi dan mendukung gerakan Al-Qaeda. Taliban memindahkan Osama bin Laden dari persembunyian di Sudan ke Afghanistan.⁷² Dengan dukungan dan perlindungan dari Taliban, Al-Qaeda dan Osama Bin Laden mempunyai ruang bebas untuk membangun basis kekuatan gerakannya, termasuk juga untuk melatih dan merekrut anggota-anggota mereka.

Pada konteks kekuatan militer tentu antara AS dan Taliban ataupun Al-Qaeda, sama sekali tidak berimbang. Kekuatan tempur utama Taliban dan Al-Qaeda diestimasikan 125.000 orang, dan hanya 25.000 orang saja yang terlatih bertempur. Pelatihan tempur yang telah dijalani pasukan tersebut hanya berkaitan dengan persenjataan ringan (*light arms*), artileri, dan pelatihan dasar infanteri. Pasukan Taliban juga tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan peperangan gerilya.⁷³

Hingga 2002, estimasi jumlah pasukan darat AS yang digelar di Afghanistan 7.500 (terutama terdiri dari pasukan khusus, infanteri ringan dan pasukan lintas udara), yang didukung 570 armada udara dengan berbagai jenis unit tempur.⁷⁴ Dengan kekuatan seperti itu, pada fase awal serangan ke Afghanistan, AS banyak menggunakan serangan udara. Diestimasikan semenjak awal 2001 hingga awal 2002 telah digunakan 22.000 bom dalam area operasi seluas kurang lebih 250.000 mil².⁷⁵ Ketepatan serangan udara AS didukung oleh unit intelijen dan pasukan khusus yang memberikan petunjuk kepada target.⁷⁶

Strategi perang AS dalam OEF juga dilakukan dengan mendukung pasukan Aliansi Utara (*Northern Alliance*), yang melawan rezim Taliban. Aliansi Utara terdiri dari multi etnis non-Pashtun, yaitu Tajik, Uzbek, dan Hazaras.⁷⁷ AS memberikan dukungan berupa uang, persenjataan,

⁷¹ Brigid Myers Pavilonis, "Fighting the Irregular War in Afghanistan: Success in Combat; Struggles in Stabilization," in *The Routledge Handbook of War and Society*, ed. oleh Steven Carlton-Ford dan Morten G. Ender (New York: Routledge, 2011), 21.

⁷² Kenneth Katzman, "Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy," *Congressional Research Service*, 9 Oktober 2014, 5.

⁷³ Anthony H. Cordesman, *The Lessons of Afghanistan: Warfighting, Intelligence and Force Transformation* (Washington D.C: CSIS, 2002), 15.

⁷⁴ *Ibid.*, 9.

⁷⁵ *Ibid.*, 11.

⁷⁶ Donald H. Rumsfeld, "Transforming The Military," *Foreign Affairs* 81, no. 3 (Mei-Juni 2002): 20-32.

⁷⁷ "Who are the Northern Alliance," *BBC News*, 13 November 2001, http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1652187.stm.

dan berbagai perlengkapan perang lainnya.⁷⁸ Pertempuran-pertempuran awal pada OEF antara AS dengan Taliban serta Al-Qaeda dilakukan bersama dengan pasukan Aliansi Utara ini. Salah satu serangan udara paling besar pada fase awal OEF adalah pada 5 November 2001, ketika pesawat bom strategis (*strategic bombing*) B-52 *Stratofortress* membom di wilayah ibukota Afghanistan, Kabul untuk melemahkan markas pasukan Taliban di kota itu.⁷⁹

Serangan berikutnya adalah pertempuran Mazari Sharif (*Battle of Mazari Sharif*) pada 9 November 2001. Okupasi kota Mazari Sharif (terdapat di wilayah utara Afghanistan) menjadi penting bagi AS, karena di kota tersebut ada dua bandara udara dan akses jalan darat ke perbatasan Uzbekistan, sehingga dapat menghambat akses pergerakan pasukan Taliban dan Al-Qaeda, sekaligus menjadi markas dan pusat logistik pasukan AS di wilayah utara Afghanistan.⁸⁰ Sebanyak kurang lebih 300 pasukan Taliban, tewas dalam pertempuran ini.⁸¹

Hanya dalam waktu dua bulan semenjak dimulainya OEF, pada 7 Desember 2001 akhirnya pasukan Taliban meninggalkan basis terakhir mereka di Kandahar, sekaligus menandai berakhirnya rezim Taliban, sekalipun Mullah Omar tidak ditemukan di kota tersebut.⁸² Menurut Martin Ewans, ada beberapa yang memaksa Taliban cepat bertekuk lutut. *Pertama*, ketepatan serangan udara dari AS ke berbagai wilayah strategis yang sebelumnya di-kuasai oleh Taliban. *Kedua*, pendanaan dari AS untuk mendukung pasukan Aliansi Utara dan menyuap beberapa pemimpin Taliban untuk menyerah. *Ketiga*, kesalahan persepsi pemimpin Taliban yang mengira akan terjadi peperangan gerilya, tetapi yang terjadi justru peperangan terbuka konvensional. *Keempat*, Taliban tidak didukung intelijen Pakistan.⁸³

⁷⁸ Ewans, *Conflict in Afghanistan: Studies in Asymmetric Warfare*, 136.

⁷⁹ "Massive American Bombing on Taliban Frontlines," *Fox News*, 5 November 2001, <http://www.foxnews.com/story/2001/11/05/massive-american-bombing-on-taliban-front-lines/>.

⁸⁰ "The Battle for Mazar-i-Sharif," *The New York Times*, 10 November 2001, <http://www.nytimes.com/2001/11/10/opinion/the-battle-for-mazar-i-sharif.html>.

⁸¹ Carlotta Gall, "A Nation Challenged: Mazar-I-Sharif; A Deadly Siege At Last Won Mazar-i-Sharif," *The New York Times*, 19 November 2001, <http://www.nytimes.com/2001/11/19/world/a-nation-challenged-mazar-i-sharif-a-deadly-siege-at-last-won-mazar-i-sharif.html>.

⁸² David Rohde dan Norimitsu Onishi, "A Nation Challenged: Last Stronghold; Taliban Abandon Last Stronghold; Omar Is Not Found," *The New York Times*, 8 Desember 2001, <http://www.nytimes.com/2001/12/08/world/nation-challenged-last-stronghold-taliban-abandon-last-stronghold-omar-not-found.html>.

⁸³ Ewans, *Conflict in Afghanistan: Studies in Asymmetric Warfare*, 137.

Serangan besar juga dilakukan pasukan AS bersama mitra koalisi dan pasukan lokal ke wilayah pegunungan Tora Bora, yang diduga sebagai tempat persembunyian Osama bin Laden. Operasi ini bertujuan menghancurkan kekuatan Al-Qaeda dan menangkap Osama bin Laden. Sekalipun didukung pasukan khusus AS dan serangan udara, tetapi AS gagal untuk menangkap Osama bin Laden di pegunungan tersebut.⁸⁴

Pada Maret 2002 kembali terjadi pertempuran besar antara AS melawan Taliban dan Al Qaeda, yang dikenal sebagai operasi anakonda (*Operation Anaconda*) di wilayah perbukitan Shah-i-Kot. Operasi ini digelar setelah ada laporan intelijen AS yang mengindikasikan 150-250 pasukan Al-Qaeda di wilayah perbukitan tersebut.⁸⁵ Saat pasukan AS dari unit "*10th Mountain Division*" dan "*101st Airborne Division*" mulai bergerak ke wilayah Shah-i-Kot, pasukan Al-Qaeda diestimasi bertambah lebih besar sekitar 1000 pasukan.⁸⁶ Dalam operasi yang berlangsung dua pekan itu, diperkirakan 100-200 pasukan Al Qaeda tewas, sedangkan AS kehilangan 8 tentara.⁸⁷

Setelah pasukan Taliban mundur dari basis terakhir mereka di Kandahar, Hamid Karzai kemudian dilantik menjadi Presiden transisi Afghanistan pada 22 Desember 2001 menggantikan Presiden Burhanuddin Rabbani.⁸⁸ Setelah Karzai dilantik, AS memfokuskan diri melaksanakan pembangunan bangsa (*nation-building*) pasca perang dalam kerangka demokrasi dan stabilisasi kembali Afghanistan. AS bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga internasional lainnya, berusaha membangun kembali ekonomi Afghanistan.⁸⁹ Pada masa pemerintahan Obama, proses reformasi ini juga dilanjutkan agar Afghanistan tidak lagi menjadi tempat untuk berkembangnya organisasi terorisme.⁹⁰

Dalam proses reformasi tersebut, pemerintahan Afghanistan selalu mendapatkan tekanan dan gangguan keamanan dari ber-bagai kelompok

⁸⁴ Annie Lowrey, "How Osama bin Laden Escaped," *Foreign Policy*, 11 Desember 2009, http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/12/11/how_osama_bin_laden_escaped.

⁸⁵ Sean Naylor, "The Lessons of Anaconda," *The New York Times*, 2 Maret 2003, <http://www.nytimes.com/2003/03/02/opinion/the-lessons-of-anaconda.html>.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ "Operation Anaconda Costs 8 U.S. Lives," *CNN.com*, 4 Maret 2002, <http://edition.cnn.com/2002/WORLD/asiapcf/central/03/04/ret.afghan.fighting/index.html?related>.

⁸⁸ "Karzai Takes Power in Kabul," *BBC News*, 22 Desember 2001, http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1724641.stm.

⁸⁹ Katzman, "Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy," 9.

⁹⁰ Ibid., 12.

pemberontak/perlawanan (*insurgents*). Menurut Intelijen Pusat AS, kelompok *insurgents* itu melakukan aktivitas politik dan militer untuk menguasai sumber-sumber daya atau wilayah melalui peperangan yang tidak konvensional maupun konvensional dengan mencari dukungan masyarakat, sehingga dapat melemahkan pemerintahan Karzai.⁹¹ Beberapa kelompok perlawanan yang aktif melakukan perlawanan di Afghanistan adalah Taliban, Al-Qaeda, Faksi Hikmatyar, Faksi Haqqani, dan kelompok Pakistan/Pakistan Taliban. Mereka berhubungan/beraliansi secara tidak terikat antara satu dengan lainnya.⁹²

Fokus peperangan dan misi AS pasca rezim Taliban berubah menjadi mendukung dan memberikan keamanan kepada rezim baru dan masyarakatnya, melatih dan meningkatkan kapasitas militer Afghanistan, melakukan operasi anti kelompok perlawanan (*counter-insurgency*) dan anti terorisme (*counter terrorism*). Untuk itu pada masa Presiden Obama, AS berkomitmen menggelar pasukan hingga 100.000 pasukan dari berbagai angkatan pada 2011, yang secara gradual akan dikurangi pada 2012 menjadi 68.000 pasukan dan menjadi 38.000 pada 2014.⁹³

Menurut Seth G. Jones, munculnya kelompok perlawanan di Afghanistan bukan disebabkan oleh dendam atau ketidakpuasan (*grievences*) dari kelompok tertentu, bukan pula oleh keinginan untuk menguasai sumber-sumber daya tertentu yang menguntungkan secara ekonomi (*greed*),⁹⁴ tetapi karena faktor struktural dan ideologi.⁹⁵ Faktor strukturalnya adalah masih lemahnya pemerintahan/rezim baru pasca-Taliban yang belum mampu secara maksimal memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakatnya dan aktor-aktor keamanan Afghanistan belum mampu menciptakan kondisi aman.⁹⁶ Selain itu ada faktor ideologi yang mendorong para pemimpin kelompok-kelompok perlawanan di Afghanistan untuk menjatuhkan rezim Afghanistan pasca-Taliban untuk mengubahnya menjadi rezim Islam ekstrem berdasarkan interpretasi kelompok mereka.⁹⁷

⁹¹ Central Intelligence Agency, *Guide to the Analysis of Insurgency* (Washington D.C.: Central Intelligence Agency, 1980), 2.

⁹² *Ibid.*, 13-17.

⁹³ *Ibid.*, 19-20.

⁹⁴ Seth G. Jones, "The Rise of Afghanistan's Insurgency: State Failure and Jihad," *International Security* 32, no. 4 (2008): 8.

⁹⁵ *Ibid.*, 8-9.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*, 9.

(2) Implementasi NCW di Afghanistan

Untuk mendeskripsikan implementasi dari doktrin *network centric warfare* di Afghanistan, ditunjukkan berdasarkan tiga contoh kasus operasional yang dilakukan oleh AS, yakni: *pertama*, ketepatan pesawat pembom (*precision bomber*); *kedua*, operasi pasukan khusus AS di Afghanistan; dan *ketiga*, brigade tempur *Stryker*. Dalam ketiga contoh kasus tersebut, akan ditunjukkan implementasi utama dari doktrin NCW, yaitu penggunaan teknologi informasi secara maksimal yang menghasilkan kesadaran situasi (*situational awareness*) bersama, penyebaran informasi (*information sharing*) dan menghasilkan efektivitas misi.

Interkonektivitas dalam jejaring antar unit militer ditunjukkan pada “*Operation Enduring Freedom*” (OEF) salah satunya dengan jauhnya markas utama operasi dan wilayah operasi. Markas operasi OEF dipimpin oleh “*Central Command*” (CENTCOM)⁹⁸ yang pada saat itu terdapat di Florida, AS. Dari Florida tersebut CENTCOM mengkoordinasikan unit-unit militer lintas angkatan untuk melakukan serangan di Afghanistan.⁹⁹ Model operasi ini hanya dimungkinkan dengan memanfaatkan TI secara maksimal dengan organisasi terjejaring.

a) Ketepatan Pesawat Pembom (*Precision Bomber*)

Semenjak AS memulai serangan ke pasukan Taliban/Al-Qaeda di Afghanistan, Amerika secara masif menggunakan bom di berbagai wilayah strategis yang dikuasai Taliban/Al-Qaeda. Serangan di fase/awal OEF ke Kabul misalnya, bom ditembakkan dari misil kapal selam atau pesawat pembom strategis jenis B-52 Stratofortress.¹⁰⁰ Dengan dukungan dari pasukan khusus AS yang menunjukkan posisi, bom-bom tersebut dapat tepat mengenai sasaran.¹⁰¹ Untuk menandai target, pasukan khusus AS menggunakan teknologi yang disebut sebagai *Special Operation Forces Laser Acquisition Marker* (SOFLAM).¹⁰² Dengan SOFLAM, pasukan

⁹⁸ “About U.S. Central Command (CENTCOM),” *United States Central Command*, diakses 15 November 2014, <http://www.centcom.mil/en/about-centcom-en>.

⁹⁹ “Operation Enduring Freedom: An Assessment,” *Rand Corporation*, diakses 15 November 2014, http://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB9148/index1.html.

¹⁰⁰ “2001: US Launches Air Strikes Against Taliban,” *BBC*, 7 Oktober 2001, http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/october/7/newsid_2519000/2519353.stm.

¹⁰¹ Rumsfeld, “Transforming The Military,” 31.

¹⁰² “SOFLAM,” *Northrop Grumman*, diakses 15 November 2014, <http://www.northropgrumman.com/Capabilities/SOFLAM/Pages/default.aspx>.

khusus AS memberikan tanda dengan laser terhadap suatu target/sasaran, yang akan langsung dapat diketahui pesawat pembom, pesawat tempur, atau kapal selam yang dipersenjatai dengan bom atau misil laser (*laser guided bomb/missile*).

Dalam doktrin NCW, operasi serangan udara yang didukung pasukan khusus di darat ini, menunjukkan kesadaran situasi dan interkoneksi dalam jejaring unit perang lintas angkatan. Kedua kondisi itulah yang membedakan dengan model *combat air support* atau *air-land battle*. Kesadaran situasi dalam operasi ini, dibentuk dengan dukungan teknologi SOFLAM, sehingga antara unit pasukan khusus di darat dengan unit pesawat pembom/pesawat tempur atau unit kapal selam, mendapatkan informasi yang sama dalam waktu yang bersamaan mengenai target/sasaran yang akan dituju. Kesadaran ini berbuah efektivitas misi, sehingga tujuan operasi melalui serangan udara dapat tepat mengenai sasaran.

b) Operasi Pasukan Khusus

Pasukan khusus AS secara operasional tergabung dalam unit *United States Special Operations Command* (USSOCOM) yang terdiri dari pasukan lintas angkatan (darat, laut, marinir, dan udara).¹⁰³ Di dalamnya terdapat unit yang lebih kecil, *Joint Special Operations Command* (JSOC), dengan kemampuan khusus dan unik, seperti melakukan operasi anti-terorisme (*counter terrorism*) atau penyelamatan sandera (*hostage rescue*).¹⁰⁴

Dalam OEF ataupun operasi militer di Iraq, USSOCOM dan JSOC mereorganisasi menjadi organisasi yang terjejaring, untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan medan pertempuran non-konvensional, terutama dalam menghadapi Al-Qaeda.¹⁰⁵ Jejaring organisasi JSOC bertujuan untuk mencari, menangkap atau menetralkan anggota teroris. Dengan metode *F3EA Cycle* (*Find, Fix, Finish, Exploit, and Analyze*), pasukan khusus yang berjejaring dengan unit intelijen ini bertujuan untuk menemukan anggota teroris secara dinamis dan cepat.¹⁰⁶

¹⁰³ "About USSOCOM," *United States Special Operations Command*, diakses 15 November 2014, <http://www.socom.mil/Pages/AboutUSSOCOM.aspx>.

¹⁰⁴ Jennifer D. Kibbe, "The Rise of the Shadow Warriors," *Foreign Affairs* 83, no. 2 (Maret-April 2004): 110.

¹⁰⁵ Gideon Rose, "Generation Kill: A Conversation with Stanley McChrystal," *Foreign Affairs* 92, no. 2 (Maret-April 2013): 2.

¹⁰⁶ *Ibid.*

Pada perang di Afghanistan dan Iraq, JSOC juga mengembangkan doktrin NCW dan TI untuk dengan memaksimalkan penggunaan *Global Positioning Systems* (GPS), yang mempermudah mengetahui pergerakan pasukan dengan mudah dan tepat. AS juga menggunakan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) untuk melakukan fungsi pengintaian dan pengawasan (*reconnaissance and surveillance*) dari jarak jauh.¹⁰⁷ Pengintaian yang dilakukan pasukan khusus dengan menggunakan Predator, memperkecil resiko dan meningkatkan kemampuan kesadaran situasi, yang dapat meningkatkan efektivitas operasi.¹⁰⁸

c) **Brigade Tempur Stryker**

Pada 2009 AS menggelar salah satu unit militernya, yaitu "5th Stryker Brigade" yang terdiri dari 350 kendaraan Stryker,¹⁰⁹ yang merupakan kendaraan lapis baja dengan integrasi antara kemampuan teknologi informasi, sistem persenjataan (*gun system*), mobilitas dan infantri. Stryker mempunyai *art communications system* bernama *Force Battle Brigade & Below* (FBCB2) yang mempunyai jaringan komunikasi radio, GPS, *wireless communication*, dan koneksi komunikasi satelit. Kemampuan inilah yang mendukung *network centric operations*. Selain unggul pada aspek teknologi informasi, Stryker juga mempunyai sistem proteksi yang kuat, mampu mengatasi segala bentuk skenario di medan yang sulit yang berasal dari gerilyawan yang menerapkan strategi perang asimetris, khususnya dari penggunaan *Improvised Explosived Devices* (IED) dan *Rocket Propelled Grenade* (RPG) yang sering dipakai gerilyawan teroris di Afghanistan. Kendaraan lapis baja ini juga mampu bermanuver pada malam hari, karena dilengkapi dengan *thermal sight* dan *nightvision*.

Kemampuan Stryker paling signifikan pada konteks operasional adalah: (1) mempunyai kemampuan perlindungan cukup kuat dan memiliki kapabilitas serangan, (2) memiliki kemampuan mobilitas tinggi dan lebih cepat pergerakannya dibandingkan dengan kendaraan lapis baja lainnya yang lebih berat seperti tank;

¹⁰⁷ "Predator," *General Atomic Aeronautical*, diakses 15 November 2014, <http://www.ga-asi.com/products/aircraft/predator.php>.

¹⁰⁸ Rose, "Generation Kill: A Conversation with Stanley McChrystal," 3.

¹⁰⁹ Robert Haddick, "This Week at War: Why Don't Stryker Brigades Work in Afghanistan?," *Foreign Policy*, 6 November 2009, <https://foreignpolicy.com/2009/11/06/this-week-at-war-why-dont-stryker-brigades-work-in-afghanistan/>.

(3) terintegrasi dengan sistem teknologi informasi sesuai dengan doktrin *network centric warfare*. Dengan kapabilitas *network centric operation*, Stryker mempunyai kelebihan penyebaran dan kualitas informasi kepada seluruh unit Stryker dalam SCBT dan unit-unit infanteri. Dukungan TI juga membuat kolaborasi dan kerjasama antar unit menjadi lebih baik, yang pada akhirnya seluruh unit dalam SCBT dapat mempunyai kesadaran situasi (*situational awareness*) yang tinggi dan berimplikasi terhadap efektivitas misi yang dilakukan.¹¹⁰

Stryker yang berkapabilitas TI terintegrasi, maka doktrin *network centric-warfare/operations* yang didukung sistem komunikasi *Force Battle Brigade & Below* (FBCB2) dapat membangun interkoneksi antar semua unit SCBT atau unit militer AS lainnya yang terlibat di medan pertempuran. Kapabilitas ini dapat meningkatkan *situational awareness* seluruh unit dalam SCBT tentang kondisi dan situasi medan pertempuran. Pada akhirnya, hal ini dapat meningkatkan efektifitas misi operasi militer AS.

Disparitas Ideologi dalam Perang Asimetris di Afghanistan

Pada perang asimetris di Afghanistan, ideologi tidak hanya menjadi dasar bagi Taliban, Al-Qaeda dan kelompok-kelompok perlawanan lainnya di Afghanistan, tetapi juga bagi AS. Pernyataan perang terhadap terorisme global, adalah indikasi ideologi neo-konservatisme di AS.¹¹¹ Prinsip dasar neo-konservatisme adalah AS harus mempunyai militer kuat untuk melindungi identitasnya, berkomitmen untuk menyebarkan demokrasi ke seluruh dunia, terlibat secara aktif dan bertanggung jawab terhadap tatanan dunia, dan melawan aktor manapun (negara/ non-negara) yang menentang prinsip-prinsip AS tersebut.¹¹² Kebijakan perang melawan terorisme pasca 9/11 berdasarkan prinsip neo-konservatisme. Presiden George W. Bush saat mengawali perang terhadap terorisme global di New York pada acara wisuda akademi militer AS (West Point) pada 1 Juni 2002, yaitu:

“...a military that must be ready to strike at a moment’s notice in any dark corner of the world. And our security will require all Americans

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ David Hoogland Noon, “Cold War Revival: Neoconservatism and Historical Memory in the War on Terror,” *American Studies* 48, no. 3 (2007): 75.

¹¹² Ibid., 81.

to be forward-looking and resolute, to be ready for preemptive action when necessary to defend our liberty and to defend our lives.”¹¹³

Prinsip neo-konservatisme George W. Bush itu sering disebut sebagai “*Bush Doctrine*”, yang mengandung empat elemen utama, yaitu adanya rezim domestik yang mendeterminasikan politik luar negeri dan usaha untuk merubah politik internasional, ancaman hanya dapat diatasi dengan perang preventif (*preventive war*), dan jika memang diperlukan akan melakukan tindakan unilateral.¹¹⁴ Doktrin tersebut juga berorientasi untuk mempromosikan demokrasi, menyebarkan institusi politik liberal, dan nilai-nilai demokrasi ke negara-negara lain. Perang melawan terorisme, Perang Iraq dan Afghanistan, juga ditujukan sebagai usaha untuk mendemokratisasikan kedua negara tersebut.¹¹⁵ Bush Doctrine adalah bentuk operasionalisasi dari ide neokonservatisme yang mendefinisikan kepentingan nasional dan keamanan AS untuk mengekspansikan nilai-nilai/ideologi demokrasi dan liberalisme AS tersebut.¹¹⁶

Doktrin itu tidak hanya dirumuskan oleh George W. Bush, tetapi juga bersama dengan Wakil Presiden AS Richard Cheney, dan aktor-aktor lain yang juga terlibat dalam perumusan kebijakan keamanan luar negeri AS seperti Paul Wolfowitz, John Bolton, Kenneth Adelman, Paula Dobriansky, David Wurmser, dan Lewis Libby.¹¹⁷ Aktor domestik lainnya yang tidak menjadi bagian dari pemerintahan Bush, tetapi mempunyai kemampuan mempengaruhi opini publik adalah William Kristol (*The Weekly Standard*), Charles Krauthammer (*The Washington Post*), Elliot Cohen (*The Wall Street Journal*), dan Max Boot (*The Los Angeles Times*).¹¹⁸ Sedangkan aktor-aktor domestik dari kelompok akademisi/intelektual yang telah dikenal mempromosikan ide-ide neokonservatisme semenjak tahun 1990-an adalah Robert Kagan dan William Kristol.¹¹⁹

¹¹³ George W. Bush, “President Bush Delivers Graduation Speech at West Point,” *The White House President George W. Bush*, 1 Juni 2002, <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/06/print/20020601-3.html>.

¹¹⁴ Robert Jervis, “Understanding Bush Doctrine,” *Political Science Quarterly* 118, no. 3 (2003): 365.

¹¹⁵ Jonathan Monten, “The Roots of the Bush Doctrine: Power, Nationalism, and Democracy Promotion in US Strategy,” *International Security* 29, no. 4 (2005): 112.

¹¹⁶ *Ibid.*, 146.

¹¹⁷ Noon, “Cold War Revival: Neoconservatism and Historical Memory in the War on Terror,” 83.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Francis Fukuyama, *America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy* (USA: Yale University Press, 2006), 40–44.

Aktor-aktor domestik tersebut menjadi jejaring neokonservatisme (*neocons networks*) yang juga menjadi komunitas epistemik.¹²⁰ Ketika pasca serangan 9/11, jejaring neo-konservatisme berhasil membentuk (*framing*) pola pikir elit-elit di pemerintahan George W. Bush dengan interpretasi tentang sistem internasional, bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, nilai-nilai liberalisme dapat terancam, terutama pasca 9/11. Jejaring neokonservatisme juga berhasil untuk mendefinisikan kepentingan nasional AS pada masa itu, yaitu mempromosikan nilai dan sistem demokrasi ke seluruh dunia dan jika diperlukan dapat dilakukan dengan perang seperti pada Perang Afghanistan dan Irak.

Bagi AS, ideologi berfungsi untuk mempertahankan *status quo* AS sebagai hegemon dan negara berkekuatan besar (*great power*). Ideologi AS merupakan ideologi yang umum (*mainstream*) dan menjadi bagian dari pembentuk tatanan dunia saat ini.¹²¹ Perbedaan dengan kelompok terorisme adalah, Taliban dan Al-Qaeda menggunakan ideologi sebagai justifikasi tindakan politik dan kekerasannya dan anti terhadap sistem *status quo* saat ini.

Menurut Barak Mendelsohn, tindakan Taliban dan Al-Qaeda dapat mengancam sistem/tatanan internasional yang *status quo* dalam tiga hal. *Pertama*, kelompok kekerasan non-negara seperti Taliban dan Al-Qaeda menolak dan menentang prinsip dasar dari tatanan internasional saat ini, yaitu negara berdaulat adalah entitas politik utama di dunia internasional dan satu-satunya aktor yang terlegitimasi untuk menggunakan kekuatan kekerasan (*use of force*). *Kedua*, kelompok tersebut menantang negara berdaulat dengan cara menyangkal kemampuan dasar negara untuk melindungi warga negaranya dan memberikan jaminan keamanan melalui tindakan-tindakan penggunaan kekerasan yang berakibat masif. *Ketiga*, kelompok kekerasan non-negara dapat memprovokasi negara hegemon untuk melakukan tindakan yang berlebihan sehingga dapat berakibat pada instabilitas sistem internasional karena dapat mempengaruhi negara-negara lainnya atau negara hegemon itu sendiri.¹²²

Untuk dapat menjustifikasi tindakan kekerasan, mencapai tujuan politik dan dilakukan untuk mengorganisir kelompoknya, Al-Qaeda dan Taliban membutuhkan suatu bentuk ideologi. Al-Qaeda dan Taliban

¹²⁰ Maria Ryan, *Neoconservatism and the American Century* (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 51–70.

¹²¹ John Ikenberry, "Liberalism and Empire: Logics of Order in the American Unipolar Age," *Review of International Studies* 30, no. 4 (Oktober 2004): 609.

¹²² Barak Mendelsohn, "Sovereignty Under Attack," *Review of International Studies* 31, no. 1 (Januari 2005): 50–53.

memanipulasi dan membuat interpretasi subjektif dari agama Islam, agar dapat dijadikan ideologi yang komunikatif bagi kelompok mereka sebagai justifikasi. Kerangka narasi ideologi yang komunikatif ini menjadi penting bagi pemimpin-pemimpin kelompok mereka seperti pemimpin Al-Qaeda, yaitu Osama Bin Laden, seperti dinyatakan Bruce Hoffman bahwa:

“Religion’s importance in contemporary terrorism is as a means of communication. It really shows how religion is being twisted. Bin Laden himself does not have any theological credentials, yet he issues fatwa because he knows people will listen to them, that it is an enormously helpful means to enhance his message to attract new support – and truly is a perversion of religion. Now you do of course have clerical figures in Islam, in Judaism, in white supremacist Christian Churches in the United States, using liturgy to justify violence, including Bin Laden citing the Quran again, a perverse interpretation of it.”¹²³

Taliban juga menggunakan narasi ideologi Islam yang dimanipulasi untuk menjustifikasi aktivitas gerakan perlawanannya. Ideologi bagi Taliban juga mempunyai fungsi politik yang efektif. Di masa awal gerakan Taliban, ideologi agama Islam yang dimanipulasi dapat berguna untuk mendapatkan dukungan politik dari Pakistan. Dukungan yang diberikan oleh Pakistan berupa tempat penampungan anggota-anggota Taliban, dana dan persenjataan.¹²⁴ Fungsi politik lain dari narasi ideologi agama Islam yang dimanipulasi oleh Taliban adalah untuk membentuk tatanan kemasyarakatan dan politik di Afghanistan yang sedang tidak stabil akibat dari invasi Soviet dan perang antar faksi/suku-suku di Afghanistan.¹²⁵

Pemimpin Al-Qaeda dan Taliban akan lebih sulit mengkomunikasikan tujuan politik mereka secara abstrak kepada pengikut atau massa mereka tanpa ada suatu kerangka berpikir yang bisa dipahami dengan mudah. Dengan interpretasi subjektif dan memanipulasi agama Islam, tujuan-tujuan politik Al-Qaeda dan Taliban akan lebih mudah dikomunikasikan dalam bahasa keagamaan. Pesan-pesan politik dalam kerangka Islam yang diinterpretasikan subjektif tersebut, juga dapat mudah diko-

¹²³ Jean-Francois Mayer, “Religion and terrorism – Interview with Dr. Bruce Hoffman,” 21 November 2001, <https://english.religion.info/2002/02/22/religion-and-terrorism-interview-with-bruce-hoffman/>.

¹²⁴ Nasreen Akhtar, “Pakistan, Afghanistan, and the Taliban,” *International Journal on World Peace* 25, no. 4 (Desember 2008): 54–55.

¹²⁵ Stephen Tanner, *Afghanistan: A Military History from Alexander the Great to the Fall of Taliban* (USA: De Capo Press, 2002), 279.

munikasikan melalui berbagai jaringan keagamaan atau melalui internet untuk mendapatkan dukungan, mengorganisasikan, atau merekrut anggota baru.¹²⁶

Pada konteks di Afghanistan, kerangka narasi komunikasi tersebut signifikan karena pada umumnya masyarakatnya secara kultural lebih terbiasa dengan budaya berbicara (*oral traditions*) dibandingkan dengan budaya menulis/ membaca (*writing/literacy traditions*).¹²⁷ Dengan retorika komunikasi tepat, narasi ideologi dengan mudah dapat diterima masyarakat Afghanistan.

Selain untuk instrumen komunikasi, Islam juga dimanipulasi Al-Qaeda dan Taliban sebagai ideologi mereka untuk dapat menampung kekecewaan (*resentment*) sosial/ekonomi/politik dari individu atau kelompok melalui kerangka keagamaan yang telah dimanipulasi. Al-Qaeda juga membuktikan, cara ini dapat secara efektif mengumpulkan dukungan/rekrutmen anggota melintasi batas negara (transnasional). Al-Qaeda memperluas jaringannya di berbagai negara di luar dari Afghanistan atau Timur Tengah.¹²⁸

Pada konteks perang asimetris di Afghanistan antara AS melawan Al-Qaeda dan Taliban, kedua pihak memiliki fungsi ideologi yang berbeda. AS memfungsikan ideologi untuk mempertahankan *status quo* hegemoni di dalam sistem internasional sekaligus untuk menjaga sistem internasional itu sendiri. Sedangkan Al-Qaeda dan Taliban menempatkan ideologi sebagai anti *status quo* untuk melawan hegemoni AS dan sistem internasional yang ada. Perbedaan fungsi ideologi inilah yang menjadi disparitas antara AS dengan Al-Qaeda dan Taliban dalam perang Afghanistan ini.

Disparitas Struktural dalam Perang Asimetris di Afghanistan

Pada disparitas struktural, Taliban, Al-Qaeda dan kelompok-kelompok perlawanan lainnya di Afghanistan, menggunakan organisasi yang terjejaring. Organisasi terjejaring ini merupakan ciri khas dari organisasi terorisme internasional paska peristiwa 9/11. Sebelumnya organisasi terorisme lebih banyak mengorganisasikan kelompoknya dengan model

¹²⁶ Ekaterina Stepanova, *Terrorism in Asymmetrical Conflict: Ideological and Structural Aspects*, SIPRI Research Report No. 23 (New York: Oxford University Press, 2008), 69.

¹²⁷ Lutz Rzehak, "Remembering The Taliban," in *The Taliban and the Crisis of Afghanistan*, ed. oleh Robert D. Crews dan Amin Tarzi (USA: Harvard University Press, 2008), 187.

¹²⁸ *Ibid.*, 69-70.

yang hirarkis.¹²⁹ Dengan organisasi yang berjejaring memudahkan organisasi teroris seperti Al-Qaeda untuk melakukan operasi lintas negara.

Organisasi terjejaring juga membuat kelompok-kelompok perlawanan secara defensif menjadi sulit diidentifikasi dan dinetralisasi oleh pasukan AS. Antar anggota belum tentu dapat saling mengetahui identitas aslinya. Pada konteks rekrutment, setiap anggota jaringan, dapat merekrut anggota baru sehingga organisasi dapat terus berkembang dan sulit untuk dibubarkan.

Di dalam organisasi Al-Qaeda, anggota-anggotanya juga terdiri dari berbagai macam latar belakang pendidikan, etnis, negara, bangsa, ataupun status sosial.¹³⁰ Tingkat keragaman yang tinggi ini juga mempersulit dilawan dengan tindakan kontra-teror, terutama untuk pencegahan rekrutmen. Dengan anggota yang memiliki berbagai latar belakang kelas sosial, ekonomi, atau pendidikan tersebut, perluasan jaringan dan rekrutmen Al-Qaeda sulit diidentifikasi pola rekrutmentnya. Kapabilitas Al-Qaeda untuk melakukan perluasan jaringan dan rekrutmen dengan memanfaatkan keragaman anggotanya tersebut, juga berimplikasi pada cepatnya Al-Qaeda meregenerasi. Contohnya, bagaimana cepatnya Al-Qaeda merelokasi basis organisasinya dari Sudan, Pakistan dan ke Afghanistan.¹³¹

Pada konteks operasional, Al-Qaeda telah membuktikan efektifitas jejaring organisasinya ketika melakukan serangan 11 September. Ketidakmampuan intelijen AS untuk melakukan deteksi dini terhadap serangan tersebut membuktikan operasi tersebut berhasil dilakukan dengan melibatkan tim operasi global.

Kemampuan Al-Qaeda untuk dapat membangun infrastruktur organisasional dan operasional yang maju dibandingkan dengan kelompok teroris lainnya ini dibentuk ketika pengalaman Al-Qaeda melakukan perlawanan terhadap invasi Soviet di Afghanistan. Pada saat itu Al-Qaeda dilatih oleh AS, Arab Saudi, dan negara-negara Eropa.¹³²

Selain mempunyai organisasi jejaring internal, Al-Qaeda juga membangun jejaring koalisi dengan organisasi teroris yang mempunyai kesamaan ideologi. Pola koalisi yang dibangun sangat fleksibel dan masing-masing organisasi tetap independen dan otonom. Tetapi pada saat tertentu, terutama pada konteks strategis atau taktis Al-Qaeda bersama

¹²⁹ Stepanova, *Terrorism in Asymmetrical Conflict*, 101.

¹³⁰ Rohan Gunaratna, *Inside Al Qaeda: Global Network of Terror* (New York: Columbia University Press, 2002), 54.

¹³¹ Ibid.

¹³² Ibid.

jejaring koalisinya dapat melakukan operasi bersama dengan saling mendukung untuk logistik, persenjataan, finansial, ataupun personel.¹³³

Kelebihan lain dari organisasi berjejaring pada Al-Qaeda, Taliban, dan kelompok-kelompok perlawanan tersebut adalah pola desentralisasi. Dengan desentralisasi walaupun tetap ada tokoh/pemimpin yang menjadi simbol dan dominan (seperti Osama bin Laden pada Al-Qaeda atau Mullah Umar pada Taliban), tetapi pergerakan organisasi tidak hanya bergantung pada satu atau dua pemimpin. Kepemimpinan dalam organisasi teroris/kelompok perlawanan telah tersebar, sehingga ketika salah satu pemimpin telah ditangkap atau dinetralisasi pergerakan organisasi dapat tetap berjalan.

Brian A. Jackson menjelaskan tiga tipologi otoritas/kontrol di dalam organisasi teroris seperti Al-Qaeda, yaitu kontrol strategis dilakukan oleh pemimpin utama yang mendefinisikan dan membentuk perspektif mengenai suatu tujuan strategis yang ingin dicapai. Pada konteks Al-Qaeda yang memiliki kontrol strategis adalah Osama bin Laden. Kedua adalah kontrol operasional, adalah anggota organisasi yang mempunyai kemampuan untuk merencanakan dan mengimplementasikan operasi untuk mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditentukan. Dan ketiga adalah kontrol taktis, yaitu kemampuan dari anggota organisasi untuk melakukan aktifitas keseharian organisasi.¹³⁴



Gambar Tipologi otoritas/kontrol dalam organisasi teroris (Al-Qaeda)

¹³³ Ibid., 57.

¹³⁴ Brian A. Jackson, "Groups, Networks, or Movements: A Command and Control-Driven Approach to Classifying Terrorist Organizations and Its Application to Al-Qaeda," *Studies in Conflict & Terrorism* 29, no. 3 (2006): 244.

Ketiga bentuk otoritas di dalam Al-Qaeda tersebut membentuk jejaring organisasi yang fleksibel dan adaptif, tetapi bergerak berdasarkan tujuan strategis yang telah ditentukan oleh pemimpinnya pada kontrol strategis.

Pemimpin pada kontrol strategis dengan pola hubungan jejaring dan komunikasi yang kuat dapat mempengaruhi tiga level sekaligus, yaitu strategis, operasional dan taktis.¹³⁵ Para pemimpin di level strategis tidak selalu melakukan kontak langsung dengan anggota organisasinya, tetapi bisa mengkomunikasikan visi strategisnya melalui media komunikasi (internet, televisi, ataupun pamflet). Hanya anggota di level taktis yang akan lebih sering melakukan kontak langsung karena membutuhkan koordinasi secara rutin.¹³⁶

Menurut Bruce Hoffman Al-Qaeda memiliki empat level operasional, yaitu level pertama terdiri dari kader-kader profesional yang mempunyai kemampuan untuk merencanakan dan melakukan serangan-serangan terorisme.²²⁴ Kader-kader profesional ini juga menjadi penghubung (hub) utama dalam jejaring Al-Qaeda selain dari pemimpin-pemimpin utamanya seperti Osama bin Laden.²²⁵ Level operasional kedua terdiri dari anggota-anggota amatir yang terlatih dan fungsi utamanya sebagai eksekutor serangan teror. Level ketiga, yaitu kelompok lokal yang sebelumnya tidak terintegrasi menjadi anggota Al-Qaeda tetapi mempunyai inisiatif untuk melakukan teror dan meminta dukungan dana kepada Osama bin Laden. Dan level operasional terakhir adalah kelompok perlawanan, gerilya, atau teroris lainnya yang telah mempunyai hubungan atau menerima dukungan dari Al-Qaeda atau Osama bin Laden. Kelompok-kelompok diluar Al-Qaeda ini tidak hanya meluaskan jejaringnya tetapi secara operasional dapat menjadi pendukung logistik.¹³⁷

Pada konteks Taliban jaringan kesukuan Pashtun yang telah dibangun selama bertahun-tahun terbukti juga berhasil untuk menjadi faktor ketahanan Taliban walaupun rezim pemerintahannya telah dijatuhkan dan pasukannya telah dipukul mundur dari wilayah-wilayah utama di Afghanistan seperti dari Kandahar dengan model organisasi yang berjejaring tersebut menunjukkan pengorganisasian yang berbeda

¹³⁵ *Ibid.*, 243.

¹³⁶ *Ibid.*, 245.

¹³⁷ Bruce Hoffman, "Lessons of 9/11," Committee Record the United States Joint September 11, 2001 Inquiry Staff of the House and Senate Select Committees on Intelligence (RAND, Oktober 2002).

dengan militer AS sehingga pada konteks struktural ini terjadi disparitas antara Taliban dan Al-Qaeda dengan AS.

Organisasi militer AS tetap memiliki pola organisasi militer pada umumnya yang hirarkis yang didasarkan pada komando dan kontrol. Tetapi dengan doktrin *network centric warfare*, cara berperang tentara AS dilakukan dengan berjejaring dan memaksimalkan teknologi informasi.

Untuk menghadapi jaringan organisasi Al-Qaeda, Taliban atau kelompok-kelompok perlawanan lainnya di Afghanistan, dengan doktrin *network centric warfare* pasukan AS secara efektif mampu melakukan operasi bersama (*jointness operation*) lintas angkatan secara berjejaring dengan tingkat kesadaran situasi (*situational awareness*) yang tinggi (seperti dalam operasi pemboman atau operasi pasukan khusus). Cara berperang ini telah terbukti berhasil/efektif di masa awal OEF, dengan hanya dalam waktu beberapa bulan dapat membuat pasukan Taliban dan Al-Qaeda mundur dari basis-basis utama mereka dan menjatuhkan dari rezim kekuasaan mereka di Afghanistan.

Kesuksesan operasi militer pasukan AS dengan doktrin "*network centric warfare*" tersebut belum dapat menetralisasi organisasi Taliban, Al-Qaeda, atau kelompok perlawanan lainnya. Hal ini terbukti dengan masih berlanjutnya perlawanan dari kelompok-kelompok tersebut hingga saat ini di Afghanistan. Bagi pasukan AS dengan "*network centric warfare*" berhasil untuk meningkatkan efektivitas dan kecepatan operasi peperangan. Sedangkan bagi Al-Qaeda, Taliban, dan kelompok-kelompok perlawanan lainnya organisasi yang berjejaring yang dibangun oleh mereka terbukti berhasil untuk memperkuat ketahanan (*resilient*) organisasi mereka, hal ini terbukti dengan belum adanya organisasi-organisasi perlawanan di Afghanistan yang berhasil dinetralsir secara utuh oleh AS.

Dalam perang asimetris di Afghanistan juga terjadi disparitas struktural, yaitu cara pengorganisasian anggota kelompok dan cara mengorganisasikan kekuatan militernya. AS sebagai aktor negara dan hegemon, mempunyai organisasi militer yang baik (*established*), profesional, dan tersebar hampir di seluruh dunia. Sedangkan Al-Qaeda dan Taliban, merupakan aktor non-negara yang mengorganisir dengan cara dan sumber (*resources*) yang terbatas. Dengan sumber terbatas tersebut, pengorganisasian dilakukan dengan cara organisasi jejaring. Al-Qaeda memanfaatkan organisasi jejaringnya untuk meluaskan aktivitasnya melintasi batas-batas negara.¹³⁸ Kelebihan lain dari organisasi

¹³⁸ Ibid., 108.

berjejaring Al-Qaeda adalah mudahnya penyebaran informasi diantara sel atau nodulus (*nodes*) didalam jejaringnya dan juga fleksibilitas untuk membangun interkoneksi.¹³⁹

Menurut Robert J. Bunker dan Matt Begert, pada konteks operasi militer, organisasi jejaring Al-Qaeda dapat dioperasionalkan dalam kecepatan, ofensif, dan defensif.¹⁴⁰ Kecepatan yang bisa dimaksimalkan adalah peningkatan kemampuan penyebaran informasi. Hal ini dimungkinkan karena sumber-sumber informasi dapat diakses berbagai sel dan nodulus yang tersedia dan tidak terhambat hirarki birokrasi. Peningkatan kecepatan penyebaran informasi itu berimplikasi kepada ketepatan untuk mengetahui situasi taktis ataupun strategis yang dibutuhkan dalam peperangan. Organisasi jejaring juga memungkinkan para anggota Al-Qaeda melakukan banyak pekerjaan dalam waktu yang bersamaan (*multi-tasking*) dalam proses yang paralel.¹⁴¹

Dalam operasional ofensif, organisasi jejaring Al-Qaeda mampu melakukan serangan berkerumun (*swarming capability*), yaitu serangan konvergen yang dilakukan lima unit atau lebih pada satu target di wilayah spesifik. Al-Qaeda pernah mendemonstrasikan kemampuan ini di pertempuran Fallujah pada 31 Maret 2004.¹⁴² Sedangkan pada operasional defensif, Al-Qaeda mampu melindungi setiap anggota yang termasuk kedalam organisasi jejaringnya. Setiap sel atau nodulus dapat menyembunyikan identitas aslinya, ketika berhubungan dengan sel lainnya. Mungkin juga seluruh organisasi Al-Qaeda tidak mengenal satu dengan lainnya, tetapi tetap dapat terhubung secara berjejaring. Cara ini juga membuat para anggota Al-Qaeda sulit untuk diidentifikasi atau dideteksi, ini berbeda dalam peperangan konvensional dimana unit pasukan dapat lebih mudah diketahui posisinya di medan pertempuran. Kelebihan defensif lainnya adalah organisasi jejaring tidak bergantung hanya pada satu pimpinan, karena telah terdesentralisasi. Ketika salah satu pemimpin Al-Qaeda tertangkap atau terbunuh dalam perang, masih ada pemimpin lainnya yang dapat bergerak menjalankan organisasi.¹⁴³

Taliban juga membangun organisasinya dengan gerakan jejaring kesukuan (*tribal network movement*) di Afghanistan. Para anggota Taliban dan juga pemimpinnya didominasi suku Ghilzai Pashtun yang tersebar

¹³⁹ Robert J. Bunker dan Matt Begert, "Operational Combat Analysis of the Al-Qaeda Network," *Low Intensity Conflict & Law Enforcement* 11 (2002): 316.

¹⁴⁰ *Ibid.*, 321.

¹⁴¹ *Ibid.*, 321-25.

¹⁴² *Ibid.*, 325-26.

¹⁴³ *Ibid.*, 328-30.

di provinsi Oruzgan, Zabol, Dai Kundi, Gardez, dan Paktika.¹⁴⁴ Jejaring kesukuan ini efektif bagi Taliban untuk mendapatkan kekuasaan di Afghanistan sebelum invasi AS, yang juga dapat untuk mobilisasi sosial saat melawan rezim demokratis Afghanistan dan AS.

Kesimpulan

Untuk Taliban, Al-Qaeda, ataupun kelompok-kelompok perlawanan lainnya di Afghanistan, ideologi diperlukan sebagai instrumen komunikasi dan justifikasi motif (cause) untuk tetap melakukan perlawanan secara konsisten di Afghanistan. Selain itu, narasi komunikasi ideologis dengan memanipulasi agama Islam tetap terus digunakan dalam propaganda kelompok-kelompok perlawanan tersebut untuk tetap mendapatkan dukungan populasi ataupun merekrut anggota-anggota baru. Bahkan beberapa bom bunuh diri yang dilakukan oleh anggota jaringan Al-Qaeda terjadi diluar dari wilayah Afghanistan (di Indonesia salah satunya) dengan justifikasi narasi ideologis agama Islam.

Ideologi juga berfungsi politis bagi Taliban untuk mendapatkan dukungan dari Pakistan serta kelompok-kelompok radikal lainnya. Hal ini juga yang dapat menjelaskan hubungan erat antara Taliban dan Al-Qaeda karena menggunakan narasi ideologis yang serupa. Secara internal di Afghanistan, narasi ideologi oleh Taliban juga digunakan untuk mendapatkan dukungan dari populasi Afghanistan pada umumnya dan merekrut anggota untuk terlibat dalam melakukan perlawanan.

AS dalam perang di Afghanistan belum berhasil untuk menetralisasi determinasi ideologis dari kelompok-kelompok perlawanan dan terorisme tersebut. Doktrin "*network centric warfare*" baru hanya dapat berfungsi dan efektif dalam operasi militer. Semua fungsi utama dalam doktrin "*network centric warfare*", yaitu peningkatkan kesadaran situasi, jejaring unit militer lintas angkatan, penyebaran informasi yang tidak hirarkis dirancang hanya untuk menghadapi pertempuran militer/fisik.

Perang asimetris di Afghanistan menunjukkan bahwa kondisi peperangan menuntut militer untuk siap menghadapi permasalahan-permasalahan yang selama ini dianggap tidak berkaitan dengan medan pertempuran, seperti politik dan ideologi. Ketidakpastian (*uncertainty*) dan resiko peperangan tidak hanya terjadi dalam medan pertempuran tetapi

¹⁴⁴ Thomas H. Johnson dan M. Chris Mason, "Understanding the Taliban and Insurgency in Afghanistan," *Orbis* 51, no. 1 (2007): 76.

dalam perang di Afghanistan juga dalam aspek lain yang ternyata menjadi signifikan, yaitu ideologi.

Disparitas antara AS dengan Taliban atau Al-Qaeda juga terjadi pada konteks ideologi dan struktural. Pada konteks ideologi, dengan memanipulasi agama Islam oleh Taliban/Al-Qaeda berhasil menjustifikasi tindakan mereka melawan hegemoni AS. Narasi dari agama Islam yang dimanipulasi dapat efektif sebagai instrumen komunikasi untuk merekrut anggota dan sebagai justifikasi (*cause*) bertahan dan serta tetap melakukan perlawanan.

Pada konteks struktural, pola organisasi berjejaring Taliban/Al-Qaeda terbukti berhasil membuat ketahanan (*resilient*) perlawanan mereka. Tidak ternetralisasinya Taliban di Afghanistan, walaupun rezim pemerintahannya berhasil dijatuhkan, adalah buktinya. Ketahanan organisasi berjejaring Al-Qaeda dibuktikan ketika Osama berhasil dine-trelisasi pasukan khusus AS, tetapi ini tidak membuat perlawanan Al-Qaeda berhenti atau hancur secara organisasi.

Pola organisasi berjejaring kelompok-kelompok perlawanan/teroris berbentuk struktur terdesentralisasi dan terdiri dari jejaring teknis, sosial, organisasi, fungsional, dan strategis. Hubungan antar jejaring dapat bergerak secara dinamis dan beradaptasi secara fleksibel terhadap lingkungan atau situasi medan pertempuran. Tidak seperti dalam organisasi yang hirarkis, pola terdesentralisasi Al-Qaeda membuat setiap anggota jejaring kelompok-kelompok perlawanan/teroris di Afghanistan, dapat bergerak otonom tanpa harus selalu bergantung kepada pemimpin.¹⁴⁵

Untuk mengatasi disparitas ideologi dan struktur pada perang asimetris di Afghanistan, AS perlu untuk mengembangkan lebih lanjut doktrin NCW, salah satunya dengan memaksimalkan operasi intelijen kultural (*cultural intelligence operation*). Hal itu dapat meningkatkan kesadaran situasi (*situational awareness*) lebih dari situasi di medan pertempuran, yaitu meningkatkan kesadaran situasi kultural di suatu wilayah pertempuran terutama yang berkaitan dengan aspek ideologi dan politik. Dalam lingkungan peperangan asimetris di Afghanistan, budayanya sangat berbeda dengan kultur pasukan AS yang bertempur di sana. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman kultural secara mendalam, sehingga dapat menentukan pendekatan yang terbaik kepada populasi di Afghanistan.

¹⁴⁵ Wayne Michael Hall dan Gary Citrenbaum, *Intelligence Analysis: How to Think in Complex Environments* (USA: Praeger Security International, 2010), 14.

Operasi intelijen kultural ditujukan untuk mengetahui secara mendalam struktur sosial, politik, kebiasaan, norma, adat/tradisi, dan juga bahasa dari populasi lokal di wilayah medan pertempuran. Pemahaman mendalam bisa didapat dengan mengembangkan studi antropologis, etnografi, dan analisis jejaring sosial dalam analisis intelijen. Pada konteks perang asimetris, pemahaman kultural penting bagi prajurit AS hingga tingkat pengambil kebijakan atau level strategis, untuk mendapatkan dukungan dari populasi lokal. Pentingnya intelijen kultural ini dinyatakan oleh David Petraeus bahwa:

“Cultural awareness is a force multiplier, reflects our recognition that knowledge of the cultural “terrain” can be as important as, and sometimes even more important of the geographic terrain. This observation acknowledges that the people are, in many respects, the decisive terrain, and that we must study that terrain in the same way that we have always studied the geographic terrain. Working in another culture is enormously difficult if one doesn’t understand the ethnic groups, tribes, religious elements, political parties, and other social groupings.”¹⁴⁶

Menurut Wayne Michael Hall dan Gary Citrenbaum yang dimaksud sebagai intelijen kultural adalah mengetahui suatu kultur tertentu, masyarakatnya, dan pola perilaku/kebiasaan dari tradisi dan membentuk sikap, norma serta kondisi sosial.¹⁴⁷ Untuk mendapatkan gambaran utuh dari suatu kultur, aktivitas intelijen kultural adalah melakukan dekomposisi dan mendapatkan pengetahuan/informasi kultur secara detail tentang elemen-elemen dari kultur tersebut dan pengaruhnya terhadap persepsi masyarakatnya untuk berperilaku sehari-hari, berinteraksi, cara berpikir, dan juga cara/pola dalam pengambilan keputusan.¹⁴⁸

Intelijen kultural juga perlu mengetahui pengaruh suatu kultur dalam membentuk pola organisasi pada suatu masyarakat yang berimplikasi pada relasi di dalam struktur politik, hukum, militer, ekonomi, keamanan, diplomasi dan sistem ekonomi.¹⁴⁹

Untuk dapat melakukan operasi intelijen kultural yang efektif sehingga dapat menghasilkan informasi kultural yang akurat tidak hanya cukup dengan melakukan observasi, walaupun bentuk observasi yang

¹⁴⁶ David H. Petraeus, “Learning Counterinsurgency: Observations from Soldiering in Iraq,” *Military Review*, Januari-Februari 2004, 8.

¹⁴⁷ Hall dan Citrenbaum, *Intelligence Analysis: How to Think in Complex Environments*, 235.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*, 236.

dilakukan adalah observasi partisipatoris. Terutama jika observasi partisipatoris tersebut dilakukan oleh orang-orang yang asing di suatu wilayah masyarakat kemungkinan besar masih akan terdapat jarak dengan kultur aslinya.

Intelijen kultural juga dapat berguna sebagai dasar untuk melakukan analisis semiotika ideologi dari kelompok-kelompok perlawanan atau teroris. Analisis semiotika adalah proses untuk menjelaskan tanda, simbol, gambar, atau kata-kata yang penting dan menjadi kunci dalam interaksi kultural suatu masyarakat.¹⁵⁰ Dengan intelijen kultural dan analisis semiotika dapat diketahui simbol, kata-kata kunci, ataupun juga tanda dari agama Islam yang penting sehingga dapat menjadi suatu bentuk pola komunikasi untuk mencegah dan dapat melawan (*countering*) narasi ideologi agama Islam yang telah dimanipulasi oleh kelompok-kelompok perlawanan/teroris di Afghanistan. Jika penggunaan kata atau simbol yang digunakan tepat untuk melawan narasi ideologi Al-Qaeda, maka populasi di Timur Tengah atau populasi yang beragama Islam diluar dari Timur Tengah tidak dapat dengan mudah bersimpati kepada Al-Qaeda atau kelompok-kelompok perlawanan di Afghanistan.

Perlawanan (*counter*) naratif dengan intelijen kultural dan analisis semiotika ini juga dapat menjadi cara untuk membatasi pergerakan Al-Qaeda, Taliban, atau kelompok-kelompok perlawanan lainnya yang menggunakan narasi ideologis agama Islam yang telah dimanipulasi tersebut untuk merekrut anggota-anggota baru ataupun menyebarkan jaringnya. Tindakan ini secara strategis dapat menjadi strategi pengekangan (*containment strategy*) dengan cara kultural.

Untuk mengatasi disparitas struktural pada perang asimetris di Afghanistan, operasi intelijen kultural dapat berfungsi untuk mengetahui pola interaksi kultural antara kelompok-kelompok perlawanan/teroris di Afghanistan dengan masyarakat/populasi local sehingga dapat berbaur, inklusif, dan menyatu (*embeddedness*) secara kultural. Marc Sageman menjelaskan bahwa:

“The term *embeddedness* refers to the rich nexus of social and economic linkages between members of an organization and its environment. Being embedded in society encourages trust in ongoing interactions.”¹⁵¹

¹⁵⁰ Ibid., 242.

¹⁵¹ Marc Sageman, *Understanding Terror Networks* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004), 146.

Dalam melakukan operasinya, jaringan kelompok-kelompok perlawanan/terorisme di Afghanistan seringkali berusaha untuk membaaur dan inklusif secara kultural dengan populasi/masyarakat local atau lingkungan kulturalnya. Cara ini menjadi efektif secara operasional untuk melindungi pergerakan dari jejaring organisasi kelompok perlawanan/terorisme tersebut karena menjadi sulit untuk diidentifikasi. Untuk dapat menjadi inklusif dengan lingkungan kultural populasi/masyarakat lokal anggota-anggota dari jejaring kelompok perlawanan/terorisme tersebut berusaha untuk mengikuti perilaku, bahasa, kebiasaan, norma, nilai atau bahkan cara berpakaian yang telah berlaku pada kultur suatu masyarakat lokal tersebut.

Sebagai contoh, pada konteks Taliban di masa-masa awal pergerakan Taliban untuk menguasai wilayah-wilayah di Afghanistan, mereka berusaha untuk inklusif dengan kelompok Pashtun yang mendominasi di wilayah Selatan Afghanistan. Dukungan yang didapat oleh Taliban dari kelompok Pashtun dianggap menjadi salah satu faktor yang dapat membuat Taliban menjadi rezim berkuasa di Afghanistan pada akhir tahun 1990-an. Di dalam kelompok Pashtun terdapat etika yang disebut sebagai *Pashtun-Wali* yang berakar dari tradisi kelompok Pashtun. *Pashtun Wali* adalah etika dari kelompok Pashtun untuk melindungi dan mendukung suku/kelompok/individu lain yang telah dianggap sesuai atau diterima di dalam kelompok Pashtun. Taliban tidak hanya mendapatkan dukungan populasi dari Pashtun, tetapi juga dukungan operasional seperti penggunaan wilayahnya sebagai basis Taliban, jalur logistik, dan tambahan pasukan. Inklusifitas Taliban dengan kelompok Pashtun ini menjadi salah satu faktor kultural yang membuat jaringan organisasi Taliban mempunyai ketahanan yang kuat.

Inklusifitas jejaring organisasi kelompok perlawanan/teroris dengan masyarakat/populasi lokal seperti juga dilakukan oleh Al-Qaeda. Pengalaman Osama ketika membantu kelompok-kelompok perlawanan di Afghanistan untuk berperang melawan Soviet pada tahun 1980-an, membuat Osama teah mengetahui dengan baik lingkungan dan kondisi kultural di Afghanistan dengan baik. Ketika Osama dan Al-Qaeda pada tahun 1990-an merelokasi basis jejaring organisasinya dari Sudan ke Afghanistan, dengan mudah Osama dapat berbaur dan menjadi inklusif dengan populasi lokal.

Pergerakan jejaring terorisme Al-Qaeda sulit untuk diidentifikasi karena jejaringnya telah berbaur secara inklusif dengan populasi lokal. Contoh lain dari Al-Qaeda adalah taktik Osama untuk bersembunyi di Pakistan pada tahun 2000-an. Selama bersembunyi di Pakistan, Osama

tinggal dan berbaur dengan populasi lokal. Osama berusaha untuk mengikuti pola interaksi kultural, kebiasaan, norma, dan nilai masyarakat Pakistan yang sebelumnya telah dikenalnya. Dengan inklusifitas Osama terhadap masyarakat lokal Pakistan, membuat Osama sulit untuk diketahui dan diidentifikasi tempat persembunyiannya. Setidaknya membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun, semenjak dilakukannya perang global melawan terorisme oleh AS, hingga dapat menetralkan Osama.

Inklusifitas jejaring kelompok-kelompok perlawanan dengan jejaring kultural lokal menjadi salah satu faktor yang membuat ketahanan (resilience) jejaring kelompok perlawanan/terorisme di Afghanistan menjadi kuat. Disparitas struktural pada perang asimetris di Afghanistan ini dapat diatasi dengan intelijen kultural, karena peningkatan kesadaran terhadap situasi lingkungan kultural dapat mengetahui pola-pola kultural yang anomali, yaitu perilaku-perilaku di luar dari kebiasaan keseharian yang tiba-tiba muncul dari individu/kelompok di dalam suatu masyarakat/populasi lokal. Dengan kesadaran situasi lingkungan kultural ini, ketika jejaring kelompok-kelompok perlawanan/terorisme berusaha untuk menjadi inklusif dengan kultur masyarakat lokal dapat segera untuk diidentifikasi.

Selain untuk mengetahui anomali dari pola kultural masyarakat lokal tersebut, peningkatan kesadaran lingkungan kultural untuk mengatasi disparitas struktural pada perang asimetris di Afghanistan dapat berfungsi juga untuk mengetahui profil kultural yang mungkin dapat dibentuk atau dilakukan oleh jejaring organisasi kelompok-kelompok perlawanan/terorisme. Profil kultural tersebut terdiri misalnya dari kebiasaan cara berpakaian, cara berbahasa atau berkomunikasi, atau juga cara berinteraksi. Kelompok-kelompok perlawanan/teroris di Afghanistan seringkali menyamakan jejaring organisasinya dengan cara menyesuaikan profil anggotanya dengan kebiasaan keseharian kultural masyarakat lokal sehingga dapat inklusif dan menjadi sulit untuk diidentifikasi. Dengan intelijen kultural yang dapat meningkatkan kesadaran lingkungan kultural dapat mendeteksi dan juga mencegah berbaurnya atau menjadi inklusifnya kelompok-kelompok perlawanan/teroris dengan masyarakat lokal dengan cara mengetahui secara detail profil kebiasaan kultural sehari-hari.

Situasi kultural di Afghanistan sangat kompleks, karena masyarakatnya terdiri dari multi-etnis, beragam suku dan beragam aliran/faksi agama (terutama dari agama Islam) yang mempunyai norma serta nilai yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini juga yang menyebabkan terjadinya disparitas ideologi antara AS dengan kelompok-kelom-

pok perlawanan di Afghanistan dan juga populasi Afghanistan pada umumnya.

Kondisi situasi yang kompleks dalam medan pertempuran tersebut secara umum dijelaskan oleh Wayne Michael Hall dan Gary Citrenbaum bahwa, pertama situasi yang kompleks menunjukkan bahwa perilaku masyarakat, pasukan, dan lingkungan peperangan terjadi secara tidak linear sehingga sangat sulit untuk diprediksi. Kedua aktivitas/kejadian yang kecil atau sederhana dapat berimplikasi dan berpengaruh kepada kejadian yang lebih besar. Ketiga, lingkungan pertempuran yang kompleks merupakan lingkungan yang tidak teratur (*chaos/disorder*) karena intensifikasi relasi dari berbagai hal seperti organisasi, pasukan, mesin pertempuran, kultur, masyarakat, ataupun agama sehingga dapat terjadi perubahan situasi secara mendadak dan tidak terduga.¹⁵²

Pada konteks perang asimetris, perang AS di Afghanistan menunjukkan bahwa dinamika peperangan yang terjadi dalam peperangan asimetris sangatlah kontekstual. Perang asimetris antara AS dengan Vietnam misalnya sangat berbeda dengan perang di Afghanistan. Perbedaan konteks yang paling mendasar dari setiap peperangan asimetris adalah aktor dan kondisi kultural.

Daftar Pustaka

- "2001: US Launches Air Strikes Against Taliban." *BBC*, 7 Oktober 2001. http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/october/7/newsid_2519000/2519353.stm.
- "About U.S. Central Command (CENTCOM)." *United States Central Command*. Diakses 15 November 2014. <http://www.centcom.mil/en/about-centcom-en>.
- "About USSOCOM." *United States Special Operations Command*. Diakses 15 November 2014. <http://www.socom.mil/Pages/AboutUSSOCOM.aspx>.
- Akhtar, Nasreen. "Pakistan, Afghanistan, and the Taliban." *International Journal on World Peace* 25, no. 4 (Desember 2008): 49-73.
- Alberts, David S., John J. Gartska, dan Frederick P. Stein. *Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority*. US: CCRP, 2000.

¹⁵² Hall dan Citrenbaum, *Intelligence Analysis: How to Think in Complex Environments*, 10.

- Arreguin-Toft, Ivan. *How the Weak Wins Wars: A Theory of Asymmetric Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Barfield, Thomas. "Ulasan tentang Conflict in Afghanistan: Studies in Asymmetric Warfare, Martin Ewans." *International Journal of Middle East Studies* 39, no. 3 (Agustus 2007): 494–97.
- Bennet, Andrew. "Case Study Method: Design, Use, and Comparative Advantages." In *Models, Numbers, and Cases: Methods for Studying International Relations*, diedit oleh Detlef F. Sprinz dan Yael Wolinsky-Nahmias, 19–55. USA: The University of Michigan Press, 2004.
- Bunker, Robert J., dan Matt Begert. "Operational Combat Analysis of the Al-Qaeda Network." *Low Intensity Conflict & Law Enforcement* 11 (2002): 316–39.
- "Bush Announces Strikes Against Taliban." *The Washington Post.com*, 7 Oktober 2001. http://www.washingtonpost.com/wpsrv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_100801.htm.
- Bush, George W. "President Bush Delivers Graduation Speech at West Point." *The White House President George W. Bush*, 1 Juni 2002. <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/06/print/20020601-3.html>.
- Cebrowski, Arthur K., dan John J. Gartska. "Network Centric Warfare: Its Origin and Future." *United State Naval Institute Proceedings* 124, no. 1 (Januari 1998): 28–35.
- Central Intelligence Agency. *Guide to the Analysis of Insurgency*. Washington D.C.: Central Intelligence Agency, 1980.
- Cordesman, Anthony H. *The Lessons of Afghanistan: Warfighting, Intelligence and Force Transformation*. Washington D.C.: CSIS, 2002.
- Ewans, Martin. *Conflict in Afghanistan: Studies in Asymmetric Warfare*. New York: Routledge, 2005.
- Fukuyama, Francis. *America at the Crossroads: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy*. USA: Yale University Press, 2006.
- Gall, Carlotta. "A Nation Challenged: Mazar-I-Sharif; A Deadly Siege At Last Won Mazar-i-Sharif." *The New York Times*, 19 November 2001. <http://www.nytimes.com/2001/11/19/world/a-nation-challenged-mazar-i-sharif-a-deadly-siege-at-last-won-mazar-i-sharif.html>.
- Gunaratna, Rohan. *Inside Al Qaeda: Global Network of Terror*. New York: Columbia University Press, 2002.

- Haddick, Robert. "This Week at War: Why Don't Stryker Brigades Work in Afghanistan?" *Foreign Policy*, 6 November 2009. <https://foreignpolicy.com/2009/11/06/this-week-at-war-why-dont-stryker-brigades-work-in-afghanistan/>.
- Hall, Wayne Michael, dan Gary Citrenbaum. *Intelligence Analysis: How to Think in Complex Environments*. USA: Praeger Security International, 2010.
- Hoffman, Bruce. "Lessons of 9/11." Committee Record the United States Joint September 11, 2001 Inquiry Staff of the House and Senate Select Committees on Intelligence. RAND, Oktober 2002.
- Ikenberry, John. "Liberalism and Empire: Logics of Order in the American Unipolar Age." *Review of International Studies* 30, no. 4 (Oktober 2004): 609-30.
- Jackson, Brian A. "Groups, Networks, or Movements: A Command and Control-Driven Approach to Classifying Terrorist Organizations and Its Application to Al-Qaeda." *Studies in Conflict & Terrorism* 29, no. 3 (2006): 241-62.
- Jervis, Robert. "Understanding Bush Doctrine." *Political Science Quarterly* 118, no. 3 (2003): 365-88.
- Johnson, Thomas H., dan M. Chris Mason. "Understanding the Taliban and Insurgency in Afghanistan." *Orbis* 51, no. 1 (2007): 71-89.
- Jones, Seth G. "The Rise of Afghanistan's Insurgency: State Failure and Jihad." *International Security* 32, no. 4 (2008): 7-40.
- Kacowicz, Arie M. "Case Study Method in International Security Studies." In *Models, Numbers, and Cases: Methods for Studying International Relations*, diedit oleh Detlef F. Sprinz dan Yael Wolinsky-Nahmias, 107-25. USA: The University of Michigan Press, 2004.
- "Karzai Takes Power in Kabul." *BBC News*, 22 Desember 2001. http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1724641.stm.
- Katzman, Kenneth. "Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy." *Congressional Research Service*, 9 Oktober 2014.
- Kibbe, Jennifer D. "The Rise of the Shadow Warriors." *Foreign Affairs* 83, no. 2 (April 2004): 102-15.
- Lowrey, Annie. "How Osama bin Laden Escaped." *Foreign Policy*, 11 Desember 2009. http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/12/11/how_osama_bin_laden_escaped.

- Mack, Andrew. "Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict." *World Politics* 27, no. 2 (1975): 175–200. doi:10.2307/2009880.
- "Massive American Bombing on Taliban Frontlines." *Fox News*, 5 November 2001. <http://www.foxnews.com/story/2001/11/05/massive-american-bombing-on-taliban-front-lines/>.
- Mayer, Jean-Francois. "Religion and terrorism – Interview with Dr. Bruce Hoffman." 21 November 2001. <https://english.religion.info/2002/02/22/religion-and-terrorism-interview-with-bruce-hoffman/>.
- McInnes, Colin. "A Different Kind of War? September 11 and the United States Afghan War." *Review of International Studies* 29, no. 2 (April 2003): 165–84.
- Mendelsohn, Barak. "Sovereignty Under Attack." *Review of International Studies* 31, no. 1 (Januari 2005): 45–68.
- Mitchell, Paul. *Network Centric Warfare and coalition operations : the new military operating system*. Routledge global security studies; 9. London: Routledge, 2009.
- Monten, Jonathan. "The Roots of the Bush Doctrine: Power, Nationalism, and Democracy Promotion in US Strategy." *International Security* 29, no. 4 (2005): 112–56.
- Naylor, Sean. "The Lessons of Anaconda." *The New York Times*, 2 Maret 2003. <http://www.nytimes.com/2003/03/02/opinion/the-lessons-of-anaconda.html>.
- Noon, David Hoogland. "Cold War Revival: Neoconservatism and Historical Memory in the War on Terror." *American Studies* 48, no. 3 (2007): 75–99.
- Office of Force Transformation. *The Implementation of Network-Centric Warfare*. Washington: Department of Defense United States of America, 2005.
- "Operation Anaconda Costs 8 U.S. Lives." *CNN.com*, 4 Maret 2002. <http://edition.cnn.com/2002/WORLD/asiapcf/central/03/04/ret.afghan.fighting/index.html?related>.
- "Operation Enduring Freedom: An Assessment." *Rand Corporation*. Diakses 15 November 2014. http://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB9148/index1.html.
- Owens, Williams A. "The Emerging US System of Systems." *Strategic Forum*, no. 63 (Februari 1996).

- Pavilonis, Brigid Myers. "Fighting the Irregular War in Afghanistan: Success in Combat; Struggles in Stabilization." In *The Routledge Handbook of War and Society*, diedit oleh Steven Carlton-Ford dan Morten G. Ender, 20–31. New York: Routledge, 2011.
- Petraeus, David H. "Learning Counterinsurgency: Observations from Soldiering in Iraq." *Military Review*, Februari 2004, 2–12.
- "Predator." *General Atomic Aeronautical*. Diakses 15 November 2014. <http://www.ga-asi.com/products/aircraft/predator.php>.
- Rohde, David, dan Norimitshu Onishi. "A Nation Challenged: Last Stronghold; Taliban Abandon Last Stronghold; Omar Is Not Found." *The New York Times*, 8 Desember 2001. <http://www.nytimes.com/2001/12/08/world/nation-challenged-last-stronghold-taliban-abandon-last-stronghold-omar-not-found.html>.
- Rose, Gideon. "Generation Kill: A Conversation with Stanley McChrystal." *Foreign Affairs* 92, no. 2 (Maret–April 2013).
- Rumsfeld, Donald H. "Transforming The Military." *Foreign Affairs* 81, no. 3 (Mei–Juni 2002): 20–32.
- Ryan, Maria. *Neoconservatism and the American Century*. New York: Palgrave Macmillan, 2010.
- Rzehak, Lutz. "Remembering The Taliban." In *The Taliban and the Crisis of Afghanistan*, diedit oleh Robert D. Crews dan Amin Tarzi. USA: Harvard University Press, 2008.
- Sageman, Marc. *Understanding Terror Networks*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004.
- "SOFLAM." *Northrop Grumman*. Diakses 15 November 2014. <http://www.northropgrumman.com/Capabilities/SOFLAM/Pages/default.aspx>.
- Stepanova, Ekaterina. *Terrorism in Asymmetrical Conflict: Ideological and Structural Aspects*. SIPRI Research Report No. 23. New York: Oxford University Press, 2008.
- Sullivan, Patricia L. "War Aims and War Outcomes: Why Powerful States Lose Limited Wars." *The Journal of Conflict Resolution* 51, no. 3 (2007): 496–524.
- Tanner, Stephen. *Afghanistan: A Military History from Alexander the Great to the Fall of Taliban*. USA: De Capo Press, 2002.
- Teranova, Ekaterina. *Terrorism in Asymmetrical Conflict: Ideological and Structural Aspects*. New York: Oxford University Press, 2008.

"The Battle for Mazar-i-Sharif." *The New York Times*, 10 November 2001. <http://www.nytimes.com/2001/11/10/opinion/the-battle-for-mazar-i-sharif.html>.

"Who are the Northern Alliance." *BBC News*, 13 November 2001. http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1652187.stm.

Ekonomi Politik Pembunuhan Massal: Prolog Pembunuhan Massal 1965 di Bali

Gede Indra Pramana

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
email: gede.indra@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

This study focused on the logic behind mass killings to alleged party member and sympathizers of the then legal Indonesian Communist Party in 1965. The events of 1965 has political economy dimensions. In extrapolating the events of 1965, case study on Bali help to explaining the local context of the mass killings. The main question to be answered was, how could there be such large scale killings in 1965?

Keywords: Political Economy; Mass Killings; The events of 1965; Case Study

Abstrak

Studi ini berisi tentang kajian yang berusaha menjelaskan tentang sebab terjadinya pembunuhan terhadap anggota dan simpatisan PKI pada 1965. Pembunuhan massal yang terjadi pada tahun 1965 memiliki dimensi persoalan ekonomi politik. Oleh karena itu, artikel ini memilih studi kasus di Bali untuk menjelaskan konteks lokal sebelum terjadinya pembunuhan massal pada tahun 1965. Problem utama dikaji dalam artikel ini adalah mengapa pada 1965 bisa terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam skala yang begitu besar?

Kata kunci: Ekonomi Politik; Pembunuhan Massal; Peristiwa 1965; Studi Kasus

Pendahuluan

Paska terbunuhnya 6 jenderal pada malam 1 Oktober 1965, Operasi Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban memberikan perintah untuk menumpas PKI sampai ke akar-akarnya. Dalam rentang waktu yang relatif singkat, selama 6 bulan sebelum akhirnya Supersemar ditandatangani oleh Soekarno, berlangsung pembunuhan hampir diseluruh wilayah Indonesia. Terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan

Bali. Panasnya situasi ditunjukkan oleh laporan CIA yang menyatakan bahwa operasi militer pembasmian PKI akan berpengaruh terhadap citra militer:

Selama enam minggu, tentara Indonesia terlibat dalam suatu gerakan besar melawan PKI. Anggota dan simpatisan PKI dikumpulkan dan ditawarkan oleh tentara; sementara yang lain dibersihkan dari berbagai posisi di pemerintahan daerah; dan di Jawa Tengah pengikut PKI dilaporkan ditembak di tempat oleh tentara. Tentara sangat mempertaruhkan prestise dan masa depan politiknya dengan gerakan ini. Tentara ingin melarang dan melumpuhkan partai ini untuk selama-lamanya, tetapi sikapnya terhadap marxisme jauh lebih rumit daripada sekedar antikomunisme.¹

Dalam suasana yang begitu genting, sulit untuk secara jernih menilai situasi.² Pada perkembangannya, situasi ini telah berubah menjadi pembunuhan-pembunuhan terhadap anggota dan simpatisan PKI di berbagai daerah di Indonesia. Analisis dari pihak PKI menyatakan bahwa pembunuhan tersebut adalah hasil dari:

Perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Jendral Nasution yang dapat ditafsirkan dengan sangat luas, yang kurang lebih memerintahkan untuk membasmi kaum komunis hingga keakar-akarnya, dan harus diambil tindakan terhadap siapa pun yang dicurigai terlibat langsung maupun tidak langsung dalam Gerakan 30 September. Berdasarkan perintah-perintah inilah pembunuhan massal dilakukan. Apakah pengadilan sependapat dengan saya, bahwa Jendral Nasution harus bertanggung jawab atas pembunuhan massal ini?³

Panasnya situasi telah ditunjukkan dengan adanya dorongan dari PNI untuk menyingkirkan PKI di Bali. Dorongan ini pada awalnya tidak ditanggapi oleh penguasa militer Bali pada saat itu. Praktis, sejak bulan Oktober hingga November 1965 tidak terjadi pembunuhan secara sistematis yang menasar anggota dan simpatisan PKI di Bali.

¹ Memorandum Intelijen CIA, Indonesia Army Attitudes toward Communism, Directorate of Intelligence, Office Current Intelligence, 22 November 1965, Case #88119, Doc. 119, butir 1. Dokumen penting ini, sayangnya, masih tertutup dan sangat dirahasiakan. Sekitar separuh isinya ditutup atau dihentikan. Dalam Hermawan Sulisty, *Palu Arit di Ladang Tebu; Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan 1965-1966* (Jakarta: KPG, 2000), 41.

² Hermawan Sulisty secara khusus membahas beragam skenario mengenai aktor yang terlibat dalam pembunuhan-pembunuhan sistematis ini. Lihat Sulisty, *Ibid.*, 47-90.

³ Sudisman, *Analysis of Responsibility: Defense Speech of the General Secretary of the Indonesian Communist Party at his trial before the Special Military Tribunal, Jakarta, 21 July 1967*, diterjemahkan dengan catatan oleh B.R.O'G. Anderson (t.t., Wason Collection, Cornell University), 21, dikutip dari Sulisty, *Ibid.*, 41.

Lanskap Sosial Politik Bali Penghujung 1965

Dalam menjelaskan pembunuhan-pembunuhan yang berlangsung di Bali, telah banyak literatur yang berusaha memberikan alasan-alasan yang menjadi dasar pembunuhan tersebut. Lagipula, studi tentang kekerasan massal di Bali bukanlah suatu hal yang baru. Telah banyak literatur yang mengupas tentang bagaimana konflik yang berujung pembunuhan sistematis bagi orang-orang yang diduga anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Bali). Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan tersebut, maka kita dapat melihat, dan kemudian memetakan konteks umum yang melatarbelakangi pembunuhan massal 1965.

Ulasan yang pertama adalah karya Geoffrey Robinson, *Sisi Gelap Pulau Dewata*. Dalam studi sejarahnya ini, Robinson menyatakan sebab-sebab pembantaianya sebagai berikut. Pertama, Tekanan struktural ekonomi yang berlangsung dalam periode dasawarsa 1950an hingga penghujung tahun 1965. Beberapa indikasi yang disebutkannya guna menggambarkan hal ini antara lain krisis pangan yang berlangsung sejak dasawarsa 1950an. Hal ini berujung pada tingginya harga barang-barang sektor riil, terutama pangan, yang menyebabkan tekanan ekonomi yang dialami masyarakat. Tekanan struktural ekonomi ini dapat kita lihat dalam tingginya harga inflasi sebagaimana dinyatakan Robinson:⁴

... baru pada dasawarsa 1960-an inflasi mencapai taraf krisis dan mulai menimbulkan keruwetan sosial dan politik yang jelas di seantero pulau. Antara tahun 1957 dan medio 1962, harga beras di Bali naik empat kali lipat, dan setelah itu kenaikannya bahkan lebih hebat lagi, sampai Rp. 130 sekilo menjelang 1964

Sementara itu, laporan didesa-desa rakyat makin sering mencampur nasinya dengan pisang dan kelapa, serta daun pepaya, dengan perbandingan 1:3 atau 1:4. Sesungguhnya, banyak yang sampai makan pisang dan daun-daunan saja, tanpa nasi sama sekali.⁵ Kondisi hidup sangat memburuk saat itu, akibat inflasi (kenaikan tajam harga barang-barang kebutuhan yang harus dibeli, termasuk makanan untuk para petani kecil dan buruh tani), wabah tikus, dan kekeringan.⁶ Sementara kebutuhan pokok di Bali selama ini dipenuhi dengan kebijakan Pemerintah melalui

⁴ Geoffrey Robinson, *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik* (Yogyakarta: LKIS, 2006), 362.

⁵ Harga Beras makin menggila, *Suara Indonesia*, 22 Oktober 1963, dalam *Ibid.*, 365.

⁶ Ina E. Slamet, *Views and Strategies of the Indonesian Peasant Movement on the Eve of Its Annihilation in 1965-1966*, naskah tidak diterbitkan, dalam Robinson, *Ibid.*, 363-64.

subsidi, kondisi ini diperparah dengan gagal panen yang berlangsung pada tahun 1963.⁷

Tabel 1. Harga Beras di Bali, 1950-1964 (rupiah per kg)

Waktu	Harga	Waktu	Harga
1950	1,75	1960	12,00
1951	2,35	1961	18,00
1952	3,50	Juli 1962	27,00
1953	3,50	Desember 1962	30,00
1954	3,50	April 1963	40,00
1955	3,50	Juni 1963	60,00
1956	3,50	Oktober 1963	85,00
1957	7,50	November 1963	125,00
1958	8,00	1964	130,00
1959	11,00		

Sumber: disadur dari Robinson, 2006, halaman 364

Lebih jauh, dampak letusan gunung Agung pada 1963 masih terasa. Letusan pada 17 Maret dan 16 Mei dinyatakan telah merenggut kira-kira 1.500 nyawa dan menelan lebih dari 62.000 hektar lahan produktif, mengakibatkan kekurangan gizi yang parah pada lebih dari 10.000 orang dan eksodus sebanyak 75.000 ke kerajaan-kerajaan tetangga.⁸ Berdasarkan catatan harian keluarga survivor yang berhasil saya temukan, terputusnya jalur akses jembatan di wilayah sekitar kabupaten Klungkung mempengaruhi jalur distribusi bantuan kebutuhan para warga yang terkena dampak dari letusan gunung tersebut. Catatan tersebut berisi keterangan sebagai berikut:

Tgl 18-6 1963: gempa besar rumah-rumah banjak jg petjah dg berjatuhan (djam 9 malam 3x). Tgl 23-5-1963: djam 5,45 pagi; sama besarnya rumah-rumah banjak jg berdjatuhan.

Bandjir disungai Unda sebab tiap-tiap sore dengan banjak mengandung lahar dingin dengan pasir. Djalannya air selalu berubah. Kadang-kadang di bagian sungai sebelah barat, besok bisa sebelah timur dan bisa ditengah-tengah.

⁷ Ibid., 365.

⁸ Robinson, Ibid., 366. Terutama catatan kaki no. 21.

Pada tanggal 5-2-64 mulai djam 4 air mulai besar karena pada waktu itu hudjan dan air melanda djembatan jg bukan main kukuhnja lalu putus dan hantjur. Achirnja djembatan itu terhenti sampai di sebelah utara desa Tangkas, diselatan desa Gunaksa berhenti tertimbun pasir, karena air pada sungai melebar, banjak derasnja kurang. Lalu lintas menjeberang sungai kali-Unda dengan turun kekali. Maka buruh ramai dan ongkos mengangkat barang malah. 1 karung beras Rp.200. upah mandor Rp. 25 Ngandong Rp.50. pihak pemerintah membantu dengan titi tijing tetapi sering hanjud.⁹

Kedua, Konflik perebutan sumber daya melalui penguasaan posisi-posisi strategis dalam negara. Secara eksplisit, konflik terbuka dalam segi politik, dimana mobilisasi massa dan preferensi politik adalah faktor kunci yang memegang peranan dalam perebutan kekuasaan pada periode itu. Afiliasi partai tidak semata-mata dibentuk berdasarkan hubungan kedekatan personal, akan tetapi, pada masa puncaknya, setelah kampanye aktif *land reform* memuncak di Bali pada dasawarsa 1960-an, membentuk solidaritas kelas yang lebih konkret.

Tabel 2. Jumlah kursi yang diduduki partai-partai di Badan Pemerintahan Harian provinsi dan kabupaten Bali, 1965.¹⁰

Kabupaten	PNI	PKI	Partindo	NU	Total
Karangasem	3	1	1	0	5
Klungkung	3	2	0	0	5
Gianyar	3	2	0	0	5
Buleleng	3	1	1	0	5
Bangli	3	1	1	0	5
Badung	2	2	1	0	5
Tabanan	3	1	1	0	5
Jembrana	2	2	0	1	5
Total	22	12	5	1	40
Kabupaten					
Provinsi	3	1	5	1	6

⁹ Dikutip dari catatan harian IKP, tanpa tahun

¹⁰ Sumber, Fadjar (Denpasar), 11 Maret 1965 dalam Robinson, *Sisi Gelap Pulau Dewata*, 329.

Robinson juga menunjukkan bahwa pada periode akhir pemerintahan Soekarno, konfigurasi politik lokal menunjukkan bahwa Bali telah terintegrasi sepenuhnya dalam lanskap politik nasional. Hal ini berarti, perimbangan kekuatan di Jakarta tercermin langsung dalam konfigurasi politik di Bali. Komposisi Badan Pemerintahan Harian di Bali pada 1965 menunjukkan hal ini (lihat Tabel 2).

Signifikansi dari akses terhadap kekuasaan ini, akan kita lihat manifestasinya melalui dua hal. Pertama, telah disebutkan bahwa subsidi merupakan kebijakan Pemerintah Pusat guna memenuhi pasokan kebutuhan barang konsumsi di Bali, terutama beras. Telah disebutkan diatas, tekanan inflasi, gagal panen, dan bencana alam adalah kombinasi buruk yang menekan masyarakat Bali pada periode menjelang 1965.

Menguasai posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, memungkinkan anggota-anggota masyarakat guna mengakses sumber daya yang dimiliki negara. Perebutan dalam level pemerintah daerah juga tidak kalah sengitnya. Meski demikian, komposisi yang terjadi mencerminkan juga dinamika politik nasional, sebagaimana ditunjukkan dalam jumlah badan pengurus harian Bali.

Tabel 3. Afiliasi Politik para Bupati di Bali 1964-1965.¹¹

No	Kabupaten	Bupati	Afiliasi Partai
1	Buleleng	I.B.M	Partindo
2	Jembrana	I.B.D	PKI
3	Tabanan	Ida Bagus Pudja	PNI
4	Badung	I.G.N.A. Pacung (sampai November 1964) A.A.G.A (awal 1965) I Wayan Dhana (akhir 1965)	PSI PKI PNI
5	Gianyar	Cokorda Ngurah (sampai November 1964) I.M.S (sampai November 1965)	PSI PKI
6	Bangli	Ida Bagus M. Sutha	PNI
7	Klungkung	Cokorda Anom Putra	PNI
8	Karangasem	Cokorda Lanang Rai	PNI

¹¹ Ibid., 408.

Ketiga, uraian-uraian yang mengaitkan unsur kebudayaan masyarakat Bali yang khas dalam pembantaian. Argumentasi umum yang melihat konflik di Bali, secara umum, dipengaruhi oleh konteks dimana peristiwa ini berlangsung. Studi-studi yang dilakukan terhadap pembantaian massal yang berlangsung di Bali umumnya menunjukkan suatu gambaran tentang masyarakat Bali yang sedari awal mengutamakan harmoni. Hal ini menggarisbawahi dampak sosial yang sekaligus menempatkan aktivitas PKI sebagai ancaman.

Robinson (2006) mengkritik argumentasi umum yang sering kali dikutip guna menjelaskan peristiwa 1965 di Bali. Dalam studi sejarah yang dilakukan Robinson menguraikan beberapa pandangan yang menitikberatkan pada argumentasi kebudayaan khas masyarakat Bali sebagai penyebab pembunuhan massal dalam skala besar. Pandangan ini dipopulerkan dalam literatur Barat (John Hughes, 1967; Guy Pauker, 1968; Don Moser, 1966, Brian May, 1978), yang mengesankan suatu citra eksotis yang membungkus konflik kekerasan pada masyarakat Bali. Beberapa argumen umum yang dicatat oleh Robinson, di antaranya:

[pertama]...uraian yang ada mengenai Bali (dan Jawa) pasca kudeta adalah bahwa kekerasan ekstrim terhadap PKI merupakan reaksi atas kekacauan yang ditimbulkan partai ini pada harmoni, tatanan, dan keseimbangan yang terang-benderang dalam budaya dan agama Bali...[kedua] bahwa kekerasan terhadap PKI dimotivasi oleh hasrat religiokultural yang mendalam dan misterius, dan secara lebih spesifik lagi, bahwa pembunuhan itu dilaksanakan dalam semangat 'pengusiran setan' (*exorcism*) atau 'penyucian' (*purification*).¹²

Meski Robinson mengakui bahwa memang faktor kultural ini memang bisa menjelaskan tentang kekerasan, dengan itu memberi suatu justifikasi atas tindakan membunuh sekaligus membebaskan aktor-aktor yang terlibat aktif (militer dan pemimpin politik) dari tanggung jawab, akan tetapi penjelasan ini hanya mencakup sebagian dari alasan pembunuhan yang berlangsung. Robinson justru menyimpulkan, dengan berdasarkan bukti-bukti sejarah yang berhasil dikumpulkannya, bahwa ada motif ekonomi politik yang melatarbelakangi peristiwa 1965 di Bali, yaitu agensi aktif militer dan pemimpin partai politik, beserta manipulasi politik yang mendorong kekerasan massal ini.

Faktor-faktor sejarah ini ditelisik dalam uraiannya tentang sejarah politik di Bali, merentang sejak masa penundukan oleh Pemerintah Belanda hingga ke penghujung Orde Lama. Jika sebelum ditundukkan

¹² Ibid., 421.

oleh Belanda, masih banyak terdapat kerajaan-kerajaan lokal di Bali, maka penyatuan wilayah Bali dalam kerangka Hindia Belanda menyebabkan perubahan mendasar dalam struktur politik. Pertama, terdapat satu penguasa tunggal atas berbagai kerajaan lokal yang dulunya saling berperang, berebut pengaruh, wilayah, dan rakyat. Kedua, kerajaan lokal ini akhirnya tetap dipertahankan, sehingga, dalam batas tertentu, administrasi pemerintahan Hindia Belanda dijalankan dengan mempertahankan struktur pemerintahan yang telah ada lebih dulu. Artinya, para raja saat ini adalah semata-mata pegawai pemerintah kolonial dan hidup dengan menerima gaji. Ketiga, Warisan kultural dipertahankan dalam kerangka politis yang dibatasi oleh wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Uraian Robinson ini dapat memberikan landasan umum perubahan struktur kekuasaan politis di Bali:

Setidaknya sejak peralihan abad, otoritas politik di Bali telah bersandar pada, dan dikangkangi oleh, kekuasaan negara luar yang silih berganti: mula-mula Belanda, lalu Jepang, dan, selepas tahun 1946, kombinasi Belanda dan Negara Indonesia Timur (NIT). Tak pernah ada institusi politik se-Bali sebelum pemerintahan kolonial; dan sesudah pemerintahan kolonial tamat riwayatnya, tidak ada struktur baru yang sanggup bertahan memerintah keseluruhan pulau ini. Struktur politik yang tersisa di atas level kerajaan individual – Dewan Raja-Raja, Paruman Agung, dan birokrasi Karesidenan – amat bergantung pada dukungan politik dan militer dari otoritas kolonial luar. Dengan ambruknya kekuasaan Belanda dan NIT pada 1949-1950, otoritas badan-badan itu jadi melemah, dan banyak personalnya terpuruk secara politis. Jadi, pada 1950 Bali sekonyong-konyong ditinggalkan tanpa aparatus negara lokal yang kuat.¹³

Jadi secara umum, Robinson membantu kita memahami konteks dan latar belakang ekonomi politik pembantaian. Meskipun, menurut Sulistyono, kajian Robinson yang melihat faktor-faktor ekonomi politik secara makro tidak memberikan gambaran konflik di aras lokal mengenai latar belakang terjadinya pembunuhan.

Masih menurut Sulistyono, pada saat yang hampir bersamaan, Iwan Gardono Sudjatmiko melakukan kajian perbandingan tentang pembunuhan yang berlangsung pada tahun 1965. Ia menggunakan model yang menggunakan tiga faktor – ketidaksetiaan AD, persentase penentang (terhadap penguasa), dan afiliasi politik tokoh-tokoh masyarakat – untuk

¹³ Ibid., 280.

menjelaskan dan memprediksi kemungkinan terjadinya revolusi.¹⁴ Kesimpulan dari studinya tersebut:

Dengan menggunakan model analisis yang memadukan tokoh-tokoh masyarakat, penentang sosial, dan tokoh-tokoh militer terkemuka, kita memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dampak mobilisasi sebelum 1965 dan kekerasan yang mengikuti kudeta... kekerasan terutama harus dilihat sebagai jalan pintas untuk meraih kemenangan mutlak.¹⁵

Mengenai studi ini, Sulistyono menyatakan beberapa kekurangan, baik metodologis maupun teoritis. Secara metodologis, menurutnya, berbahaya apabila menarik gambaran makro ketika potret dan representasi mikro diterapkan dalam lanskap yang lebih besar.¹⁶

Karenanya, Sulistyono mengajukan suatu tawaran, dengan melihat dalam satu wilayah tertentu, dan menguraikan secara sosiologis lanskap situasi yang melatar belakangi konflik 1965. Studinya di Jombang dan Kediri adalah salah satu studi komprehensif yang menguraikan, secara historis, pembunuhan-pembunuhan yang berlangsung terhadap anggota dan simpatisan PKI pada 1965.

Sulistyono sampai pada kesimpulan bahwa terdapat untaian-untaian penyebab yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Pertama, amuk dan penyebab kultural. Argumentasi ini dibantah oleh Cribb, dimana amuk menurutnya lebih merupakan upaya menyelamatkan kehormatan melalui tindakan kekerasan secara gila-gilaan yang berakibat matinya orang yang mengamuk.¹⁷ Meski cerita mengenai amuk relevan dalam menjelaskan tindakan para pembunuh dalam melakukan pembunuhan, akan tetapi dengan daftar calon korban, ladang pembantaian yang rahasia, dan motif yang jelas bukan untuk bunuh diri, maka para pembunuh itu hanya sedikit mirip dengan pengamuk yang biasa.¹⁸ Kedua, provokasi PKI. Ketiga, konflik agama dan perang suci Islam. Keempat, konflik kelas. Kelima, konflik aliran. Keenam, lemahnya integrasi nasional. Ketujuh, ledakan akibat tekanan ekonomi. Kedelapan, balas dendam tentara dan genosida oleh Negara. Dalam kesimpulannya yang bernas:

¹⁴ Sulistyono, *Palu Arit di Ladang Tebu*, 86.

¹⁵ Iwan Gardono Sudjatmiko, *The destruction of the Indonesian Communist Party (PKI) (a comparative analysis of East Java and Bali)*, disertasi Ph.D pada Harvard University, 1992, 43, dalam Sulistyono, *Ibid.*, 87.

¹⁶ Sulistyono, *Ibid.*

¹⁷ Robert Cribb, *Introduction*, hal. 33 dalam Sulistyono, *Ibid.*, 234.

¹⁸ Cribb, *ibid.*, hal. 34, dalam Sulistyono, *Ibid.*, 235.

Kasus Jombang dan Kediri menunjukkan adanya pola dislokasi dan perpecahan sosial yang telah berlangsung lama, dan meledak menjadi konflik disertai kekerasan dan mematikan setelah muncul Peristiwa Gestapu.... Studi ini juga menunjukkan betapa konfrontasi retorika-politik di tingkat nasional telah menyebabkan terjadinya konflik fisik di tingkat akar rumput.¹⁹

Studi Sulistyو memiliki keterbatasan apabila diterapkan dalam *setting* sosial di lokasi yang berbeda. Sebagaimana dinyatakan oleh Sulistyو sendiri, pembunuhan di Jawa Tengah didominasi oleh operasi militer, suatu kasus yang tidak berlangsung di Jombang dan Kediri. Senada dengan itu pula, perihal konflik agama dan perang suci Islam sama sekali tidak cocok jika digunakan dalam membaca kasus di Bali.

Hal inilah yang menghantarkan kita terhadap studi Lyn Parker. Lyn Parker melakukan kajian etnografi dengan mengambil fokus terhadap satu wilayah di Kabupaten Klungkung, Bali. Dalam salah satu babnya, ia menguraikan secara mendetail, dengan data-data mikro, tentang situasi Kabupaten Klungkung dalam periode-periode yang menentukan sebelum, sesaat ketika pembunuhan berlangsung, dan sesudah pembunuhan berlangsung. Meskipun kajiannya tidak berfokus terhadap pembunuhan yang berlangsung sepanjang 1965, tetapi temuan-temuannya membantu kita dalam menerangkan peristiwa berdasarkan hasil riset etnografinya yang tekun.

Lyn Parker menyatakan bahwa terdapat pola-pola pembunuhan yang berlangsung sepanjang tahun 1965 hingga 1966. Pola pembunuhan mengikuti polarisasi organisasi politik, dan dipertajam dengan pola penguasaan tanah yang terjadi di Kabupaten Klungkung. Lebih lanjut, Lyn Parker menemukan bahwa aksi pembunuhan menysasar musuh-musuh utama kelas penguasa lokal setempat.

Hal ini utamanya dapat kita lihat dari signifikansi lahan dan penguasaannya, beserta pola bagi hasil yang berlangsung sepanjang 1965. Ketika itu, implementasi dari Undang-undang Reforma Agraria menemukan manifestasinya melalui aksi-aksi pembagian lahan yang dilakukan oleh organisasi pendukung UUPA, dengan PKI sebagai penggerak utama. Untuk memahami latar belakang konflik tersebut, perlu dibahas secara khusus mengenai tanah, perubahan pola penguasaannya, dan dampak dari kampanye UUPA di Klungkung.

Dalam upaya menggambarkan dampak Land Reform ini, sumber-sumber diolah berdasarkan naskah populer yang dapat diakses. Dalam

¹⁹ Sulistyو, *Ibid.*, 246.

bentuk finalnya, revisi Undang-undang Agraria 1959 menjadi UU Pokok Agraria 1960 tersebut mengandung ketentuan-ketentuan utama sebagai berikut:

Angka maksimum adalah luas lahan yang boleh dimiliki sebuah keluarga, dan jumlahnya berbeda-beda sesuai wilayah dan jenis pemanfaatannya. Contoh, luas sawah (lahan pertanian padi beririgasi) yang boleh dimiliki sebuah keluarga beragam dari lima hektar di wilayah berpenduduk padat hingga 15 hektar di wilayah berpenduduk jarang. Untuk menentukan luas maksimum, lahan yang sudah digadai, atau disita sebagai pembayaran utang kepada tuan tanah harus dikembalikan ke keluarga pemilik asli. Namun demikian, undang-undang ini tidak berlaku bagi penggunaan lahan dibawah batas maksimum; karena itu kesepakatan bagi-hasil panennya tidak ikut terpengaruh kecuali hanya mengikuti regulasi bagi-hasil di undang-undang sebelumnya.

Setiap keluarga yang memegang lahan lebih dari batas maksimum yang diperbolehkan undang-undang harus segera mendaftarkan kelebihan tersebut dalam waktu tiga bulan, dan pemindahtanganan surplus sangat dilarang.²⁰

Rex Mortimer, mengutip Utrech menyatakan sebagai berikut:

Kurangnya data statistik terkait kepemilikan lahan dan kompleksnya ragam aturan pedesaan tentang penggunaan lahan seperti kebiasaan, adat dan praktik informalnya membuat siapa pun sulit menakar keberhasilan undang-undang ini. Seperti disimpulkan Utrech: Yang ditemukan adalah meskipun di Jawa, Madura, Sulawesi Selatan, Bali dan Lombok hanya 5.400 orang saja yang memiliki lahan basah (atau sawah) lebih dari 10 hektar, namun kekayaan orang-orang itu sangat besar, jauh lebih besar ketimbang sekadar orang kota yang punya tanah 10 hektar, karena pengerjaan lahan dan panennya dikerjakan petani-petani miskin yang tidak punya lahan dan sudah menggadaikan lahan-lahan itu sebagai jaminan utang, bahkan kerja mereka sering kali tidak dibayar untuk membayar cicilan utang dan bunganya yang tidak kunjung usai sehingga lama-kelamaan lahan mereka pun disita para tuan tanah atau disewakan ke warga kota. Untuk lahan kering (atau ladang), jumlah pemilik yang luas lahannya lebih dari 10 hektar adalah 11.000 orang, dan luas lahan itu kian bertambah-tambah akibat ladang yang digadaikan sebagai jaminan utang para peladang miskin yang tak kunjung bisa dilunasi sehingga lama-kelamaan kepemilikan mereka lepas juga.²¹

²⁰ Rex Mortimer, *Indonesian Communism Under Soekarno* (Yogyakarta: Puskata Pelajar, 2011), 366.

²¹ Utrech, Land Reform di dalam *Bulletin of Indonesian Economic Studies* V no. 3,

Pernyataan ini tidaklah menyurutkan usaha guna memeriksa lebih detail implikasi dari dilaksanakannya Land Reform. Sebagaimana dicatat dengan apik oleh Robinson:

Kondisi lazim yang didapati di pedesaan Bali masa itu memberikan signifikansi politis yang unik pada undang-undang tersebut. Memasuki tahun 1950, sekitar 85% dari seluruh pertanian di Bali adalah milik pribadi, tapi luas rata-rata kepemilikan tanahnya kecil, dan kian menyusut di hadapan pesatnya pertumbuhan penduduk. Sebanyak 89% dari seluruh kepemilikan tanah di Bali lebih kecil dari dua hektar, dan lebih dari separuh di bawa 0,5 hektar, sebuah proporsi yang lebih besar dari Jawa-Madura. Di sejumlah wilayah proporsi kepemilikan tanah di bawah setengah-hektar adalah antara 60%-70%.²²

Tabel 4. Kepemilikan Tanah di Bali, 1963, berdasarkan jumlah hektar

Kabupaten	Kepemilikan < 0,5 Ha (persen)	Kepemilikan > 2,0 Ha (persen)	Luas rata-rata Lahan Pertanian (Ha)	Total Lahan Pertanian (Ha)
Badung	62	5	0,73	37.908
Bangli	43	19	1,25	19.251
Buleleng	44	17	1,38	35.140
Jembrana	22	36	1,48	13.926
Gianyar	70	3	0,56	37.380
Karangasem	68	3	0,55	27.180
Klungkung	66	4	0,78	17.358
Tabanan	44	15	1,13	46.530
Seluruh Bali	54	11	0,95	234.673
Jawa Madura	52	6	-	-

Sumber: Robinson, 2000, 388

Di Kabupaten Klungkung, implementasi dari Land Reform secara formal di mulai sejak bulan Januari 1961.²³ Proses ini dimulai dengan

november 1969; 75, dalam Rex Mortimer, *Ibid.*, 368.

²² Robinson, *Sisi Gelap Pulau Dewata*, 388.

²³ Lyn Parker, *From Subjects to Citizens: Balinese Villagers in the Indonesian Nation-State* (Nordic Institute of Asian Studies, 2003), 68.

pendataan para tuan tanah pemilik yang tanahnya melampaui batas maksimum kepemilikan lahan. Proses pendataan juga dilakukan terhadap pemilik tanah yang tinggal diluar wilayah kecamatan tanah miliknya.

Komite Pelaksana Land Reform tingkat Kabupaten kemudian dibentuk, yang terdiri dari Panitia Paripurna, bersama dengan Bupati Klungkung waktu itu, Cokorda Anom Putra, mengepalai sejumlah 15 orang militer dan aparatur birokrasi, seperti Sedahan Agung, juga masing-masing perwakilan dari BTI, PETANI (Persatuan Tani Indonesia, yang berafiliasi ke PNI), dan Tani Marhaen (Sanjaya, 1991: 119-121, Lampiran B, dalam Lyn Parker, 2003: 68). Selanjutnya juga dibentuk Komite Land Reform tingkat kecamatan, yang dibantu oleh kepala desa dan aparat desa lainnya. Badan ini dibentuk untuk melakukan verifikasi atas alamat rumah, warisan dan pernikahan, kematian yang menyebabkan warisan masih tidak jelas, dan lain lain. Seluruh badan ini harus memasukan unsur-unsur dari organisasi massa petani, seperti BTI dan PETANI.

Pada praktiknya, anggota komite didominasi oleh anggota PNI, yang acapkali mewakili kalangan pemilik tanah. Sehingga, keseluruhan prosesnya berjalan lambat, karena kepentingan para pemilik tanah untuk mengamankan tanahnya. Selain itu, kewenangan untuk menentukan siapa yang tanahnya disita, dan kepada siapa tanah nanti akan diberikan juga dipegang oleh Komite ini.

Hal lain yang perlu diperhatikan terkait Land Reform adalah aturan tentang bagi hasil yang diatur dalam Undang Undang Pokok Bagi Hasil No. 2 tahun 1960 (UUPBH 1960). Undang-undang bertujuan untuk: pertama, agar tercapai keadilan diantara pemilik tanah dan penggarap dalam pembagian hasil panen; kedua, untuk melindungi pihak yang lebih lemah, disini yang seringkali dimaksud adalah penggarap, dari praktik kekerasan; ketiga, untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak (Sanjaya, 1991: 75-76). Pengaturan lebih lanjut tentang besaran bagi hasil ditentukan oleh Bupati. Di Klungkung, besaran bagi hasil untuk hasil panen dari sawah dibagi rata antara pemilik dan penggarap, sedangkan untuk sawah tegalan 2/3 diberikan kepada pemilik.

Pada perkembangannya, rasa frustrasi membunyah akibat proses berbelit berkepanjangan yang dialami dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Sudah sejak lama, para pemilik lahan adalah orang-orang yang menduduki posisi pemerintahan, mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten. Sedangkan disisi lain, para penggarap dan buruh tani, terorganisir dalam BTI, mendorong pelaksanaan Land Reform. Bentrokan di tingkat akar rumput tidak dapat dielakan. Merespon kegelisahan yang terjadi akibat lambatnya pelaksanaan Land Reform, pada tahun 1964,

Gubernur Sutedja mengeluarkan surat edaran yang isinya kewajiban mempercepat implementasi Land Reform. Tak ayal lagi, keputusan ini semakin mendorong konflik vertikal, yang arahnya semakin menjurus kearah kekerasan.

Penutup

Meletusnya pembunuhan massal di Bali baru dimulai sejak kedatangan RPKAD dan anggota Kodam Brawijaya yang memasuki wilayah Bali pada minggu-minggu di November 1965. Semenjak dibentuknya Koptamtib dengan Soeharto sebagai komandannya, pembunuhan mulai berlangsung secara sistematis. Pada praktiknya, pembunuhan menasar anggota keluarga laki-laki dalam keluarga yang terindikasi sebagai PKI.²⁴ Pada sebagian kasus, ada yang satu keluarga, bahkan satu desa yang seluruh anggotanya dibunuh.²⁵

Pada bulan-bulan awal setelah 1 Oktober 1965, dimana masih belum tampak pergeseran kekuasaan yang dramatis di Jakarta, kondisi di Bali masih relatif kondusif.²⁶ Geoffrey Robinson mencatat penguasa militer di Bali belum melakukan suatu tindakan yang mengantisipasi kemana angin kekuasaan berhembus. Hanya ketika penguasa militer Bali telah ditunjuk menjadi panglima kopkamtib di wilayahnya, militer Bali mulai terlibat.²⁷

Konteks umum diatas berlangsung ditengah situasi yang tidak menentu. Semenjak kabar bahwa berlangsung perburuan terhadap anggota dan simpatisan PKI, situasi menjadi begitu genting. Pembunuhan massal pada awalnya, dimulai pada di Kabupaten Negara, dimana sebelumnya, berlangsung persaingan yang ketat diantara PNI dan PKI. Hingga bulan Desember 1965, tidak berlangsung suatu usaha pembunuhan yang sistematis. Hingga kemudian, seorang tentara beserta tiga temannya yang simpatisan PNI, mengendap-endap hendak mengawasi rumah seorang polisi yang sudah lama dianggap anggota PKI, kemudian tertembak.²⁸ Kematian anggota inilah yang akhirnya menjadi pemicu awal

²⁴ Kompilasi hasil wawancara, 27 November 2013 sampai 1 Desember 2013

²⁵ Misalnya di Tegalbadeng, Negara. atau Selisian, Klungkung. Hasil wawancara November 2013

²⁶ Robinson, *Sisi Gelap Pulau Dewata*.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ada 3 versi pemicu pembunuhan massal: versi pertama oleh liputan khusus majalah Tempo, lihat: Redaksi Tempo, "Dari Pengakuan Algojo 1965," *Majalah Tempo*, Liputan Khusus Edisi 1- 7 Oktober 2012, 7 Oktober 2012. Versi kedua adalah kematian polisi dilapangan lokasi rapat akbar PKI di Negara, versi ketiga adalah kematian tentara yang dibunuh anggota PKI kemudian wajahnya diukir palu dan arit di jidat. Kompilasi

pembunuhan-pembunuhan, yang akhirnya meluas, dan secara sistematis mengincar anggota dan simpatisan PKI. Pembunuhan dilakukan oleh tameng dan Ansor dengan beking tentara. Di Tabanan pembunuhan dilakukan oleh orang Puri yang PNI. Di Denpasar dilakukan oleh tameng PNI. Di Klungkung dilakukan oleh tameng PNI. Studi Lyn Parker (2003) yang dilakukan di Klungkung menunjukkan bahwa ada motif politis yang melatarbelakangi pembunuhan-pembunuhan yang berlangsung pada periode itu. Target utama pembunuhan, menurut Lyn Parker, menysasar orang-orang yang kritis terhadap kekuasaan Puri, yang mana mengancam status quo atas penguasaan tanah di wilayah desa.

Secara umum pola ini sesuai dengan polarisasi PKI-PNI yang disepakati oleh ilmuwan-ilmuwan peneliti kekerasan massal 1965 di Bali, akan tetapi hal ini tidak berlangsung di Dawan Kaler. Absennya kehadiran Puri, sebagai suatu otoritas kuat di wilayah desa Dawan Kaler, membuat tidak adanya suatu konflik laten tunggal yang mendorong berlangsungnya pembunuhan seperti yang dijelaskan oleh Lyn Parker. Hal ini menunjukkan bahwa argumentasi ancaman atas monopoli tanah, sebagai motif pembunuhan tidak serta merta berlaku.

Secara khusus, jumlah korban yang berjatuh sulit ditaksir. Sulistyio (2000) menyatakan terdapat beberapa fakta yang harus dipertimbangkan guna memperkirakan jumlah korban. Masih menurutnya, setiap perkiraan jumlah korban membawa muatan politis tersendiri. Sulistyio mencatat mengenai daftar perkiraan jumlah korban secara terperinci sebagai berikut:

Tabel 5. Perkiraan Jumlah Korban Pembunuhan Massal 1965²⁹

Sumber Nasional	Perkiraan Jumlah Korban
Adam Malik (dalam Hughes hlm. 186)	160.000
Anderson (Indonesia 40 [1985], hlm. 53; juga dalam Cribb)	500.000-1.000.000
Anderson dan McVey (hlm. 63)	200.000
Brackman (angka yang masuk akal; hlm. 125)	150.000

hasil wawancara narasumber.

²⁹ Tabel ini menyadur data-data yang dikompilasi oleh Hermawan Sulistyio. Seperti dikutip dari sumber aslinya, tabel ini tidak memiliki nama keterangan. Dalam keterangan pada catatan kaki, disebutkan sebagian data merupakan perbaikan dari Robert Cribb, *the Indonesian Killings: Study from Java and Bali*, hal. 12-13. Kecuali dikutip dengan catatan “dalam Cribb” semua data telah diverifikasi dengan sumber-sumber aslinya Lihat: Sulistyio, *Palu Arit di Ladang Tebu*, 44-46.

Brackman (hlm. 114)	70.000
Caldwell dan Utrech (dalam Cribb)	500.000
Conteney (dalam Cribb)	100.000-200.000
Dahm (dalam Cribb)	200.000
<i>The Economist</i> (dalam Cribb)	1.000.000
Komisi Pencari Fakta (resmi; dalam Hughes, hlm. 185)	78.000
Anggota Komisi (dalam Hughes, hlm. 185-186)	780.000
Feith (<i>The Nation</i> , hlm. 9)	150.000
Frederick (dalam Cribb)	750.000
Fryer dan Jackson (dalam Cribb)	100.000-500.000
Grant (dalam Cribb)	200.000-300.000
Henderson (dalam Cribb)	400.000-200.000
Hughes (hlm. 188)	200.000
Kirk (dalam Cribb)	150.000
Koptamtib (dari Palmos dalam Cribb)	1.000.000
Legge (dalam Cribb)	250.000
Lyon (hlm. 71)	200.000-500.000
Mellor (dalam Cribb)	2.000.000
Mody (dalam Cribb)	500.000-1.000.000
Moser (dalam Cribb)	400.000
Neil (dalam Cribb)	750.000
<i>The New York Times</i> (24-08-66; ditulis sebagai Topping dalam Cribb)	150.000-400.000
<i>The New York Times Magazines</i> (08-05-66; dikutip sebagai King dalam Cribb)	300.000
Paget (dalam Cribb)	100.000-300.000
Palar (dalam Hughes, hlm. 186)	100.000
Palmier (dalam Cribb)	200.000
Politbiro PKI yang dikelompokan kembali (dikutip dalam Brackman, hlm. 114)	200.000
Pluvier (dalam Cribb)	500.000-1.000.000
Polomka (dalam Cribb)	150.000-300.000

Repression and Exploitation (dalam Cribb)	500.000-1.000.000
Ricklefs (dalam Cribb)	500.000
Robinson (hlm. 273; mengutip Cribb)	500.000-1.000.000
Sievers (dalam Cribb)	200.000-400.000
Sloan (hlm. 71)	300.000
Sudisman (Analysis; hlm. 21)	(lebih dari) 180.000
Laksamana Sudomo, Pangkoamtib (dalam Cribb)	450.000-500.000
Soekarno (dalam Hughes; hlm. 185)	87.000
Sullivan (dalam Cribb)	300.000-500.000
Tornquist (hlm. 234)	100.000-1.000.000
Turner (dalam Cribb)	300.000-600.000
Kedutaan Amerika (Green; hlm. 61)	300.000 atau kurang
Vittachi (dalam Cribb)	300.000-500.000
The Washington Post (dalam Cribb); juga dalam Hughes, hlm. 184)	500.000
Wertheim (dalam Cribb)	400.000
Bali	
ABRI (dikutip dari Robinson; hlm. 273 catatan kaki no.2)	40.000
Para pemimpin Bali (dikutip dari Robinson); hlm. 273 catatan kaki no. 2)	100.000
Anggota Misi Pencari Fakta (dalam Hughes, hlm 185)	100.000
Soe Hok Gie (hlm. 165)	80.000
Robinson (hlm. 273; mengutip Soe Hok Gie dalam Cribb)	80.000
Robison (hlm. 273 catatan kaki no.2)	40.000-100.000
Sudisman (Analysis; hlm. 21)	50.000
Wertheim (dalam Robinson, hlm. 273 catatan kaki no. 2)	100.000
<i>The New York Times</i> (13-01-66)	100.000
(13-01-66; mengutip seorang "ahli Inggris)	150.000

Jawa Tengah	
Hughes (hlm. 188)	100.000
Sudisman (Analysis; hlm. 21)	70.000
Jawa Timur	
Seorang Jendral AD (dalam Hughes, hlm. 188)	100.000
Sudisman (Analysis; hlm. 21)	60.000
Jombang	
RA (algojo)	2.000-5.000
Studi ini (dalam Sulistyoy)	3.000-3.500
Kediri	
SS (algojo) total	20.000
“operasi teratur”	15.000
“operasi tidak teratur”	5.000
Studi ini (dalam Sulistyoy)	8.256-13.760

Kompilasi ini menunjukkan usaha untuk memastikan jumlah korban yang dibunuh pada periode 1965-1966 ini sulit untuk dilakukan. Belum lagi dampak jangka panjang yang ditimbulkan melalui teror ini. Ingatan tentang pembunuhan massal ini masih melekat dalam keluarga korban.

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict, dan Ruth T. McVey. *A Preliminary Analysis of October 1 1965 Coup in Indonesia*. Cornell Modern Indonesia Project, 1971.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

- Dittmer, Lowell. "The Legacy of Violence in Indonesia." *Asian Survey* 42, no. 4 (Agustus 2002): 541-44. <http://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2002.42.4.54>.
- Geertz, Clifford. "Deep Play: Notes on Balinese Cockfight." *Daedalus Fall* 134, no. 4 (2005): 56-86.
- Gellately, Robert, dan Ben Kiernan, ed. *The Specter of Genocide Mass Murders in Historical Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Mortimer, Rex. *Indonesian Communism Under Soekarno*. Yogyakarta: Puskata Pelajar, 2011.
- Parker, Lyn. *From Subjects to Citizens: Balinese Villagers in the Indonesian Nation-State*. Nordic Institute of Asian Studies, 2003.
- Redaksi Tempo. "Dari Pengakuan Algojo 1965." *Majalah Tempo*. Liputan Khusus Edisi 1- 7 Oktober 2012, 7 Oktober 2012.
- Robinson, Geoffrey. *Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik*. Yogyakarta: LKIS, 2006.
- Sulistyo, Hermawan. *Palu Arit di Ladang Tebu; Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan 1965-1966*. Jakarta: KPG, 2000.

Gerakan Islam Radikal di Sulawesi Selatan: Pola Rekrutmen dan Pola Gerakan Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) dan Laskar Jundullah

Bambang Karsono

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

e-Mail: ubj@ubharajaya.ac.id

Abstract

Preparatory Committee for the Upholding of Islamic Law (KPPSI) was established on 28 May 2000. Laskar Jundullah is an autonomous body under the KPPSI, but there is no effective coordination between Laskar Jundullah and KPPSI. In recruitment, membership of the KPPSI takes place openly, whereas Laskar Jundullah is more closed. This research explains the relationship between the two organizations, intended as a reference model to understand radical religious movements in the region. The data collected through interview, literature reviews, papers and related news. This study shows that an Islamic organization is not free from intact with radical Muslim groups. In fact, loose structure its even makes the organization more vulnerable to being used by the radical groups.

Keywords: Laskar Jundullah; KPPSI; Islamic Community Congress; radical movement; Shari'a regional regulations

Abstrak

Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) didirikan pada 28 Mei 2000. Laskar Jundullah merupakan badan otonom di bawah KPPSI, namun demikian tidak terdapat koordinasi yang efektif antara Laskar Jundullah dan KPPSI. Dalam hal perekrutan kenaggotaan KPPSI berlangsung secara terbuka, sebaliknya Laskar Jundullah lebih tertutup. Penelitian ini mencoba menjelaskan hubungan antara keduanya, sekaligus diharapkan bisa menjadi rujukan dalam upaya memahami pergerakan salah satu model dari gerakan radikal keagamaan di daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, penelusuran artikel, makalah, dan berita terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi Islam yang bersifat terbuka bukanlah jaminan terbebas dari hubungannya dengan kelompok radikal. Bahkan karena sifatnya yang longgar, rentan untuk dimanfaatkan.

Kata kunci: Laskar Jundullah; KPPSI; Kongres Umat Islam; gerakan radikal; Perda Syariat

Pendahuluan

Gerakan radikal kerap ditengarai sebagai reaksi dari sistem yang otoriter. Manuel Castells Oliván—sosiolog Spanyol, pakar ilmu sosial dan komunikasi—menyebutnya sebagai proses pembentukan identitas dalam kondisi tertekan oleh pihak lain, sehingga membangun resistansi dengan tujuan keberlangsungan hidup kelompok dan golongan. Identitas ini bisa digunakan untuk menggambarkan aksi Islam radikal, sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan, kefrustrasian, dan kekecewaan.¹ Politik identitas ini—menurut Samuel Huntington—menguat sebagai alternatif bagi penggantian pemerintahan otoriter dan bersaing dengan institusi modern yang masih lemah.² Pada pengalaman Orde Baru, di bawah militer, kelompok Islam bergerak secara diam-diam, bergerilya melakukan perlawanan ‘bawah tanah’. Di bawah tekanan sistem yang represif, gerakan Islam mengendap dengan strategi gerakan bawah tanah, hingga terbuka kesempatan politik sebagai medium perkembangan gerakan.³ Hal yang sering dijadikan argumen oleh gerakan Islam, terkait dengan sejarah awal pembentukan negara Indonesia, bahwa kelompok Islam memainkan peran penting membangun bangsa Indonesia, namun mengalami perlakuan diskrimantif dari pemerintah.

Salah satu peristiwa tragis yang dapat dijadikan contoh adalah kerusuhan Tanjung Priok. Kerusuhan Tanjung Priok kemudian digunakan oleh pemerintah sebagai alasan untuk menindak keras segala bentuk radikalisme Islam. Para dai dan politisi yang bersuara keras, bersama dengan orang-orang yang benar-benar bergaris keras, ditangkap, diadili dan dipenjara. Bahkan Islam digambarkan sebagai kekuatan ‘ekstrem kanan’—yang seperti ‘ekstrem kiri’, komunisme—harus dikontrol oleh pemerintah.⁴

Pengalaman pahit yang dirasakan kelompok Islam tersebut kemudian menjadi bentuk perlawanan. Mengikuti pemahaman fakta sosial, bahwa radikalisme adalah sebuah gerakan yang terkait atau disebabkan oleh fakta lain. Genealogi radikalisme dapat ditilik dari adanya tekanan politik penguasa. Di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia,

¹ Muzayyin Ahyar, “Membaca gerakan Islam radikal dan deradikalisasi gerakan Islam,” *Walisono* 23, no. 1 (2015): 22, doi:10.21580/WS.23.1.220.

² Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, ed., *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), 34.

³ Dady Hidayat, “Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia pada Era Reformasi,” *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 17, no. 2 (9 Juli 2012): 124, doi:10.7454/mjs.v17i2.3738.

⁴ Adrian Vickers, *Sejarah Indonesia Modern*, trans. oleh Arif Maftuhin (Yogyakarta: Insan Madani, 2011), 273–74.

radikalisme muncul sebagai akibat otoritarianisme.⁵ Ditambah sebelumnya telah ada pengalaman cita-cita mendirikan negara Islam seperti DI/TII pimpinan S.M. Kartosoewirjo. Baru kemudian menjelang akhir kekuasaan Presiden Soeharto, kelompok-kelompok Islam yang tadinya terpinggirkan, mendapat tempat yang lebih 'strategis'.⁶

Marjinalisasi dan diskriminasi menjadi salah satu alasan kuat munculnya gerakan radikal—baik yang berbasis keagamaan maupun yang tidak berbasis keagamaan. Gerakan radikal adalah respon dari masyarakat yang merasa tidak mendapat perlakuan adil dan tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara—misalnya kurang atau tertutupnya akses ke sumber daya. Radikalisme adalah cara masyarakat bersikap terhadap kekuasaan.⁷ David Wright-Neville—*Australian academic*, spesialis hubungan internasional dan terorisme, mengklasifikasikan gerakan Islam di Malaysia dan Indonesia menjadi *activist*, *militant*, dan *terrorist*. Kategori ini untuk membedakan tiga macam agenda aksi: aksi yang bertujuan sekadar mengubah kebijakan politik agar bernuansa Islami; aksi yang bertujuan bukan saja untuk mengubah kebijakan, tapi juga untuk mengganti hierarki politik yang lebih berpihak pada umat Islam; dan aksi yang bertujuan melakukan perubahan radikal terhadap tatanan sosial dengan menggunakan kekerasan.⁸

Lahirnya kelompok-kelompok radikal keagamaan merupakan respon kekecewaan terhadap peran negara. Alasan lain munculnya gerakan radikalisme adalah kegagalan rezim sekular dalam merumuskan kebijakan dan mengimplementasikannya ke dalam kehidupan masyarakat. Kegagalan pembangunan yang mengakomodasi teori-teori modernisasi, ternyata berdampak terhadap ketidakpercayaan masyarakat terhadap model pembangunan yang diadopsi dari pengalaman negara Barat.⁹ Dengan demikian, antara negara dan masyarakat, keduanya saling menopang tumbuhnya bibit-bibit radikalisme. Ketika negara (dianggap)

⁵ Nur Syam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 124.

⁶ Lebih lengkapnya dapat dibaca: M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

⁷ Perihal diskriminasi dan ketidakadilan sebagai faktor pemicu munculnya benih radikalisme, dapat juga merujuk pada: Ali Asghar, *Men-Teroris-Kan Tuhan!: Gerakan Sosial Baru* (Jakarta: Pensil-324, 2014). Risetnya fokus pada isu ketidakadilan struktural terhadap Politik Islam sehingga melahirkan radikalisme.

⁸ Eric Hiariiej, "Aksi dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 14, no. 2 (November 2010): 132–33, doi:<https://doi.org/10.22146/jsp.10934>.

⁹ Syam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*, 125.

gagal mengimplementasikan keadilan hukum sebagai upaya melindungi warganya, radikalisme keagamaan muncul sebagai upaya perlindungan diri akibat kegagalan negara tersebut. Meskipun sinyalemen ini masih menyimpan kedangkalan makna, karena sifat tafsirnya yang sektarian dan kurang mengedepankan kepentingan yang lebih umum, dan inklusif dalam menciptakan hubungan sosial kemasyarakatan.¹⁰

Pada 2015, Mabes Polri memetakan gerakan radikal di Indonesia – terdapat 17 organisasi, 4 di antaranya terpantau menyusup ke wilayah Sulawesi Selatan: Mujahidin Indonesia Timur (MIT), ISIS, Laskar Jundullah, dan Negara Islam Indonesia (NII). Empat organisasi tersebut terindikasi menggunakan paham radikalisme. Khusus Laskar Jundullah dan NII, keduanya ditengarai berafiliasi dengan paham kelompok ISIS di Sulsel. Di Sulsel, terdapat delapan daerah yang diduga menjadi basis gerakan dan paham radikalisme, yaitu: Kabupaten Wajo, Sidrap, Bone, Luwu, Bulukumba, Enrekang, Gowa, dan Maros.¹¹

Penelitian ini dilakukan pada 2009, namun hasilnya belum pernah disebarluaskan. Kemudian dilakukan penyesuaian data sesuai perkembangannya. Pengumpulan dilakukan dengan metode wawancara, penelusuran artikel, makalah, dan berita terkait.

KPPSI

Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) dibentuk sebagai hasil dari Kongres Umat Islam se-Sulawesi Selatan – diselenggarakan pertama kali di Asrama Haji Sudiang, Makassar pada 19–20 Oktober 2000. Kongres merekomendasikan terbentuknya sebuah forum (lembaga) yang bisa menjadi wadah bagi semua komponen strategis masyarakat di Sulawesi Selatan untuk mendorong dan memfasilitasi wacana yang lebih terbuka dan konstruktif tentang agenda Pemberlakuan Syariat Islam.

Pada saat kampanye internasional untuk memerangi terorisme (*war on terror*) – pasca peledakan gedung WTC dan Pentagon di Amerika Serikat – KPPSI dan Laskar Jundullah pun menjadi sorotan publik. Pandangan ini kemungkinan disebabkan oleh kedekatan Agus Dwikarna, pimpinan Laskar Jundullah, dengan Umar al-Faruq, seorang yang disebut-sebut sebagai agen al-Qaidah di Asia Tenggara. Selain itu, di tahun 2001, Dwikarna mengirim anggota Laskar Jundullah ke Afghanistan untuk berlatih merakit bom dengan bantuan al-Faruq. Tokoh Laskar Jundullah

¹⁰ Dede Mariana, “Radikalisme Agama & Politik,” *Pikiran Rakyat*, 2017.

¹¹ “Empat Jaringan Radikal Menyusup ke Sulsel,” *Jawa Pos*, 12 Mei 2015.

lainnya yang juga dikenal dekat dengan al-Faruq adalah Mukhtar Daeng Lau – Wakil Panglima Laskar Jundullah.¹²

Berdasarkan pada perkembangan global isu terorisme tersebut, maka pada Kongres Umat Islam II – diselenggarakan pada 19-31 Desember 2001 – KPPSI mempertegas visi pembentukan dan perjuangannya, yakni: “KPPSI adalah wahana aliansi yang bersifat independen dengan mempersatukan segenap potensi umat Islam Sulawesi Selatan untuk tegaknya Syariat Islam.” Adapun pola perjuangan dan tujuan strategisnya dirumuskan dalam misi: “Penegakan Syariat Islam di Sulawesi Selatan secara legal formal melalui perjuangan politik konstitusional, demokratis dan tegas dalam bingkai NKRI, guna memperoleh otonomi khusus, sehingga syariat Islam menjadi sumber rujukan dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara.”¹³

Berdasarkan pada misi tersebut, maka terdapat tiga pilar perjuangan KPPSI, yaitu: *pertama*, konstitusional, dengan demikian, pilihan Negara Islam menjadi tidak relevan. *Kedua*, demokratis, praktik dan perjuangan KPPSI bukan melalui jalur kekerasan. *Ketiga*, perjuangan KPPSI tetap dalam bingkai NKRI. Tiga prinsip perjuangan tersebut memberikan garansi bahwa KPPSI adalah organisasi terbuka.¹⁴ KPPSI bersifat organisasi aliansi, yang berfungsi sebagai lembaga koordinasi, dalam rangka mengoptimalkan seluruh potensi umat Islam Sulawesi Selatan.

Cakupan program KPPSI meliputi berbagai bidang yang secara langsung bersentuhan dengan struktur kekuasaan politik negara. program tersebut, meliputi:¹⁵

1. Bidang politik yang membangun kekuatan umat Islam dalam upaya memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara konstitusional dan berbagai persoalan lain;
2. Bidang hukum dan perundang-undangan yang merumuskan aturan-aturan hukum dan perundang-undangan berdasarkan syariat Islam beserta program lainnya;

¹² Zulfadli, “Radikalisme Islam dan Motif Terorisme di Indonesia,” *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 1 (22 Juni 2017): 184, doi:10.32332/akademika.v22i1.570. Informasi tentang Umar al-Faruq, dapat juga merujuk ke Bambang Karsono, *Jejak Aktivis JAT: Studi Kasus JAT & Jaringan Aceh-Pamulang* (Jakarta: Ubhara Jaya Press, 2018), 70.

¹³ Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam, “Mengenal KPPSI Sulsel: Otonomi Khusus Sulawesi Selatan untuk Tegaknya Syariat Islam,” Diklat (KPPSI, 2003), 9.

¹⁴ Wawancara dengan Sekjen KPPSI, Aswar Hasan, di Makassar, 18 September 2003 dalam Tim Peneliti Staf Ahli Bidang Sosial Budaya BIN, *Laskar Jundullah Sulawesi Selatan; Perspektif Keamanan dan Sosial Budaya* (Jakarta: Badan Intelijen Negara, 2009), 26.

¹⁵ Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-kekuatan Politik Indonesia; Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2016), 241–42.

3. Bidang ekonomi dan perdagangan yang menekankan pada aspek perumusan aturan-aturan perekonomian dan perdagangan berdasarkan syariat Islam dan menyosialisasikannya kepada seluruh umat Islam;
4. Bidang pendidikan yang bertugas merumuskan sistem pendidikan Islam yang menjaga umat dari pola pikir sekularisme dan materialisme yang sangat mengancam akidah umat Islam;
5. Bidang sosial budaya yang merumuskan aturan kehidupan bermasyarakat Muslim dan non-Muslim dalam batas-batas syariat Islam;
6. Bidang hubungan kelembagaan dan masyarakat yang menekankan pada pembentukan perwakilan masyarakat Sulawesi Selatan pendukung penegak syariat Islam di Sulawesi Selatan yang berada di luar Sulawesi Selatan; dan
7. Bidang laskar penegak syariat Islam yang bertugas membentuk Laskar Jundullah sebagai pengawal penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan.

Pembentukan Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) pada tahun 2000 menimbulkan keresahan di Sulawesi. Tujuan utamanya adalah otonomi khusus untuk Sulawesi Selatan untuk memfasilitasi pemberlakuan hukum syariat. Pada Desember 2001 KPPSI mengumumkan sebuah rancangan undang-undang mengenai pemberlakuan Syariat di Sulawesi Selatan, dan mengusulkan agar provinsi itu diberi status sama dengan Aceh. Agenda politik KPPSI dan hubungan-hubungannya dengan Islam Ekstremis menimbulkan keprihatinan yang semakin meningkat mengenai ambisi-ambisi Islam politis di Sulawesi.¹⁶

Kongres Umat Islam IV (6-7 Februari 2010) Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI), mempertegas komitmen pemberlakuan syariat Islam di Sulawesi Selatan. Kongres membahas upaya pembebasan Agus Dwikarna, yang ditahan di Filipina karena memperjuangkan Syariat Islam.¹⁷

Perkembangan wacana penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan, kemudian direspons oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan

¹⁶ ICG (2002); Dias Pradadimara & Burhaman Junedding (2002) dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, ed., *Politik Lokal di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta, 2014), 181.

¹⁷ Tempo.co, "Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam Sulsel Pertegas Urgensi," *TEMPO Interaktif*, 2 Februari 2010, <https://nasional.tempo.co/read/222968/komite-persiapan-penegakan-syariat-islam-sulsel-pertegas-urgensi/full&view=ok>.

melakukan jajak pendapat, melibatkan 280 responden di 24 kabupaten/kota. Hasilnya, 91 persen responden mendukung penegakan Syariat Islam, meski demikian didapati bahwa pemahaman tentang Syariat Islam masih bervariasi – tidak terdapat keseragaman konsep.¹⁸

Di Sulawesi Selatan, daerah yang pertama memberlakukan perda berbasis Syariat Islam adalah Kabupaten Bulukumba. Bulukumba menetapkan Perda No. 3 Tahun 2003 tentang larangan, pengawasan, penertiban, dan penjualan miras; Perda No. 2 Tahun 2003 tentang pengelolaan zakat, infaq dan sodaqoh; Perda No. 5 Tahun 2003 tentang berpakaian muslim dan muslimah.¹⁹

Laskar Jundullah

Laskar Jundullah adalah organisasi tertutup yang muncul sejak tahun 2000. Terlibat cukup mencolok dalam konflik Poso dan Ambon. Laskar Jundullah kemudian semakin dikenal ketika sebagian anggotanya terbukti terlibat dalam aksi bom Makassar, Desember 2002.²⁰

Laskar Jundullah mulai diperkenalkan ke publik saat dialog terbuka “Pelaksanaan Syariat Islam” di Sulawesi Selatan – 28 Mei 2000 – berbarengan dengan kelahiran Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI). Laskar Jundullah disahkan pada Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Oktober 2000. Sejak awal kehadirannya, Laskar Jundullah menginduk ke KPPSI.²¹

Itulah sebabnya pertemuan KPPSI di Makassar dijaga ketat oleh kelompok paramiliter yang disebut Laskar Jundullah (Tentara Allah), satuan tugas pengamanan reguler KPPSI.²² Ketika hubungan antara Laskar Jundullah dengan kekerasan ekstremisme Islam terkuak, KPPSI

¹⁸ Tempo.co, “91 Persen Warga Sulawesi Selatan Mendukung Syariat Islam,” *TEMPO Interaktif*, 17 Juli 2003, <https://nasional.tempo.co/read/1804/91-persen-warga-sulawesi-selatan-mendukung-syariat-islam>.

¹⁹ Dalmeri, “Prospek Demokrasi: Dilema antara Penerapan Syariat Islam dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Salam: Jurnal Studi Masyarakat Islam* 15, no. 2 (Desember 2012): 233, [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=97959&val=276&title=Prospek Demokrasi: Dilema antara Penerapan Syariat Islam dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=97959&val=276&title=Prospek%20Demokrasi%3A%20Dilema%20antara%20Penerapan%20Syariat%20Islam%20dan%20Penegakan%20Hak%20Asasi%20Manusia%20di%20Indonesia).

²⁰ Tim Peneliti Staf Ahli Bidang Sosial Budaya BIN, *Laskar Jundullah Sulawesi Selatan; Perspektif Keamanan dan Sosial Budaya*, 41.

²¹ Hidayat Tantan, Zaenal Dalle, dan Kholis Bahtiar Bakri, “O...O... Komandan Terjebak Bom,” *Gatra*, Laporan Utama, 25 Maret 2002.

²² Muhamad Hisyam, “The Preparatory Committee for Implementation of Sharia (KPPSI): An Islamic Resurgence in South Sulawesi,” 16–17, diakses 29 Oktober 2018, [http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/68069/1/ISEA11_session_1-1\[Muhamad](http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/68069/1/ISEA11_session_1-1[Muhamad).

menjauhkan diri dari organisasi itu.²³ Meskipun sebelumnya Sekjen KPPSI pernah membantah anggapan bahwa Laskar Jundullah disiapkan sebagai sayap “militer” KPPSI. Alasannya, laskar ini hanya menjadi petugas pengamanan pelaksanaan syariat Islam.²⁴

Selain mengirim pasukan ke wilayah konflik – Poso dan Ambon – Laskar Jundullah juga melakukan kampanye melawan prostitusi, pornografi, minuman keras, obat-obat terlarang, dan perjudian.²⁵ Misalnya, tidak lama setelah berdiri, mereka merazia Pub dan Karaoke The Blues di Hotel Country Inn di Jalan Haji Bau serta Diskotek Terminal One di Jalan Russa, Makassar.²⁶

Laskar Jundullah merupakan organisasi paramiliter yang tidak berafiliasi dengan organisasi massa Islam besar mana pun. Dari namanya, bisa dikatakan bahwa Laskar Jundullah memang dibentuk untuk menjaga penegakan syariah.²⁷

Laskar Jundullah dipimpin oleh Agus Dwikarna, organisasi ini didirikan di Makassar dalam September 2000. Dwikarna adalah seorang anggota komite eksekutif MMI. Agus Dwikarna pernah ditahan di Filipina pada tahun 2002 atas tuduhan kepemilikan bahan-bahan peledak dan menjadi anggota jaringan yang terkait dengan Al Qaeda. Selain itu, Agus Dwikarna juga dituding terlibat pengeboman Kedutaan Besar Filipina di Jakarta, jual-beli senjata, dan pengeboman Kedutaan Besar Amerika di Filipina. Hingga kemudian dibebaskan pada 31 Desember 2013.²⁸

Laskar Jundullah adalah milisi regional di Sulawesi Selatan, yang diklaim memiliki hubungan historis dengan gerakan Darul Islam. Juga terlibat aktif di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dalam konflik antara Kristen dan Muslim.²⁹

²³ ICG (2003, 2004); Dias Pradadimara & Burhaman Junedding (2002) dalam Nordholt dan Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, 181–82.

²⁴ “Wawancara dengan Sekjen KPPSI, Aswar Hasan” (Makassar, 18 September 2003) dalam Tim Peneliti Staf Ahli Bidang Sosial Budaya BIN, *Laskar Jundullah Sulawesi Selatan; Perspektif Keamanan dan Sosial Budaya*.

²⁵ Hiariej, “Aksi dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal di Indonesia,” 143.

²⁶ Tantan, Dalle, dan Bakri, “O...O... Komandan Terjebak Bom.”

²⁷ Hisyam, “The Preparatory Committee for Implementation of Sharia (KPPSI): An Islamic Resurgence in South Sulawesi,” 16–17.

²⁸ ICG (2002) dalam Nordholt dan Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, 181. Lihat juga: “Filipina Bebaskan Agus Dwikarna Setelah Ditahan Lebih 11 Tahun,” *Tribunnews.com*, 3 Januari 2014, <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/03/filipina-bebaskan-agus-dwikarna-setelah-ditahan-lebih-11-tahun>.

²⁹ Martin van Bruinessen, “The violent fringes of Indonesia’s Islam,” *ISIM Newsletter*, 11 Desember 2002, <https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/20380>.

Sejak awal keberadaannya, pembicaraan mengenai KPPSI, selalu diasosiasikan secara langsung dengan nama Laskar Jundullah. Laskar Jundullah memang merupakan amanat Kongres Umat Islam I tahun 2000 di Makassar. Amanat tersebut dituangkan dalam program membentuk Laskar Penegak Syariat Islam, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Laskar Jundullah.

Namun, setelah tertangkapnya Agus Dwikarna, Laskar Jundullah seolah hilang dari peredaran. Ketika diwawancarai, Dr. Hamka Haq dengan tegas mengatakan, bahwa dia tidak tahu apa itu Laskar Jundullah.³⁰ Senada dengan pernyataan Prof. Dr. Basalamah—pernah menjabat sebagai pembina KPPSI—bahwa tidak ada lagi Laskar Jundullah.³¹

Menariknya memang, dalam Kongres Umat Islam I laskar ini disebut sebagai Laskar Penegak Syariat Islam, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Laskar Jundullah.

Tertangkapnya Agus Dwikarna banyak mempengaruhi kegiatan-kegiatan Laskar Jundullah. Namanya kembali muncul setelah dinyatakan bahwa dua orang tersangka pengeboman Mc Donald di Makassar adalah anasir dari Laskar Jundullah.

Pola Rekrutmen dan Pola Gerakan

Secara umum, tidak banyak informasi dan data yang dapat menggambarkan model organisasi laskar Jundullah. Secara organisatoris, Laskar Jundullah merupakan badan otonom di bawah KPPSI. Namun dalam hal perekrutan keanggotaan KPPSI berlangsung secara terbuka, sebaliknya Laskar Jundullah lebih tertutup. Konsekuensinya, anggota Laskar Jundullah harus melewati proses rekrutmen khusus dan nyaris tidak mengandalkan catatan administrasi. Dan ini merupakan ciri organisasi yang menerapkan sistem sel tertutup.

Sebagai badan otonom dari KPPSI, Laskar Jundullah memiliki kepengurusan yang berdiri sendiri. Dan tampaknya tidak ada koordinasi efektif antara KPPSI dengan kegiatan-kegiatan Laskar Jundullah.

Pola rekrutmen anggota Laskar Jundullah dapat digambarkan sebagai berikut: *pertama*, anggota resmi akan mendekati calon anggota.

³⁰ "Wawancara dengan Dr. Hamka Haq" (17 September 2003) dalam Tim Peneliti Staf Ahli Bidang Sosial Budaya BIN, *Laskar Jundullah Sulawesi Selatan; Perspektif Keamanan dan Sosial Budaya*.

³¹ "Wawancara dengan Prof. Dr. Basalamah" (Makassar, 19 September 2003) dalam *ibid.*

Proses pendekatan bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui kedekatan kekerabatan, atau sama-sama pernah aktif pada sebuah organisasi. Kegiatan paling sering dilakukan adalah mengajak calon anggota mengikuti pengajian umum dengan materi yang masih bersifat umum.

Kedua, calon anggota akan dideteksi latar belakang kegiatannya, keluarganya, dan pemikirannya. *Ketiga*, calon anggota akan mulai diperkenalkan visi dan misi organisasi, tapi bersifat umum. *Keempat*, setelah calon anggota menunjukkan loyalitasnya pada organisasi, maka mulai direkrut melalui proses rekrutmen khusus dengan materi khusus, misalnya membuat penyamaran yang efektif, sasaran inti organisasi, dan sterusnya.

Kelima, setelah mampu membuktikan diri sebagai anggota yang potensial, calon anggota akan di-baiat (disumpah) oleh anggota senior. Dengan demikian, calon anggota tersebut dinobatkan sebagai anggota resmi, dan wajib mengikuti pola dan peraturan organisasi, seperti taat dan patuh pada pimpinan di kelompoknya dan pimpinan teras organisasi; kepentingan pribadinya dilebur dengan kepentingan organisasi; siap ditugaskan di mana dan kapan pun serta tugas apapun; dan tentu harus menjaga kerahasiaan organisasi.

Oleh karena itu, tidak aneh jika Laskar Jundullah tidak banyak diketahui oleh publik. Bahkan sebagian besar pengurus KPPSI tidak mengetahui secara terperinci tentang keberadaan Laskar Jundullah.

Menurut keterangan Sekjen KPPSI, Laskar Jundullah memiliki anggota sekitar 10.000 (sepuluh ribu) orang dengan usia rata-rata di bawah tiga puluh tahun. Namun, tidak ada data konkret untuk membuktikan jumlah tersebut.³² Jika berdasar pada data majalah Gatra, disebutkan bahwa Laskar Jundullah mengklaim punya 5.000 anggota.³³ Namun berdasarkan keterangan salah seorang anggota Laskar Jundullah, bahwa yang benar-benar aktif hingga di tahun 2003 diperkirakan hanya sekitar 300-an orang.

Laskar Jundullah mengandalkan tiga jenis jaringan untuk perekrutan anggota. *Pertama*, para pengikut Darul Islam, khususnya pengikut Sanusi Daris –menjabat Menteri Pertahanannya Qahar Mudzakkar. *Kedua*, faksi garis keras dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO). Agus Dwikarna berlatar belakang

³² “Wawancara dengan Sekjen KPPSI, Aswar Hasan” (Makassar, 18 September 2003) dalam ibid.

³³ Tantan, Dalle, dan Bakri, “O...O... Komandan Terjebak Bom.”

HMI-MPO. *Ketiga*, umat Muslim lokal di wilayah konflik, seperti Ambon dan Poso.³⁴

Seperti umumnya organisasi radikal, Laskar Jundullah tampaknya sangat hati-hati. Kerahasiaan gerakan dianggap sebagai kunci sukses perjuangan hingga masa mendatang. Cara-cara rahasia yang dimaksud: *pertama*, kerahasiaan kegiatan, yaitu bergerak secara diam-diam tanpa tergiur memamerkan kepada publik. Dapat juga bergerak dengan mengatasnamakan lembaga tertentu. Pertemuan-pertemuan dapat dilakukan dengan cara kunjungan wisata, namun hanya pucuk pimpinan yang berhak menentukan jenis kegiatan. *Kedua*, kerahasiaan organisasi, yakni struktur organisasi dirahasiakan untuk umum, terutama bagi musuh-musuh dakwah Islam. Bahkan ada beberapa divisi atau biro organisasi yang harus dirahasiakan dari anggota biasa, dengan pertimbangan bisa saja tanpa sadar membuka rahasia ini kepada musuh-musuh dakwah Islam. Karena itu, pimpinan harus mampu memberi pengertian kepada anggotanya tentang kebijakan kerahasiaan struktur organisasi.³⁵

Ketiga, kerahasiaan pimpinan, yakni merahasiakan nama-nama anggota pimpinan kepada khalayak, terutama staf pimpinan yang bertanggung jawab dalam gerakan. Dalam hal kerahasiaan individu, bisa dengan cara menggunakan nama samaran.³⁶

Pola Klaster-klaster

Untuk menggambarkan jaringan pola kelompok radikal organisasi Islam garis keras, mungkin contoh yang bisa mewakili adalah kisah pembunuhan Presiden Mesir, Anwar Saddat, pada 6 Oktober 1981. Menurut data dan keterangan yang muncul selama pengadilan, para tersangka – Khalid Islambuli, “Atha Thayil Hamidah Rahil, dan Husain Abbas Muhammad – ternyata tiga eksekutor pembunuhan tersebut tidak pernah mendapat perintah pembunuhan dari atasannya (*amir*) secara langsung.³⁷

³⁴ International Crisis Group, “Indonesia Backgrounder: How The Jemaah Islamiyah Terrorist Network Operates,” *ICG Asia Report N°43* (Jakarta/Brussels: International Crisis Group, 11 Desember 2002), 25, [http://www.seasite.niu.edu/indonesian/islam/ICG-Indonesia Backgrounder Jl.pdf](http://www.seasite.niu.edu/indonesian/islam/ICG-Indonesia%20Backgrounder%20Jl.pdf).

³⁵ Syaikh Mushthafa Mansyhur, *Amal Jama’i*, trans. oleh Abu Ridha, Cetakan Kedua (Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Ummat, 2003), 60–63.

³⁶ Ibid.

³⁷ Muhammad Hasanain Haikal, *Khariful-gadhab: Kisah Pembunuhan Anwar Saddat* (Cairo: Markazul-Ahram, 1987), 421.

Fakta tersebut menunjukkan telah terjadi kemajuan dalam mekanisme dan garis komando pada organisasi Islam garis keras. Terjadi perubahan sistem jaringan organisasi dari “metode laba-laba” menjadi “metode klaster-klaster” (metode gugus atau metode tandan).³⁸

Pada sistem klaster-klaster – biasanya beranggotakan tujuh sampai sembilan orang – membentuk kelompok yang berbentuk gugus. Kemudian akan muncul kelompok lain dengan jumlah dan formasi yang sama, dan begitu seterusnya. Masing-masing gugus berdiri sendiri. Setiap klaster dapat terurai dari satu titik/sumber. Memotong jaringan satu klaster-klaster tidak akan berpengaruh pada posisi klaster-klaster pusat, demikian juga dengan klaster-klaster lainnya.

Dengan demikian, sistem klaster ini jauh lebih efektif dibanding “sistem laba-laba”. Sebab, dalam sistem laba-laba, jika bagian luar jaringan terganggu – misalnya, ada anggota yang tertangkap – maka akan mudah terlacak sampai ke titik pusat jaringan. Minimal, pusat jaringan akan sangat terganggu dan membuang banyak energi untuk waspada.

Pola klaster ini mungkin sedikit bisa menjelaskan pola laskar Jundullah. Bahwa keterlibatan anasir dari Laskar Jundullah dalam aksi pengeboman tidak serta merta menyeret Organisasi Laskar Jundullah secara keseluruhan. Misalnya, terjadi pengeboman pada 5 Desember 2002 di Makassar tepatnya di Restoran McDonald’s, berlokasi di lantai dasar Mal Ratu Indah – menyebabkan 3 orang meninggal, 15 orang luka-luka – dan ledakan di Show Room NV Hadji Kalla di Jalan Urip Sumoharjo. Dari peristiwa pengeboman itu, polisi menetapkan 6 tersangka, yakni: Azhar Daeng Salam (tewas saat membawa bom di McDonald’s), Muchtar Daeng Lau, Usman, Agung Hamid, Mas Nur, dan Ilham.³⁹ Ilham adalah salah satu anggota Laskar Jundullah, yang dipimpin oleh Agung Hamid – kepemimpinan setelah Agus Dwikarna.⁴⁰ Nama lain yang muncul adalah Antaon Labase. Sesuai pengakuannya, ia menyesali keterlibatannya dalam bom makassar. Alasannya, setiap tindakan dilakukan berdasarkan emosional untuk membela umat Islam, dan tidak memperhatikan sisi legalitas Syar’i-nya.⁴¹

³⁸ Ibid.

³⁹ Tempo.co, “Polisi Tetapkan 6 Tersangka Bom Makassar,” *TEMPO Interaktif*, 9 Desember 2003, <https://nasional.tempo.co/read/33921/polisi-tetapkan-6-tersangka-bom-makassar>.

⁴⁰ “Terdakwa Bom Makassar Akui Simpan 5 Karung Potasium,” *detiknews*, 2 Juni 2005, <https://news.detik.com/berita/373692/terdakwa-bom-makassar-akui-simpan-5-karung-potasium>.

⁴¹ Keterangan Anton Labase, Kamis, 16 Agustus 2007 dalam Tim Peneliti Staf Ahli Bidang Sosial Budaya BIN, *Laskar Jundullah Sulawesi Selatan; Perspektif Keamanan dan Sosial*

Meskipun ada anggotanya yang terkait dengan aksi pengeboman, Laskar Jundullah masih tetap eksis meskipun semakin jarang terdengar. Misalnya di Bulukumba, karena telah terbit Perda Syariah, pada 2013 Laskar Jundullah selaku “polisi syariat” mendatangi Ramayana untuk meminta pihak manajemen agar memerintahkan karyawannya memakai jilbab.⁴²

Catatan Penutup

Dalam perjalanannya, perjuangan penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan, terdapat kekhawatiran di kalangan internal KPPSI, bahwa apabila wacana pemberlakuan syariat Islam disampaikan secara terbuka, maka akan mudah KPPSI dikaitkan dengan DI/TII Qahar Mudzakkar. Untuk itu, Ketua Umum KPPSI, Abd Aziz Qahar Mudzakkar – putra bungsu Qahar Mudzakkar – memberikan penjelasan bahwa perjuangannya berbeda dari bapaknya dalam hal metode, namun secara substansi merupakan kelanjutan perjuangannya.

Pola perjuangan KPPSI tampak cepat menuai hasil dengan ditetapkannya Perda berbasis Syariat Islam. Namun ia juga mendapat tentangan dari berbagai komponen masyarakat, seperti yang dipelopori oleh LAPAR (Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat) Makassar.⁴³ KPPSI memahami bahwa tujuan penegakan syariat Islam akan efektif dilakukan dengan memanfaatkan sistem politik yang sedang berjalan.

Sejak awal kehadirannya, Laskar Jundullah telah menimbulkan kesan menakutkan di sebagian kalangan, bahkan dari peserta Kongres Umat Islam sendiri. Penjagaan ketat oleh Laskar Jundullah memberikan kesan keras. Terdapat kritikan, bahwa kongres telah menyebarkan rasa takut.⁴⁴

Penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi Islam yang bersifat terbuka – meskipun mendasarkan pola gerakannya berdasarkan konstitusi negara – bukanlah jaminan terbebas dari hubungannya dengan kelompok radikal. Bahkan karena sifatnya yang longgar, rentan untuk

Budaya, 97.

⁴² “Karyawan Ramayana Bulukumba Diminta Berjilbab,” *Tribun-Timur.com*, 30 Juni 2013, <http://makassar.tribunnews.com/2013/06/30/karyawan-ramayana-bulukumba-diminta-berjilbab>.

⁴³ Dalmeri, “Prospek Demokrasi: Dilema antara Penerapan Syariat Islam dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” 233.

⁴⁴ Hisyam, “The Preparatory Committee for Implementation of Sharia (KPPSI): An Islamic Resurgence in South Sulawesi,” 17.

dimanfaatkan. Meskipun telah ada jaminan dari Ketua Umum KPPSI, namun tetap perlu diingat bahwa proses radikalisasi tetap mengacu kepada semacam proses perubahan – sering kali secara sengaja dan sistematis difasilitasi atau diarahkan oleh orang lain.⁴⁵ Sedangkan untuk organisasi tertutup sektarian pada dasarnya, sangat terbuka kemungkinan bertransformasi menjadi gerakan radikal.

Perjuangan yang ditunjukkan oleh KPPSI – juga Laskar Jundullah – menunjukkan bahwa wacana penegakan syariat Islam memiliki pengaruh kuat dalam penentuan kebijakan, juga bisa menjadi instrumen kekuasaan, baik lokal maupun nasional.[]

Daftar Pustaka

- Ahyar, Muzayyin. "Membaca gerakan Islam radikal dan deradikalisasi gerakan Islam." *Walisongo* 23, no. 1 (2015): 1–26. doi:10.21580/WS.23.1.220.
- Asghar, Ali. *Men-Teroris-Kan Tuhan!: Gerakan Sosial Baru*. Jakarta: Pensil-324, 2014.
- Borum, Randy. "Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories." *Journal of Strategic Security* 4, no. 4 (2011): 7–36. doi:10.5038/1944-0472.4.4.1.
- Bruinessen, Martin van. "The violent fringes of Indonesia's Islam." *ISIM Newsletter*, 11 Desember 2002. <https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/20380>.
- Dalmeri. "Prospek Demokrasi: Dilema antara Penerapan Syariat Islam dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Salam: Jurnal Studi Masyarakat Islam* 15, no. 2 (Desember 2012): 228–39. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=97959&val=276&title=Prospek Demokrasi: Dilema antara Penerapan Syariat Islam dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=97959&val=276&title=Prospek%20Demokrasi:%20Dilema%20antara%20Penerapan%20Syariat%20Islam%20dan%20Penegakan%20Hak%20Asasi%20Manusia%20di%20Indonesia).
- "Empat Jaringan Radikal Menyusup ke Sulsel." *Jawa Pos*, 12 Mei 2015.
- "Filipina Bebaskan Agus Dwikarna Setelah Ditahan Lebih 11 Tahun." *Tribunnews.com*, 3 Januari 2014. <http://www.tribunnews.com/>

⁴⁵ Randy Borum, "Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories," *Journal of Strategic Security* 4, no. 4 (2011): 13, doi:10.5038/1944-0472.4.4.1.

- nasional/2014/01/03/filipina-bebaskan-agus-dwikarna-setelah-ditahan-lebih-11-tahun.
- Haikal, Muhammad Hasanain. *Khariful-gadhab: Kisah Pembunuhan Anwar Saddat*. Cairo: Markazul-Ahram, 1987.
- Hiariej, Eric. "Aksi dan Identitas Kolektif Gerakan Islam Radikal di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 14, no. 2 (November 2010): 131–68. doi:<https://doi.org/10.22146/jsp.10934>.
- Hidayat, Dady. "Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia pada Era Reformasi." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 17, no. 2 (9 Juli 2012): 115–33. doi:10.7454/mjs.v17i2.3738.
- Hisyam, Muhamad. "The Preparatory Committee for Implementation of Sharia (KPPSI): An Islamic Resurgence in South Sulawesi." Diakses 29 Oktober 2018. [http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/68069/1/ISEA11_session_1-1\[Muhamad](http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/68069/1/ISEA11_session_1-1[Muhamad).
- International Crisis Group. "Indonesia Backgrounder: How The Jemaah Islamiyah Terrorist Network Operates." *ICG Asia Report N°43*. Jakarta/Brussels: International Crisis Group, 11 Desember 2002. [http://www.seasite.niu.edu/indonesian/islam/ICG-Indonesia Backgrounder JI.pdf](http://www.seasite.niu.edu/indonesian/islam/ICG-Indonesia_Backgrounder_JI.pdf).
- Jurdi, Syarifuddin. *Kekuatan-kekuatan Politik Indonesia; Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Karsono, Bambang. *Jejak Aktivistis JAT: Studi Kasus JAT & Jaringan Aceh-Pamulang*. Jakarta: Ubhara Jaya Press, 2018.
- "Karyawan Ramayana Bulukumba Diminta Berjilbab." *Tribun-Timur.com*, 30 Juni 2013. <http://makassar.tribunnews.com/2013/06/30/karyawan-ramayana-bulukumba-diminta-berjilbab>.
- Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam. "Mengetahui KPPSI Sulsel: Otonomi Khusus Sulawesi Selatan untuk Tegaknya Syariat Islam." Diklat. KPPSI, 2003.
- Mansyur, Syaikh Mushthafa. *Amal Jama'i*. Diterjemahkan oleh Abu Ridha. Cetakan Kedua. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Ummat, 2003.
- Mariana, Dede. "Radikalisme Agama & Politik." *Pikiran Rakyat*, 2017.
- Nordholt, Henk Schulte, dan Gerry Van Klinken, ed. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta, 2014.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

- Syam, Nur. *Tantangan Multikulturalisme Indonesia: Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Tantan, Hidayat, Zaenal Dalle, dan Kholis Bahtiar Bakri. "O...O... Komandan Terjebak Bom." *Gatra*. Laporan Utama, 25 Maret 2002.
- Tempo.co. "91 Persen Warga Sulawesi Selatan Mendukung Syariat Islam." *TEMPO Interaktif*, 17 Juli 2003. <https://nasional.tempo.co/read/1804/91-persen-warga-sulawesi-selatan-mendukung-syariat-islam>.
- — —. "Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam Sulsel Pertegas Urgensi." *TEMPO Interaktif*, 2 Februari 2010. <https://nasional.tempo.co/read/222968/komite-persiapan-penegakan-syariat-islam-sulsel-pertegas-urgensi/full&view=ok>.
- — —. "Polisi Tetapkan 6 Tersangka Bom Makassar." *TEMPO Interaktif*, 9 Desember 2003. <https://nasional.tempo.co/read/33921/polisi-tetapkan-6-tersangka-bom-makassar>.
- "Terdakwa Bom Makassar Akui Simpan 5 Karung Potasium." *detiknews*, 2 Juni 2005. <https://news.detik.com/berita/373692/terdakwa-bom-makassar-akui-simpan-5-karung-potasium>.
- Tim Peneliti Staf Ahli Bidang Sosial Budaya BIN. *Laskar Jundullah Sulawesi Selatan; Perspektif Keamanan dan Sosial Budaya*. Jakarta: Badan Intelijen Negara, 2009.
- Turmudi, Endang, dan Riza Sihbudi, ed. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Vickers, Adrian. *Sejarah Indonesia Modern*. Diterjemahkan oleh Arif Maftuhin. Yogyakarta: Insan Madani, 2011.
- Zulfadli. "Radikalisme Islam dan Motif Terorisme di Indonesia." *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 1 (22 Juni 2017): 173. doi:10.32332/akademika.v22i1.570.

Book Review

Sumarno Kartodiono

Pusat Kajian Keamanan Nasional,
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
e-mail: sumarno.911@gmail.com



Judul Buku : **Atas Nama Kebencian: Kajian Kasus-kasus Kejahatan Berbasis Kebencian di Indonesia**
Penulis : Maruli C.C. Simanjuntak
Penerbit : YLBHI & MARs
Tahun Terbit : 2015

Abstract

Indonesia in the last few years has been faced with religious-based intra-religious or inter-religious conflicts. What factors can lead to religious sentiment and trigger conflicts in Indonesia are the lighters of discussion in this book. In this book, Maruli CC Simanjuntak shows that utterances of hatred based on religion are one of the triggers for the birth of conflicts in Indonesia. Speeches of hatred have alienated minority groups and endangered their position.

Keywords: utterances; hatred; conflict.

Abstrak

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dihadapkan pada konflik berbasis agama baik intra-agama atau antar-agama. Faktor-faktor apa saja yang bisa menimbulkan sentimen keagamaan dan memicu konflik-konflik di Indonesia menjadi pemantik diskusi dalam buku ini. Dalam buku ini, Maruli CC Simanjuntak menunjukkan bahwa ujaran-ujaran kebencian berbasis agama menjadi salah satu pemicu lahirnya konflik-konflik di Indonesia. Ujaran kebencian telah menyebabkan kelompok minoritas

terasingkan dan membahayakan posisi mereka.

Kata kunci: ujaran; kebencian; konflik.

Banyak sarjana dan pengamat yang berpandangan bahwa ujaran kebencian atau *hate speech* adalah ancaman terhadap berlangsungnya demokrasi. Jika demikian, apakah mungkin suatu ujaran yang didorong oleh gairah keagamaan tertentu bisa dikriminalisasikan? Inilah pertanyaan yang hendak dijawab dalam buku ini, dengan mengambil 6 (enam) kasus penting yang diangkat sebagai studi kasus yang terjadi pada rentang waktu tahun 2009 hingga 2012.

Buku ini merupakan naskah disertasi yang mengantar perwira menengah di Polri tersebut meraih gelar doktor di Universitas Indonesia. Atas dukungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), naskah disertasi tersebut kemudian diangkat menjadi sebuah buku bertajuk "*Atas Nama Kebencian: Kajian Kasus-kasus Kejahatan Berbasis Kebencian di Indonesia.*"

Tesis utama Maruli adalah kejahatan yang terjadi karena ujaran kebencian dapat melahirkan konflik sosial dan kelompok minoritas menjadi terasingkan dan membahayakan posisi mereka. Hal ini didasarkan pada catatan Maruli sepanjang tahun 2009-2012 dimana terjadi serangkaian kekerasan kolektif bernuansa agama, sekte, keyakinan, etnis, golongan dan orientasi seksual. Peristiwa-peristiwa tersebut banyak menyita perhatian publik. Misalnya, pada 30 April 2010, massa dari Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok menyerang puluhan waria yang mengikuti acara kontes waria di Hotel Bumi Wiyata, Depok. Pada awal Agustus, giliran FPI Kota Bekasi menyerang jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Indah Timur Kampung Ciketing Asem, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Pada 2 Desember 2010, masih dengan kelompok pelaku yang sama, FPI membubarkan kontes waria di Makassar pada kegiatan yang dibarengkan dengan peringatan Hari AIDS sedunia.

Ujaran kebencian yang bernuansa agama, juga terjadi di Bogor, yang ditandai dengan aksi demonstrasi massa menentang pelaksanaan ibadah mingguan jemaat GKI Yasmin, Kota Bogor. Lantaran gereja disegel pada 26 Desember 2010, jemaah kemudian menggelar ibadah di trotoar di depan gereja GKI Yasmin tersebut. Sekalipun sudah mengantongi IMB, massa menolak keberadaan GKI di Yasmin.

Hate speech bernuansa keagamaan, seperti tidak berpungkas. Dua bulan setelah kasus GKI Yasmin, jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Provinsi Banten, diserang massa. Tiga orang meregang nyawa. Pada 14 Agustus 2011, FPI menyerang Sekretariat Jemaah

Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jl. Anuang, Makassar. Nasib serupa juga dialami jamaah Syiah, yang mendiami Desa Karanggayam, Kab. Sampang, Madura pada 29 Desember 2011.

Sementara itu pada 8 Februari 2012 sebuah gereja di Temanggung dibakar dan dirusak. Pemicunya, ketidakpuasan kelompok Islam atas dakwaan jaksa terhadap Antonius RichmondBawengan, terkait dengan kasus penodaan agama yang digelar di Pengadilan Negeri Temanggung. Massa mengamuk di ruang persidangan, dan kemudian melebar ke luar gedung. Tiga gereja yang berada tidak jauh dari PN Temanggung pun menjadi sasaran amuk massa.

Maruli dalam buku ini tidak saja menjelaskan konflik-konflik akibat ujaran kebencian, tetapi juga memberikan pandangan kriminalisasi terhadap "ujaran kebencian". Dilihat dari kacamata liberal, kejahatan berbasis *hate speech* sangat mengancam ketidakadilan. Kejahatan ini mengancam korban, korban-korban potensial, dan lebih dari itu juga kita semua. Tindak kejahatan berbasis kebencian ini rupanya dianggap sebagai solusi oleh pelaku ketika yang bersangkutan merespon perbedaan, seperti perbedaan agama, suku, aliran kepercayaan, madzab, dan perbedaan lainnya.

Dalam perspektif konflik, kejahatan berbasis *hate speech* merupakan manifestasi reaksi frustrasi masyarakat suatu lantaran tekanan, yang dapat berukir himpitan ekonomi, rasa tidak aman, atau lainnya, yang kesemuanya itu tidak dapat diabaikan oleh yang bersangkutan. Namun, kejahatan ini juga bisa dilatarbelakangi untuk menutupi kelemahan dalam politik dan ekonomi.

Sedangkan dalam kaitan perspektif *labeling*, kejahatan ini adalah reaksi berlebihan terhadap perilaku yang dinilai "masyarakat" setempat sebagai tindakan menyimpang, seperti gay, lesbian, aliran Ahmadiyah, Syiah dan lainnya. Dalam konteks ini, terjadi tindak kejahatan oleh kelompok mayoritas kepada minoritas.

Buku ini jelas menawarkan jawaban teoretis dan empiris terhadap sejumlah pertanyaan penting tentang ancaman ujaran kebencian terhadap demokrasi. Kekuatan pokoknya terletak pada penguasaan penulis terhadap subjek yang dibahas; Maruli tidak saja menguasai dimensi teoretis tetapi juga dimensi hukum sehingga dan terakhir, dia sendiri memang "minoritas" sehingga studinya tidak saja ditopang oleh data yang lengkap karena posisinya sebagai polisi, tetapi juga upaya untuk memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Namun demikian, buku ini kurang mengeksplorasi kasus ujaran kebencian di media sosial, sesuatu yang belum ditulis oleh penulis karena keberadaan media sosial pada saat penulisan buku ini belum sepesat sekarang ini. Ujaran kebencian yang ditebar melalui media sosial mendorong berkembangnya sikap dan tindakan intoleran terhadap kelompok masyarakat lain. Untuk merespon hal tersebut, Polri telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri, yang mengatur tentang *hate speech* (ujaran kebencian). Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi anggota Polri dalam menangani kasus-kasus *hate speech*. Harapannya, di era demokrasi seperti sekarang ini, setiap warga negara dapat menghormati adanya kebebasan berekspresi, sekaligus memahami bahwa kebebasan tersebut tidak dapat disalahgunakan untuk menyerang hak-hak individu orang lain.

Akhirnya, baik dari sudut pandang akademis maupun kebijakan, buku ini telah menjadi salah satu sumber referensi, termasuk referensi kebijakan Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Oleh karena itu, intelektual polisi bernama Maruli Simanjuta, penulis buku ini layak dan pantas mendapatkan penghargaan pangkat Bigjen anumerta—karena perjuangan dan kegigihannya dalam ikut membangun institusi Polri yang demokratis—diharapkan benar-benar dapat mendorong bagi para penyusun kebijakan hukum di Indonesia, untuk memperhatikan masalah kejahatan berbasis kebencian.[]